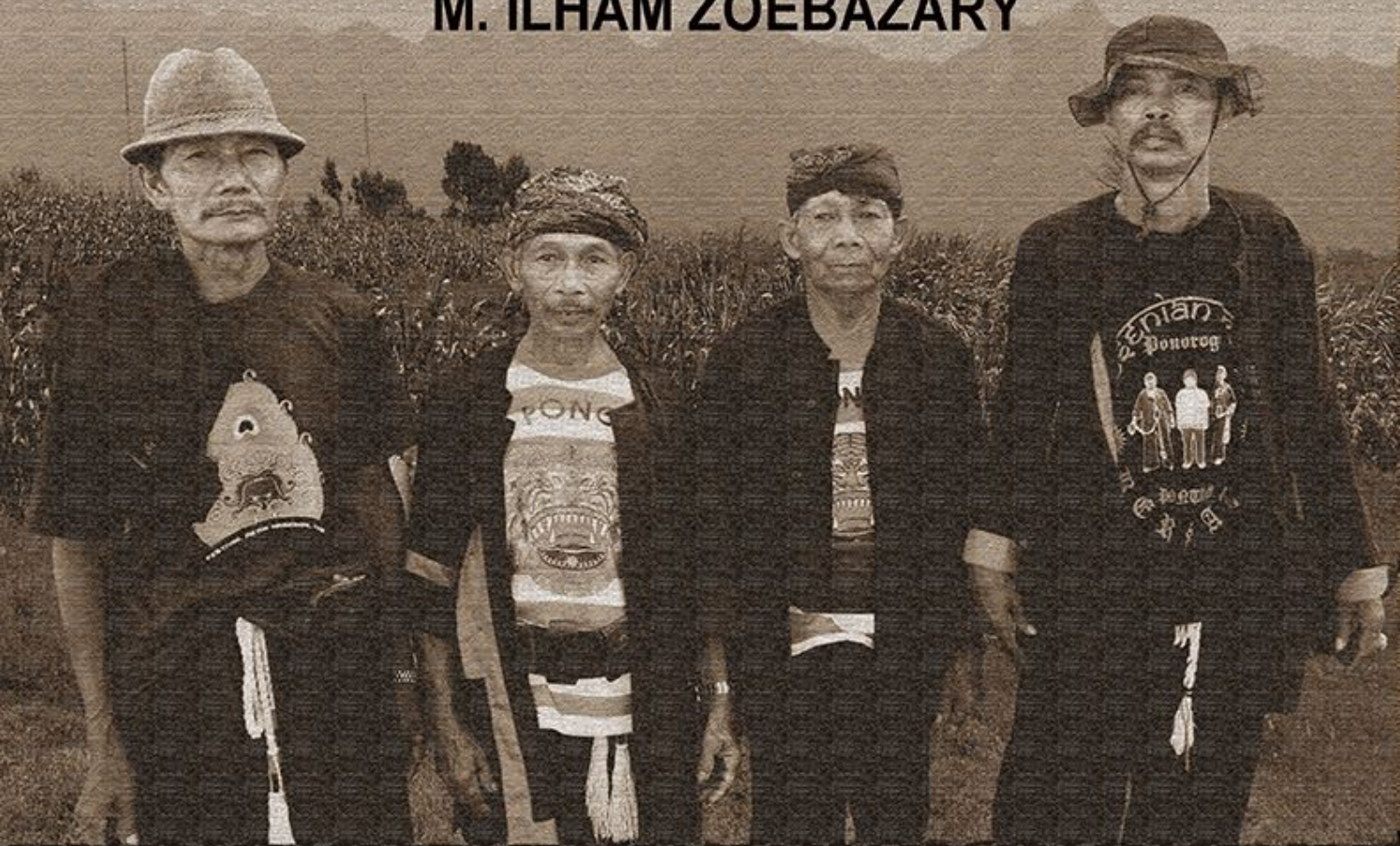


ORANG PENDALUNGAN

PENGANYAM KEBUDAYAAN DI TAPAL KUDA

M. ILHAM ZOEBAZARY



ORANG PENDALUNGAN

PENGANYAM KEBUDAYAAN DI TAPAL KUDA

Paguyupan Pandhalungan Jember

adalah lembaga nirlaba yang menaungi beberapa kegiatan kreatif, khususnya di bidang pengkajian dan pengembangan seni budaya Pendalungan di Jember.

ORANG PENDALUNGAN

PENGANYAM KEBUDAYAAN DI TAPAL KUDA

M. ILHAM ZOEBAZARY



PAGUYUPAN
PANDHALUNGAN
JEMBER
2017

ORANG PENDALUNGAN
Penganyam Kebudayaan di Tapal Kuda

Oleh
M. Ilham Zoebazary

Desain sampul, pemeriksa aksara dan tataletak
Tim Visart (Divisi Penerbitan)

Penerbit
Paguyupan Pandhalungan Jember
Pancakarya, Ajung, Jember
Email: ilham.zb@gmail.com

xvi + 228 halaman; 21 X 14 cm.

Cetakan I : Mei 2017
Cetakan II : November 2018

ISBN: 978-602-50386-0-0

Copyright © 2017 Paguyupan Pandhalungan Jember. All Rights Reserved.

Pendorong paling signifikan dalam perubahan sosial-budaya tidak terdapat dalam seberapa banyak jumlah buku sejarah yang telah kita baca, namun tersembunyi dalam kenangan-kenangan yang paling inspiratif di sepanjang hidup kita.

Modal terpenting dalam mengembangkan suatu masyarakat beserta kebudayaannya adalah pengetahuan mendasar tentang masyarakat beserta kebudayaannya itu.

(M. Ilham Zoebazary)

Ucapan Terimakasih

Puji syukur kepada Alloh SWT, atas rahmat-Nya buku ini dapat saya selesaikan sesuai rencana. Meski proses penulisan buku ini cukup lancar dan tidak sampai berlarut-larut, namun harus saya akui bahwa tidak mudah untuk menggali dan merefleksikan pikiran serta pandangan-pandangan saya mengenai masyarakat dan kebudayaan Pendalungan secara sistematis. Untuk itu saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan buku ini.

Kepada para sahabat saya tercinta di RBP (Rumah Budaya Pandhalungan): Cak Partu, Cak Dandik, Cak Bei, Cak Joko, Cak Sus, Cak Londo, Cak Untung, Cak Roni, Cak Yopi, Cak Mul, Yu Enys, Yu Elis, Yu Poppy, Yu Vera, Yu Titin, dan semua pihak yang telah memberi banyak informasi dan masukan berharga pada saya dalam penyusunan buku ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu di sini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Super khusus saya berterima kasih pada istriku tercinta, Agung Setyorini, yang dengan setia menjadi *partner* saya dalam berpikir dan mengembangkan banyak gagasan. Kepada anak-anakku tersayang Ullynara Zungga Vriscarini Syahvira, Rhugandanu Nhara Syahdimprana Ilham, dan Bhre Rigas Brahmalian Syahdimprana Ilham, kalianlah yang selalu menjadi api inspirasiku.

Jember, Mei 2017
M. Ilham Zoebazary

Sekapur Sirih

Sebelas tahun yang lalu ketika guru sekaligus sahabat saya, Prof. Dr. Ayu Sutarto, menyusun artikel pendeknya yang berjudul “Sekilas tentang Masyarakat Pandalungan” (2006), beliau mengakui bahwa tulisan, buku, dan kajian tentang masyarakat Pandalungan masih sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ternyata kelangkaan referensi mengenai masyarakat dan kebudayaan Pandalungan itu masih tetap terjadi sekarang, ketika saya menyusun buku ini. Para mahasiswa yang ingin mengkaji pernik-pernik kehidupan masyarakat Pandalungan pun selalu mengeluhkan hal itu. Para peneliti kebudayaan seolah-olah hanya sekilas saja melirik Pandalungan, dengan tingkat ketertarikan yang rendah. Pandalungan seolah terselip di balik limpah-ruah kajian tentang Using, Tengger, dan Madura.

Basis-basis intelektual untuk menggali dan mengenalkan budaya Pandalungan belum didirikan di Jawa Timur sebelum ini. Namun beberapa institusi pendidikan tinggi, seperti Universitas Jember (Unej) dan Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, mulai tertarik. Unej sudah memulainya dengan memasukkan topik penelitian Pandalungan ke dalam Puslit Budaya Etnik dan Komunitas pada tahun 2016, dan Unmuh Jember menyusulnya di awal tahun 2017.

Buku ini secara umum membahas kebudayaan orang-orang Pandalungan yang tersebar di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, namun secara lebih khusus yang berada di Kabupaten Jember. Tentu saja berbagai permasalahan kebudayaan yang terjadi di Jember maupun sekitarnya tidak terlepas dari dinamika politik regional maupun nasional, namun tulisan ini tidak akan secara spesifik mengkritisi permasalahan geopolitik. Sebagai akibatnya, hasilnya hanya

berupa sebuah pembahasan sederhana, dengan jangkauan sempit dan tidak terlalu mendalam. Pendek kata, penulisan buku ini memang tidak dilandasi ambisi akademik yang berlebihan, melainkan sekedar respons pribadi saya sebagai orang Jember yang berasal dari luar daerah (sudah sejak lama saya tidak lagi merasa sebagai orang Kediri yang tinggal di Jember). Saya juga menghindari gagasan ambisius mengenai pembahasan posisi kebudayaan Pandalungan di tengah kancah pergulatan kebudayaan nasional, meskipun hal itu asyik dan menggiurkan. Bolehlah dikatakan tulisan ini sekedar unek-unek, keluh-kesah, jalan-jalan santai, tanpa teori dan metodologi yang *rigid* dan rapi. Ya, ini memang bukan skripsi apalagi disertasi.

Berkenaan dengan identitas budaya, selama ini para peneliti lebih menyukai bertanya mengenai cara-cara bagaimana suatu etnis merepresentasikan ‘perbedaan budaya’ dibanding etnis-etnis lain. Di sepanjang buku ini, saya lebih suka bertanya tentang bagaimana mereka merepresentasikan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Upaya mencari berbagai perbedaan antaretnis tidak terlalu sulit dilakukan, tapi saya tidak tertarik memilih cara demikian untuk menjelaskan persoalan identitas budaya.

Dalam hal penggunaan istilah, baik tulisan maupun pengucapannya secara lisan, dalam buku ini saya memilih istilah ***Pandalungan*** (bukan Pendhalungan, Pandalungan, Pandhalungan, atau Mendalungan). Alasan sederhana namun cukup rinci mengenai hal ini saya uraikan pada bab khusus yang secara spesifik membahas etimologi istilah Pandalungan.

Oleh karena saya telah aktif dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan sejak belia, maka dalam tulisan ini saya tidak akan menghindar dari kesan aktivisme. Namun demikian, karena saya menjadi dewasa di lingkungan akademik, saya

sebisa mungkin berusaha tetap menjaga agar tulisan ini bersifat reflektif dan analitis.

Buku ini saya maksudkan sebagai upaya sederhana untuk membantu siapa saja yang ingin memahami masyarakat dan kebudayaan Pendalungan, kemudian berdasarkan pemahaman tersebut sudi berbesar jiwa untuk belajar menanam serta menyemaikan sikap saling memahami, menghormati, dan toleran terhadap keaneka-ragaman budaya di tengah masyarakat Tapal Kuda yang majemuk. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang vakum dari perbedaan.

Semoga bermanfaat.

M.I.Z

Daftar Isi

Ucapan Terimakasih ▶ vii

Sekapur Sirih ▶ ix

Daftar Isi ▶ xiii

Prolog: Pendalungan yang Sexy ▶ 1

Identitas Pendalungan ▶ 1

Memahami Kebudayaan ▶ 5

Pendalungan Sebagai *Platform* ▶ 10

Kajian dan Politik Kebudayaan ▶ 14

Orang Pendalungan dan Para Tetangga ▶ 17

Rumpun Budaya ▶ 17

Masyarakat Pendalungan ▶ 23

Pendalungan Raya: Entitas yang Tidak Tunggal ▶ 27

Para Tetangga ▶ 30

Pluralisme, Multikulturalisme, dan Pendalungan ▶ 37

Pluralisme dan Multikulturalisme ▶ 37

Menjaga Pluralisme dan Multikulturalisme ▶ 45

Orang Pendalungan dan Pluralisme Budaya ▶ 49

Pendalungan, sebuah Proses ▶ 49

Pendalungan di Jember ▶ 58

Identitas Kultural Pendalungan di Jember ▶ 65

Identitas Kultural ▶ 65

Kebudayaan Urban di Jember ▶ 67

Pendalungan: Mencari Bentuk ▶ 72

Jember Kampung Halaman Pendalungan ▶ 75

Menelisik Asal Kata Pendalungan ▶ 81

- Pendalungan, sebuah Eksonim ▶ 81
- Pendalungan, Definisi Kamus ▶ 83
- Mêndhalungan* dalam *Serat Centhini* ▶ 84
- Pendalungan, Definisi Masyarakat ▶ 87
- Pendalungan, sebuah Perspektif ▶ 91

Orang Pendalungan Berkesenian ▶ 95

- Peta Kesenian Pendalungan ▶ 97
- Kesenian Pendalungan ▶ 100
- Kesenian Tradisional ▶ 103
- Upaya Menciptakan Kesenian khas ▶ 108
- Pengembangan Kesenian ▶ 109
- Kentrung Djos, Produk Pendalungan ▶ 112

Bahasa Orang Pendalungan ▶ 117

- Pertemuan Bahasa-Bahasa ▶ 117
- Bahasa Jemberan ▶ 120
- Bahasa Daerah yang Semakin Hilang ▶ 123

Orang Pendalungan dan Globalisasi ▶ 127

- Globalisasi Membelit Dunia ▶ 127
- Globalisasi Media dan Konsumerisme ▶ 129
- Globalisasi di Tapal Kuda ▶ 133
- Strategi Bertahan ▶ 135

JFC (Jember Fashion Carnaval) ▶ 137

- Referensi Historis JFC ▶ 138
- Dari Personal ke Komunal ▶ 140
- JFC, sebuah Tradisi ▶ 141
- Menyikapi JFC ▶ 143

City Branding: Jember Kota Pendalungan ▶ 145

Pendalungan, Gairah Baru ▶ 145

Beberapa Pelajaran ▶ 148

Mencari *Trademark* untuk Jember ▶ 151

Wacana Baru: Jember Kota Pendalungan ▶ 154

Pendalungan dan Jagat Pariwisata ▶ 157

Pendalungan sebagai Zona Pariwisata ▶ 160

Pariwisata dan Identitas Budaya ▶ 162

Paradigma Baru: Pariwisata Berbasis Komunitas ▶ 164

Pariwisata Kota ▶ 168

Pembenahan SDM dan Birokrasi ▶ 169

Masa Depan Pariwisata Kawasan Pendalungan ▶ 171

Jember Sepanjang Masa ▶ 173

Jember, Si Perawan Molek ▶ 173

Jember, Hari Ini ▶ 177

Migrasi Orang Madura ▶ 179

Migrasi Orang Jawa ▶ 182

Epilog: Pendalungan di Ruang Proses ▶ 185

Membangun Seni-Budaya Daerah ▶ 189

Rekomendasi ▶ 192

Foto-foto ▶ 195

Daftar Pustaka ▶ 211

Indeks ▶ 221

Tentang Penulis ▶ 227

Prolog: Pendalungan yang Sexy

Identitas Pendalungan

Istilah Pendalungan telah cukup lama digunakan secara luas oleh masyarakat di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, terutama untuk mengidentifikasi berbagai hal yang berkaitan dengan identitas kultural mereka. Masyarakat di luar kawasan ini pun menggunakan istilah tersebut ketika hendak memahami, atau sekedar menandai, keberadaan suatu masyarakat unik yang tersebar di bagian timur Provinsi Jawa Timur itu. Artinya, Pendalungan bukan kosa kata baru, juga bukan gagasan baru. Bahkan sebagian daerah di kawasan ini telah dengan mantap menyebut masyarakatnya sebagai masyarakat Pendalungan, dengan implikasi yang jelas bahwa sejak saat itu segala kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan identitas kultural mereka sebagai orang Pendalungan.

Kota Probolinggo, misalnya, melalui sebuah acara temu ilmiah telah memproklamkan dirinya sebagai “Ibu Kota Pendalungan” pada tahun 2010, dan sejak itu cukup giat menyelenggarakan berbagai acara yang bersifat promotif untuk memasyarakatkan identitas kultural “baru” tersebut. Salah satu ajang yang mereka selenggarakan adalah “Apresiasi Seni Probolinggoan”, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Budaya, dan Pariwisata Kota Probolinggo bersama Dewan Kesenian Kota Probolinggo. Pada acara temu ilmiah tersebut sejumlah pengkaji kebudayaan dari Universitas Jember

diundang—saya salah satu di antara mereka—khusus untuk berbicara mengenai mozaik kebudayaan Pandalungan.

Di Jember, sesungguhnya kata Pandalungan sudah cukup lama dikenal. Namun, menginjak tahun 2016, tiba-tiba kata ini menjadi buah bibir masyarakat. Terlebih setelah Bupati Jember yang belum genap setahun memimpin, dr. Hj. Faida, MMR., mendeklarasikan Jember sebagai Kota Pandhalungan,¹ tepatnya pada 14 Mei 2016. Dalam skala tertentu, bagi masyarakat Jember, deklarasi Bupati tersebut merupakan sebuah *cultural bomb*. Menyentak, mengundang tanya, mengundang pemikiran, dan tentu saja ada beberapa gelintir orang yang bersikap sinis dan mencibirnya.

Dibanding tahun-tahun sebelumnya, acara-acara bertajuk Pandalungan lebih sering digelar di Jember pada tahun 2016, misalnya “Festival Pandhalungan ke-2” yang menampilkan berbagai aktivitas dan kreasi seni-budaya, “Pandhalungan Night Show” yang diinisiasi oleh koran *Radar Jember* (Jawa Pos Grup), menampilkan berbagai potensi seni kelompok-kelompok masyarakat, khususnya para remaja, pelajar dan mahasiswa. “Rumah Budaya Pandhalungan” dan “Komunitas Pandhalungan” telah berdiri mendahului deklarasi Bupati, digagas oleh para seniman, akademisi, serta orang-orang yang memiliki perhatian dan kepedulian tinggi terhadap pengembangan seni budaya daerah. Mereka mencetak kaos bertuliskan Pandhalungan, dijual dan laku laris-manis, selanjutnya dikenakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak muda hingga para pejabat tinggi Kabupaten Jember. Mereka juga merancang penutup kepala khas (*udheng*) dari bahan batik Jemberan, dan ternyata disukai masyarakat sehingga laku laris-manis pula. Di

¹ Mengenai cara penulisan dan pengucapan kata Pandalungan (Pandhalungan, Pendhalungan, dll.) saya bahas di bab khusus mengenai etimologi atau asal-usul kata tersebut.

Kecamatan Ambulu, sekelompok remaja pencinta musik mendirikan “Ndalungnesia”, sebuah grup musik beraliran campursari-reggae yang manajemennya dikelola oleh Sanggar Seni Kartika Budaya; Mereka inilah salah satu contoh kelompok pegiat seni muda, penuh inspirasi, dan memiliki komitmen terhadap cara baru mengelola seni tradisional yang bercorak kekinian. Sekelompok anak muda pencinta sastra juga telah mendirikan “Komunitas Sastra Pentalungan”; kegiatan mereka antara lain secara berkala membahas dan membaca puisi.

Di bidang kerajinan, tas-tas unik yang dirancang untuk cinderamata, dengan bahan dasar buah mojo yang dikeringkan dengan tulisan Pandalungan, diproduksi para pengrajin di Desa Balung Tutul. Di bidang kuliner, di kota muncul Depot Soto Pentalungan dan Warung Ndalung; yang pertama khusus menjual nasi soto, yang kedua berupa cafe untuk anak-anak muda minum kopi dan makan makanan ringan. Pada acara “Pandalungan Night Show” yang berlangsung enam kali di sepanjang bulan Januari hingga Maret 2017, para seniman Jember menyuguhkan lagu Pentalungan, tari (*flash-move*) Pentalungan, tari Jathil Pentalungan, dan Opera Pentalungan. Bahkan Bupati Jember ikut bermain sebagai tokoh utama dalam pertunjukan Opera Pentalungan yang model pertunjukannya mirip ketoprak tersebut. Di hotel Aston Jember, sebuah hotel berbintang tiga, menu-menu istimewanya menggunakan nama Pentalungan. Diskusi-diskusi ilmiah mengenai identitas budaya Pentalungan diselenggarakan di berbagai tempat, baik oleh kalangan perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, seniman, maupun pihak birokrasi, dalam rangka menggali lebih dalam pemahaman mengenai identitas kultural yang dari waktu ke waktu terlihat semakin *sexy* tersebut.

Mengapa masyarakat Jember tampak begitu antusias merespons gagasan Pentalungan sebagai identitas kultural? Ada

tiga hal yang mendasarinya. *Pertama*, mereka sudah mengenal konsep Pendalungan sebelumnya, meskipun pengenalan mereka belum berupa pemahaman yang utuh. *Kedua*, identitas kultural tersebut dinyatakan secara langsung oleh figur politik tertinggi di Kabupaten Jember, yaitu Bupati. *Ketiga*, identitas kultural “baru” tersebut mampu menjawab “kegamangan posisi etnisitas” masyarakat; tidak benar-benar Jawa tapi juga tidak benar-benar Madura, tidak benar-benar Arab, tidak benar-benar Cina, adalah suatu kegamangan posisi etnisitas yang di dalam benak setiap orang harus mendapat penjelasan rasional serta memadai.

Pada tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Jember masih cukup konservatif untuk tidak menyebut dirinya Jawa atau Madura, atau etnis lainnya. Perbedaan yang mencolok antara budaya Jawa dan Madura menyebabkan terjadinya segregasi antara kedua kebudayaan tersebut. Secara umum masyarakat Jawa dikategorikan sebagai masyarakat yang halus, sementara masyarakat Madura keras. Padahal secara geografis di Jember segregasi formal tidak pernah ada. Sekarang setelah promosi identitas Pendalungan dilakukan cukup gencar oleh pihak Pemkab Jember, masyarakat menganggap isu Pendalungan sebagai isu biasa yang dapat ditanyakan kepada lebih banyak orang di berbagai kesempatan. Hal demikian juga terjadi sebelumnya di Probolinggo dan Lumajang.

Jauh-jauh hari sebelum terjadi hiruk-pikuk seputar penggunaan identitas Pendalungan secara “resmi” tersebut, beberapa peneliti sosial-budaya di Universitas Jember telah menggunakan istilah dan konsep Pendalungan (atau sebutan lainnya, yakni Pendhalungan, Pandalungan, Pandhalungan, dan sebagainya) dalam tulisan-tulisan mereka. Namun, sebagaimana disampaikan Raharjo (2006), Pendalungan dalam konteks wacana kebudayaan merupakan tema baru dan belum banyak mendapat perhatian serius dari para pakar budaya. Di samping

itu, masyarakat Pendalungan dianggap masih kurang memiliki atraksi kultural yang bisa dijadikan ikon seperti halnya wilayah kebudayaan lain di Jawa Timur sehingga kurang menarik untuk dijadikan bahan kajian. Banyuwangi, misalnya, memiliki akar kultural Using dan Blambangan yang menancap cukup dalam dan jelas terbaca hingga beberapa ratus tahun silam. Malang, Surabaya, dan sekitarnya memiliki akar budaya Arek yang dapat ditelusuri hingga era Majapahit dan bahkan era Singasari. Kediri, Madiun, dan daerah-daerah di sekitarnya memiliki akar budaya Mataraman yang bersumber pada Kerajaan Mataram, bahkan mereka juga memiliki kekayaan budaya Panji yang bersumber pada era kerajaan yang berumur lebih tua lagi. Begitu juga daerah-daerah lain di luar Jawa Timur, seperti Bali, Jawa Tengah, Tanah Pasundan Jawa Barat, dan lain-lain. Sedangkan Pendalungan masih berupa hutan belantara kebudayaan yang selama ini jarang dieksplorasi.

Pertanyaan yang dapat diajukan kemudian, apakah yang disebut kebudayaan Pendalungan itu benar-benar ada? Jika memang ada, sampai di “unit terkecil” apakah sesungguhnya kebudayaan Pendalungan itu? Tentu tidak mudah menjawabnya, dan kita harus lebih dulu berputar-putar ke mana-mana demi memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Memahami Kebudayaan

Sebelum turun ke ranah konkret kebudayaan Pendalungan, saya perlu menguraikan di sini konsep-konsep kebudayaan yang menjadi landasan saya dalam berpikir. Dengan demikian akan tampak trek mana saja yang saya ikuti, dan trek mana saja yang karrena berbagai pertimbangan saya coba menghindarinya.

Definisi budaya yang disusun oleh Edward Burnett Taylor termasuk salah satu definisi tertua, namun masih cukup relevan untuk digunakan hingga sekarang. Menurut Taylor (1871),

budaya adalah keseluruhan hal yang kompleks, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan lain yang dimiliki manusia. Sementara itu Koentjaraningrat (1990) mendefinisikan budaya sebagai sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Senada dengan hal itu, James Spradley (1980) mendefinisikan budaya sebagai suatu sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar, yang kemudian mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekelilingnya, sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekitar.

Meskipun sekarang istilah budaya dan kultur biasa digunakan secara simultan dan keduanya merujuk pada makna yang identik, namun sesungguhnya keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal). Budaya selanjutnya diartikan sebagai segala sesuatu yang melulu bersangkutan-paut dengan akal-budi. Sementara itu kultur, atau *culture* dalam bahasa Inggris (berasal dari bahasa Latin *cultura*, dari akar kata *colere*), memiliki arti mengolah tanah atau mengerjakan tanah, dalam kaitannya dengan aktivitas bercocok-tanam. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa asal-usul istilah budaya merujuk pada aktivitas mental, sementara kultur merujuk pada aktivitas fisik.

Budaya atau kebudayaan, atau kultur, di sini harus kita maknai sebagai suatu konsep abstrak yang rumit dan total, yang melekat pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu budaya tidak dapat direduksi cakupannya sebagai sekedar ras, bangsa, etnis, apa lagi bagian kecil saja dari hidup mereka, yakni kesenian. Budaya dalam arti seluas-luasnya mencakup totalitas proses kehidupan sehari-hari umat manusia, mulai dari tindakan-

tindakan nyata hingga cara berpikir. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, saya merumuskan budaya sebagai “seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi pengetahuan, gagasan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, tindakan, serta kebiasaan lain yang dimiliki manusia, yang diperoleh melalui proses belajar, untuk digunakan dalam menafsirkan, menjalani, dan memaknai kehidupan sehari-hari.”

Sejak lama saya telah beranggapan bahwa budaya adalah hasil karya cipta terbaik manusia yang menjadi pendukung sekaligus tumpuan kehidupannya sehari-hari. Suatu kebudayaan tidak mungkin bisa dipahami sebagai sebuah entitas beku, stabil, dan steril. Kebudayaan, oleh karenanya, adalah totalitas proses kehidupan umat manusia yang menggelinding ke arah masa depan, namun menerima berbagai gesekan, benturan, ujian, dan ganjalan dari segala sisinya. Bahkan, sembari menggelinding ke arah masa depan tersebut, kebudayaan juga terus-menerus berdialog dengan jejaknya sendiri yang ditinggalkannya di belakang, di masa lalu.

Menurut Saukko (2003), kajian-kajian budaya tidak bisa membuat rumusan teoretik dengan kesatuan konsep yang bersifat universal. Mengapa demikian, karena kulturalisme dan materialisme tidak bisa dihubungkan dengan model hubungan yang *fixed*, bagaimanapun strukturnya. Semuanya tergantung pada konteks historis yang spesifik. Di sisi lain model kajian budaya yang diusung Hall tetap tidak melupakan basis material. Mungkin di situlah letak sisi praksisnya. Dia merumuskan teori budaya yang bisa digunakan oleh para agen sosial untuk melakukan perubahan.

Sebagaimana dikatakan Barker (2004), kajian budaya dalam hal ini dianggap sebagai suatu proyek cair dan luar biasa yang mengisahkan citra tentang dunia yang tengah berubah dengan harapan agar umat manusia dapat memperbaikinya. Di lain

pihak, Geertz (1992), melalui perspektif interpretif/simbolik, memandang kebudayaan sebagai suatu sistem konsepsi yang digunakan manusia untuk menafsirkan hidup dan menentukan sikap terhadapnya. Adapun persoalan pokok dalam kebudayaan di sini adalah suatu metode untuk menemukan apa yang disebut dengan kebudayaan suatu etnis (Abdullah, 2010). Etnisitas menjadi konsep kunci dalam pengkajian dan pengembangan budaya karena setiap etnis tidak akan pernah berhenti memproduksi dan mereproduksi simbol-simbol kultural untuk bertahan hidup dan memperoleh pengakuan atas eksistensinya.

Dalam kaitannya dengan identitas budaya, penggunaan konsep etnisitas sering tumpang tindih dengan konsep ras. Jika ‘ras’ dimaknai sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi manusia berdasarkan unsur genetik, maka ‘etnisitas’ digunakan untuk mengidentifikasi suatu keanggotaan masyarakat tertentu, individu per individu, berdasarkan kriteria budaya yang mereka sepakati. Jadi, anggota suatu etnis dicirikan oleh budaya yang sama sehingga menjadikan mereka memiliki keterikatan dan rasa kebersamaan di dalam kelompok mereka sendiri. Biasanya elemen-elemen budaya tradisional yang dipilih sebagai ‘representasi simbolik’ identitas etnis.

Di masa Orde Baru, pemerintah menerapkan sistem politik yang lebih primordialistik mengenai etnisitas, termasuk terhadap Madura di Jawa Timur dan Using di Banyuwangi. Etnis diterjemahkan sebagai atribut kelompok berdasarkan batasan geografis. Oleh karena itu masyarakat Madura di Jawa Timur dan Using di Banyuwangi mendapat pelajaran bahasa Jawa di sekolah-sekolah, bukan bahasa ibu mereka. Pemerintah Orde Baru mereproduksi skema etnisitas dari Pemerintah Kolonial Belanda. Pembacaan yang lebih kritis mengenai hal ini secara nyata akan memperlihatkan variasi identitas budaya dan etnisitas di wilayah Tapal Kuda.

Pembahasan mengenai etnisitas yang selama ini dilakukan para peneliti kebudayaan biasanya dikaitkan dengan konsep “kelompok etnik” yang merujuk pada studi-studi antropologi klasik, seperti *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference* (Barth [ed.], 1969). Kelompok etnik dianggap memiliki batas-batas nyata dan alamiah, misalnya lokasi geografis, dan berifat permanen. Etnisitas dilihat sebagai bagian dari kebudayaan yang statis, dengan identitas sosial-budaya yang dengan jelas membedakan kelompok etnik yang satu dengan yang lain. Pada masa kini, kita akan mudah terpeleset dalam mengartikan gagasan tentang identitas kultural suatu etnis jika hanya melihat kelompok etnis sebagai suatu kelompok statis, homogen, eksklusif, terikat, dan hanya membawa nilai budayanya sendiri. Perspektif semacam ini di masa lalu memang cukup relevan ketika digunakan untuk memandang dan memahami masyarakat Indonesia karena pada waktu itu masyarakat masih hidup terpisah-pisah, khususnya secara geografis, sehingga berbagai perbedaan yang muncul dan berkembang di antara mereka cukup jelas terlihat. Mana masyarakat Jawa, mana masyarakat Bali, mana masyarakat Sunda, dan lain sebagainya, masih cukup mudah dipetakan dan dideskripsikan. Namun ketika teknologi, terutama teknologi transportasi dan informasi, sudah berkembang sedemikian canggih, dan interaksi antaretnis sudah begitu intens, batas-batas tradisional yang dahulu kokoh itupun perlahan-lahan menipis dan memudar. Oleh karena itu identitas etnisitas harus kita perhatikan berdasarkan proses dan faktor sosio-budaya yang menunjukkan bagaimana suatu etnis membangun, memelihara, dan mengubah atau sekedar menyesuaikan identitas mereka dengan dunia yang terus bergerak.

Bourdieu (1984) menyarankan agar kita melihat sebuah dunia kebudayaan yang selalu lahir akibat dari transisi dan

sirkulasi pemikiran-pemikiran baru yang semula hanya beredar di kalangan terbatas pada kaum intelektual, di bidang seni dan para akademisi yang disebutnya sebagai produsen simbol-simbol, kepada para produsen di tahap ke dua yaitu media yang menghasilkan budaya konsumen dan kebudayaan populer. Melalui para agen perubahan itulah batas-batas wilayah kebudayaan yang semula tertutup dapat diakses dan menjadi milik publik. Cara pandang Bourdieu terhadap kebudayaan ini memungkinkan kita untuk memahami umat manusia secara lebih luas dan mendalam.

Pendalungan Sebagai *Platform*

Pendalungan memang *sexy* sekaligus kontroversial. Pada satu sisi, konsep yang belum begitu dipahami masyarakat secara luas ini mengundang daya tarik untuk ditelaah, namun di sisi lain merangsang perdebatan.

Merujuk pada pandangan Appadurai (2005), persoalan Pendalungan sesungguhnya adalah persoalan “*the production of locality*”. Pendalungan merupakan bangunan konseptual yang khas untuk memahami suatu masyarakat, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh upaya pengembangan kebudayaan daerah. Artinya, kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang diambil dan dijalankan harus didasarkan pada nilai-nilai tradisi, norma-norma agama, dan etika sosial, tidak mengacu secara membabi-butu pada proyek pencitraan dan pragmatisme politik. Sebagaimana dikatakan Hall (1991), “bukan politik yang melegitimasi kebudayaan, melainkan kebudayaanlah yang melegitimasi politik”. Itulah sebabnya mengapa langkah-langkah pengembangan kebudayaan di setiap daerah membutuhkan suatu *platform* kebudayaan yang jelas agar upaya pengembangan tersebut terarah, tidak menjadi papan permainan catur para avonturir politik. Pengembangan

kebudayaan berarti pengembangan daya hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Di Kabupaten Jember, Bupati Faida dalam upayanya mengembangkan kebudayaan daerah telah memilih suatu perspektif yang eksplisit dan cukup jelas. Dalam hal ini Bupati memilih Pendalungan sebagai *platform*. Artinya, secara filosofis Pendalungan diandaikan sebagai kerangka konseptual penguatan kerukunan sosial antarmasyarakat di wilayah Jember, menjadi semacam ideologi yang diharapkan dapat mengakomodasi multikulturalisme di mana setiap warga memiliki hak hidup yang sejajar dalam konteks kemasyarakatan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi atas pilihan tersebut, elemen-elemen Pendalungan harus tergambar dalam semua kebijakan dan aktivitas pemerintahan, baik aktivitas fisik ataupun mental-spiritual. Artinya, Pendalungan sebagai sebuah *platform* hendaknya diterjemahkan, dimaknai, dan diperlakukan menjadi semacam *blueprint* untuk mengembangkan seluruh potensi masyarakat Jember yang bercorak multietnis dan multikultur.

Pilihan Bupati Faida terhadap konsep Pendalungan sebagai *platform* dalam mengembangkan kebudayaan daerah tentunya telah melewati berbagai pertimbangan dan perenungan, baik yang bersifat normatif, akademik maupun etik. Jember memiliki kekayaan kearifan lokal yang bersumber pada nilai-nilai kultural yang telah dikembangkan oleh nenek-moyang selama berabad-abad, dan semua itu dapat menjadi referensi Bupati dalam menentukan langkah panjang ke depan. Biasanya dalam menentukan pilihan konsep seperti itu seorang pimpinan menggunakan sudut pandang *panopticon* (meminjam istilah Foucault), kamera bergerak dari atas dan menguasai seluruh pandangan yang beraneka-ragam itu. Cara ini memungkinkan bagi sang pemimpin untuk melihat keseluruhan peta persoalan, sehingga tidak ada satu pun bagian penting yang terlewatkan.

Panopticon adalah ilustrasi yang diberikan Foucault untuk menggambarkan bagaimana kuasa menggunakan pengetahuan untuk mengontrol tindak-tanduk populasi. *Panopticon* adalah model penjara yang bentuknya melingkar dan di tengah-tengah lingkaran itu ada menara pengawas yang diisi oleh sipir penjara. Akibatnya, para tahanan akan tetap merasa diawasi dengan atau tanpa sipir dalam menara pengawas tersebut. Tetapi agaknya Foucault kurang teliti dalam menggunakan istilah itu karena sapuan pandangan vertikal, atau dari atas ke bawah / dari bawah ke atas disebut *tilt*, sedangkan *pan* adalah sapuan pandangan horisontal; kekeliruan ini bisa mengakibatkan salah pengertian karena adanya *contradictio in terminis*, tapi dalam hal ini saya hanya mengambil spirit yang ada di balik konsep yang ditawarkan Foucault tersebut. Jika Foucault merujuk pada konsep *panopticon*-nya Jeremy Bentham, maka istilah yang tepat adalah *bird eye view*, atau juga disebut *aerial shot*, yakni teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek. Hasilnya akan memperlihatkan lingkungan yang luas dan benda-benda yang ada di tempat itu tampak kecil dan bertebaran. Teknik ini merupakan variasi dari *crane shot* (Zoebazary, 2010).

Ketika budaya Pendalungan diposisikan sebagai identitas kultural oleh Pemerintah Daerah, maka dalam konteks semacam ini sebaiknya budaya Pendalungan tidak difungsikan sebagai sumbu tempat menimba nilai-nilai bagi masyarakat, melainkan sebagai sebuah kerangka untuk membangun solidaritas secara kolektif. Dengan demikian kita tidak lagi memandang nilai-nilai budaya sekedar berdasarkan kadar historis yang dimilikinya.

Dalam mengembangkan kebudayaan daerah, salah satu tantangan terberat yang kita hadapi adalah berdialog dengan wacana globalisasi. Ini harus kita lakukan karena globalisasi diklaim sebagai era yang tak terhindarkan, alias sebuah

keniscayaan yang harus diterima oleh siapa pun yang berada di muka bumi. Pada era globalisasi, dunia beserta seluruh isinya mengerucut menjadi sebuah “desa global” yang tidak lagi memiliki sekat-sekat geografis, politik, dan kebudayaan (McLuhan, 1964). Sejumlah pihak menuduh bahwa globalisasi telah menjadi *mode of domination* baru kaum kapitalis Barat yang menempatkan mereka sebagai aktor kunci yang memiliki posisi istimewa dan memainkan peran global dalam melakukan kontrol terhadap berbagai aspek kehidupan umat manusia, seperti ekonomi, politik, sains dan teknologi, sosial, dan budaya. Sebagai sistem dominasi baru, globalisasi digunakan kaum kapitalis Barat untuk melanjutkan hasrat dominasi dan sekaligus mempercanggih proses eksploitasinya terhadap segenap potensi sosial masyarakat Dunia Ketiga. Proses globalisasi cenderung eksploitatif terhadap masyarakat Dunia Ketiga dan dalam pola relasi yang tidak berimbang antara keduanya. Namun masih ada ruang yang patut disyukuri karena ternyata globalisasi juga menghasilkan paradoks. Etnisitas, kultur, serta nilai-nilai tradisi justru menemukan momentum terbaiknya untuk menguatkan fondasi dan perspektif masing-masing.

Upaya pembangunan kesadaran kebudayaan masyarakat Jember sudah selayaknya jika harus merujuk pada historisitas dan lokalitas masyarakat Jember sendiri, atau dengan kata lain membangun masyarakat kekinian yang berakar pada sejarah dan kekayaan tradisinya sendiri. Apa yang dalam tulisan ini saya posisikan sebagai entitas lokal dan bersifat spesifik tidak perlu dipertentangkan dengan gagasan modernitas yang menjadi wacana global. Artinya, tradisi dan lokalitas tidak perlu direduksi atau disimplifikasi menjadi persoalan praktik romantisme-rekreatif ketika berhadapan dengan pasar dan pariwisata. Tradisi dan lokalitas, bagaimanapun juga, harus dipandang sebagai arena keseharian umat manusia.

Seharusnya diskusi, dan bahkan perdebatan sengit, mengenai upaya pengembangan kebudayaan lebih sering terjadi di kalangan birokrat dan politikus dengan melibatkan potensi para akademisi. Namun sayangnya mereka tampak lebih gemar memusatkan perhatian pada isu-isu kekuasaan yang diberi embel-embel primordialisme, agama, dan ideologi. Tentu saja hal ini berimplikasi pada prioritas pengalokasian dana keuangan pemerintah dan peraturan-peraturan daerah yang akan ditetapkan dan kemudian dijalankan.

Kajian dan Politik Kebudayaan

Suatu etnik yang secara tradisional berada dalam suatu wilayah kebudayaan tertentu, sebagaimana halnya masyarakat Jawa di Jawa Timur, lambat-laun akan terbagi ke dalam subetnik-subetnik sehingga ekspresi simbolik suatu kelompok masyarakat tidak bisa lagi digeneralisasi dan dimaknai secara statis. Hal semacam itu telah terjadi di mana-mana, termasuk di Jawa Timur yang kemudian memiliki beberapa wilayah kultural. Jawa tidak homogen, Madura juga tidak tunggal. Apa lagi pada saat ini masyarakat telah memiliki keberanian besar untuk meredefinisi kebudayaan mereka sendiri, suatu praktik yang oleh Giddens (1995) disebut sebagai ‘reproduksi lokalitas’, yakni suatu proses pendefinisian ulang, atau pencarian makna yang lebih representatif di dalam ruang-ruang kebudayaan oleh masyarakat lokal terhadap kebudayaan mereka sendiri sesuai dengan kondisi psikologis, geografis, dan sosio-kultural yang mereka hadapi pada saat ini.

Apa yang telah kita alami di masa silam, di mana kita harus berhadapan dengan politik kebudayaan Orde Baru yang mengarah pada keseragaman dan totaliterisme, merupakan hal yang menyesak dan patut disesalkan. Kebijakan Orde Baru tidak mengakomodasi realitas bangsa Indonesia yang majemuk,

yang terdiri atas lebih dari 1.300 suku bangsa,² dengan kekayaan bahasa pengantar lebih dari 700 bahasa daerah. Jika kondisi semacam itu dibiarkan berlangsung terus-menerus, tentu akan berpotensi menyemaikan bibit-bibit perpecahan bangsa. Bercermin pada pengalaman getir tersebut, maka kita harus tak henti memperjuangkan agar politik kebudayaan nasional, dan selanjutnya secara otomatis menular, menjadi model, dan diteladani oleh daerah-daerah. Hal itu berlandaskan pada pemikiran bahwa setiap produk kebudayaan memiliki keunggulannya sendiri-sendiri, dan oleh karenanya tidak ada satu kebudayaan pun di tanah air yang perlu diklaim lebih superior dibanding kebudayaan lainnya. Keragaman budaya selayaknya dipahami dan disepakati sebagai modal sosial dalam proses pembangunan bangsa.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pelaksanaan pengkajian budaya, khususnya yang berkaitan dengan etnisitas dan identitas budaya, menjadi sangat berbahaya jika dilakukan secara serampangan, tanpa melihat konteks yang lebih mendasar. Kajian budaya model kacamata kuda seperti itu biasanya hanya berputar-putar pada deskripsi teori dan etimologi, tidak kunjung menukik ke bumi. Akibatnya, proses dan hasil kajian rentan terjebak dalam permainan wacana yang sepintas terlihat penting tapi sesungguhnya hanya remeh-temeh belaka. Hal semacam itu justru dapat mengganggu perjuangan untuk mengupayakan gerak perubahan kehidupan berkebudayaan masyarakat ke arah yang lebih beradab.

Kajian budaya, meskipun dilakukan dalam kerangka akademik, tidak disarankan melulu bersifat reflektif. Ia harus

² Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah total penduduk Suku Jawa 40,2%, Suku Sunda 15,5%, Suku Batak 3,58%, Suku Madura 3,03%, Suku Betawi 2,88%, Suku Minangkabau 2,73%, Suku Bugis 2,69%, dan Suku Melayu 2,27%.

memberi ruang pada sisi praksis. Dengan kata lain, kajian budaya harus mampu melahirkan rumusan-rumusan yang dapat menjadi acuan dalam membangun kesadaran kolektif untuk bertransformasi. Oleh karena itu para pengkaji budaya sudah saatnya mempertimbangan keberpihakan, dan keberpihakan berarti memiliki agenda perubahan.

Kajian budaya yang melulu menghamba pada basa-basi dan formalitas akademik, yang tampak gagah di permukaan karena menggunakan bahasa-bahasa melangit, pada akhirnya hanya akan memenuhi rak perpustakaan dan selanjutnya menjadi sampah peradaban.

Orang Pendalungan dan Para Tetangga

Rumpun Budaya

Pemahaman terhadap wilayah Tapal Kuda, dan selanjutnya pada kebudayaan Pendalungan, adalah suatu proses *imagined community* sebagaimana pernah digagas Anderson (2008). Kita tidak pernah tahu apa, siapa, dan bagaimana sesungguhnya masa lalu kawasan Tapal Kuda. Kita hanya bisa sebatas menduga-duga, berspekulasi, berimajinasi, berdasarkan aneka referensi yang dapat kita percaya kebenarannya.

Siapakah penduduk asli Tapal Kuda? Tidak ada penjelasan yang benar-benar mampu memberi gambaran menyeluruh mengenai hal itu. Namun keberadaan situs-situs kuno yang tersebar dari daerah Bondowoso hingga Jember membuktikan bahwa di kawasan ini telah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Kemungkinan mereka itulah yang menjadi *indigenous people* di kawasan Tapal Kuda, yang pada era selanjutnya mengembangkan kebudayaan dan menyatu dengan para pendatang.

Kita mengenal suatu etnik karena kebudayaannya. Menurut Naroll (1964), umumnya kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang:

1. Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan.
2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya.

3. Membentuk jaringan interaksi dan komunikasi sendiri.
4. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Begitulah masyarakat Pendalungan dikenal pihak lain juga, terutama, karena kekhasan kebudayaannya. Orang Jawa yang berasal dari wilayah *kulonan* (Mataraman dan Panaragan), misalnya, memahami orang Pendalungan dengan pandangan stereotip sederhana, yakni sekelompok masyarakat Jawa Timur yang berada di bagian timur yang “berbicara/berkata dengan tiada tentu adab/sopan-santunnya”. Tolok-ukur utama yang mereka pergunakan dalam mendefinisikan masyarakat Pendalungan hanya tunggal alias satu sisi pandangan, yakni cara berbahasa. Tentu saja dalam hal ini cara orang Pendalungan berbahasa Jawa, bahasa orang *kulonan* itu. Mereka tidak melihat bagaimana sepak terjang orang Pendalungan secara umum, misalnya dalam berkesenian, berpolitik, bercocok-tanam, mengembangkan sisi religiusitas, mengembangkan dunia pendidikan, dan sebagainya. Hal itu bisa dimaklumi karena cara termudah untuk membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya adalah dengan memperhatikan bahasanya. Sekelompok masyarakat akan dianggap berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya jika bahasa yang mereka gunakan berbeda. Bagi setiap etnis, bahasa telah menjadi simbol utama eksistensi etnisitasnya, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahasa adalah kulit terluar kebudayaan.

Inti suatu kebudayaan adalah nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat pendukungnya sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Tindakan tertentu akan dianggap sebagai cerminan kebudayaan suatu masyarakat jika secara moral tindakan tersebut dapat diterima dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati. Maka

jelaslah jika kemudian kebudayaan suatu masyarakat di suatu area memiliki perbedaan dengan masyarakat di area lainnya. Untuk mempermudah pelaksanaan studi sosio-kultural, tempat keberadaan suatu masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda dari lainnya itu disebut sebagai ‘wilayah kebudayaan’. Melalui pemetaan wilayah kebudayaan semacam itulah Hatley (1984) memperlihatkan bagaimana keragaman peradaban Jawa tampak pada pola bahasa, makanan, pakaian, dan sebagainya.

Secara teoritis Hatley, seorang sosiolog dari Australia, dalam penelitiannya yang berjudul “*Mapping Cultural Regions of Java*” (1984), membagi Provinsi Jawa Timur menjadi enam wilayah kebudayaan, yakni (1) Arek, (2) Tengger, (3) Madura, (4) Mataraman, (5) Pendalungan, dan (6) Using. Sementara itu pada penelitian yang lebih kemudian, Sutarto dan Sudikan (2004) membagi Jawa Timur menjadi 10 wilayah kebudayaan, yaitu (1) Jawa Mataraman, (2) Jawa Panaragan, (3) Arek, (4) Samin (Sedulur Sikep), (5) Tengger, (6) Osing (Using), (7) Pendalungan, (8) Madura Pulau, (9) Madura Bawean, dan (10) Madura Kangean.

Pembagian wilayah kebudayaan Jawa Timur tersebut berbeda dengan yang dilakukan Koentjaraningrat (1994), yang meliputi Pesisir Wetan, Mancanegari, Madura, Surabaya, Tanahsabrang Wetan, dan Blambangan. Daerah Mancanegari berarti “daerah luar”, karena merupakan daerah pinggiran dari kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Jawa Mataram pada abad ke-17 hingga ke-19. Daerah Mancanegari meliputi Madiun, Kediri, dan daerah Delta Sungai Brantas, dan sekarang kita sebut daerah itu sebagai daerah kebudayaan Mataraman. Adapun sebutan Tanahsabrang Wetan ditujukan pada daerah yang sekarang kita sebut sebagai daerah Pendalungan.

Persebaran masyarakat Jawa Mataraman meliputi daerah Ngawi, Madiun, Pacitan, Magetan, Kediri, Nganjuk, Blitar,

Tulungagung, Trenggalek, Tuban, dan Bojonegoro. Sementara itu persebaran masyarakat Jawa Panaragan hanya terbatas di Kabupaten Ponorogo. Masyarakat Arek tersebar di wilayah yang terbentang mulai dari Kabupaten Lamongan di sebelah utara hingga ke Kabupaten Malang dan Batu di selatan, melintasi daerah Gresik, kota Surabaya, Mojokerto, dan Sidoarjo, sedangkan masyarakat Samin berada di seputar daerah Tuban, Bojonegoro, berbatasan dengan Cepu dan Blora di Jawa Tengah. Masyarakat Tengger hidup di sekitar Pegunungan Tengger, tersebar di Kecamatan Tosari dan Puspo (Kabupaten Pasuruan), Kecamatan Ngadisari dan Sukapura (Kabupaten Probolinggo), serta beberapa desa di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Masyarakat Using tinggal di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Madura tinggal di Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, sedangkan masyarakat Pendalungan tersebar secara luas di kabupaten/kota Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Wilayah tempat persebaran masyarakat Pendalungan ini juga sering disebut sebagai daerah Tapal Kuda, karena jika diamati secara sekilas bentuknya di atas peta menyerupai bentuk ladam atau sepatu kuda. Untuk memudahkan proses identifikasi dan pembahasan, saya menyebut keseluruhan daerah dan masyarakat Pendalungan di wilayah Tapal Kuda ini secara spesifik dengan sebutan Pendalungan Raya. Jika wilayah Tapal Kuda juga mencakup wilayah budaya Tengger dan Using, sebutan Pendalungan Raya dimaksudkan sebagai wilayah yang dihuni masyarakat Pendalungan.

Sutarto (2006) menganggap bahwa secara administratif kawasan kebudayaan Pendalungan meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Lumajang. Namun saya perlu menambahkan di sini,

berdasarkan pertimbangan sosio-kultural, bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuwangi harus kita masukkan ke dalam kawasan budaya Pentalungan. Jadi, tidak seperti pendapat Sutarto di atas, saya beranggapan bahwa tidak semua wilayah Kabupaten Banyuwangi dapat diklaim sebagai kawasan budaya Using. Justru sebagian besar wilayah Banyuwangi tercakup dalam wilayah budaya Pentalungan, dengan komposisi utama penghuninya masyarakat Jawa dan Madura.

Di dalam penelitiannya, Hatley menempatkan Tapal Kuda secara antropologis ke dalam wilayah kebudayaan Pentalungan. Dia mencatat bahwa di kawasan Tapal Kuda, yang merupakan “negeri kedua” orang Madura, berdiam masyarakat Madura dalam jumlah cukup besar, meskipun secara kultural dan historis mereka tetap harus dibedakan identitas budayanya dengan orang Madura di pulau Madura. Bagi Hatley, kawasan Tapal Kuda merupakan tempat bertemunya masyarakat dan kebudayaan Jawa-Madura, yang kemudian membentuk suatu kebudayaan yang unik.

Dibanding wilayah-wilayah kebudayaan lain di Jawa Timur, bisa dikatakan bahwa selama ini wilayah kebudayaan Pentalungan mendapat perhatian yang relatif sedikit dalam kajian-kajian akademis. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Pentalungan dengan seluruh aspek yang melingkupinya merupakan entitas yang—jika dipertimbangkan secara akademis—belum stabil, belum menemukan wujudnya yang konkrit. Padahal selama ini dalam kancah politik regional maupun nasional wilayah ini cukup lantang berbicara. Daerah Tapal Kuda adalah daerah yang dikenal cukup “panas” dan responsif dalam menghadapi berbagai momentum politik.

Sebagaimana telah dicatat oleh Raharjo (2006), wilayah Tapal Kuda sering dianggap sebagai wilayah yang rawan konflik. Beberapa peristiwa yang dapat dijadikan sebagai

pembenar atas justifikasi tersebut antara lain: (a) peristiwa Jenggawah, suatu konflik antara petani dan pihak PTPN X di Jember, (b) aksi pembakaran gereja di Situbondo pada tahun 1995, (c) kasus perebutan tanah antara penduduk dan militer di Sukorejo Jember, (d) aksi pembantaian dengan isu Ninja pada tahun 1998, dan (e) aksi masyarakat ketika Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan pada tahun 2002. Namun, sejauh yang saya perhatikan, apa yang sebenarnya terjadi di wilayah Tapal Kuda sampai jatuhnya rezim Orde Baru, secara umum tidak pernah mencapai titik kuliminasi yang bisa dianggap sungguh-sungguh “membahayakan” keamanan dan stabilitas politik nasional. Di wilayah ini tidak pernah ada kerusuhan sosial dan perlawanan yang cukup berarti terhadap pemerintah. Kalaupun terjadi, skalanya cukup kecil dan dengan cepat hal itu dapat diatasi.

Penting untuk dicatat bahwa di wilayah Tapal Kuda peran kyai tetap besar dan dianggap penting, khususnya sebagai perantara yang menjembatani antara warga masyarakat dengan pihak penguasa, khususnya jika muncul gejala konflik atau ketidaksepehanan di antara kedua belah pihak. Itulah sebabnya pada masa-masa kampanye, dalam kaitannya dengan pilpres atau pilkada, para kyai berubah menjadi selebritas dadakan yang diperebutkan oleh parpol. Pondok-pondok pesantren besar selalu menjadi jujugan para pejabat (atau para calon pejabat), sebagai simbolisasi kedekatan para (calon) pejabat tersebut dengan masyarakat muslim.

Masyarakat Pendalungan

Meskipun secara sepintas antara berbagai elemen kebudayaan Pendalungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain di sekitarnya terdapat banyak kesamaan, hal itu tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Tapal Kuda untuk tetap bangga

dengan identitas Pendalungan. Hal itu terjadi karena, dalam pandangan saya, apa yang seharusnya diperkuat dan ditonjolkan oleh masyarakat bukanlah perbedaan di antara mereka, melainkan berbagai keunggulan yang mereka miliki.

Sesungguhnya tidak pernah ada batas-batas resmi dan permanen yang bisa menandai lokasi persebaran masyarakat Pendalungan di daerah Tapal Kuda. Apa yang oleh Sutarto (2006) disebut sebagai pembagian wilayah kebudayaan secara administratif itu sesungguhnya hanyalah suatu teknis untuk mempermudah proses identifikasi. Pada periode Kolonial Hindia Belanda, daerah ujung timur Jawa ini juga disebut *Oosthoek*. Oleh divisi teritorial Kerajaan Mataram daerah ini disebut *Bang Wetan*, yang menunjuk pada beberapa daerah di sebelah timur Surabaya. Wilayah-wilayah itu kemudian dikategorikan sebagai *Pesisir Wetan* (Pesisir Timur), wilayah yang para penguasanya diwajibkan membayar upeti dan melakukan kerja wajib untuk kerajaan Mataram (Winarni, 2012).

Wilayah Pendalungan adalah daerah pertanian yang didominasi oleh tanaman keras, seperti karet, kakao, kopi, teh, dan kelapa. Tidak semua tanah di wilayah ini berupa lahan subur seperti yang terdapat di wilayah Mataraman dan Arek. Meskipun beberapa sungai mengalir melintasi daerah ini, iklim di daerah Pendalungan terasa lebih kering sehingga akses masyarakat terhadap air tidak sebanyak di Mataraman dan Arek. Bagian utara wilayah Pendalungan lebih kering daripada yang di selatan. Dibanding dengan kawasan-kawasan budaya lainnya di Jawa Timur, di kawasan ini terdapat lebih banyak keluarga miskin (Purwandaya, 2011).

Pergaulan yang intens dan berlangsung dalam waktu relatif lama antara masyarakat Jawa dan Madura menjadi sebab utama berkembangnya budaya Pendalungan. Oleh karena itu dapat ditelusuri dan dilacak asal mula terbentuknya masyarakat

Pendalungan berdasarkan proses terjadinya pergaulan di antara kedua etnis tersebut. Saya memperkirakan sebutan Pendalungan (atau semula Mendalungan) bagi masyarakat di kawasan Tapal Kuda itu mula-mula diberikan oleh orang-orang Jawa (Demak dan Mataram), yang dalam kehidupan sehari-hari telah biasa menggunakan istilah tersebut, pada abad ke-16 ketika mereka mulai intens mengadakan pergerakan ke arah Blambangan. Jadi, sebutan Pendalungan bukan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 sebagaimana diperkirakan beberapa peneliti, melainkan jauh lebih awal dari itu.

Setelah era kejayaan Majapahit berakhir, wilayah di Jawa Timur bagian timur, yakni Blambangan, menjadi kerajaan yang berdiri sendiri, beraulat, dan selanjutnya menjadi incaran perebutan berbagai pihak. Dalam kurun waktu dua abad (1546–1764) Blambangan menjadi rebutan antara kerajaan Demak dan Mataram di Jawa Tengah serta kerajaan-kerajaan di Bali. Kedua pihak yang secara politis berbeda tersebut, yakni kerajaan Islam (Demak dan Mataram) di sebelah barat, dan di sebelah timur sejumlah kerajaan di Bali (Gelgel, Buleleng, dan Mengwi) secara bersamaan memperebutkan wilayah Blambangan untuk mendukung ambisi politik dan agama mereka sendiri. Demak mengirimkan ekspedisi militer ke Blambangan pada tahun 1546. Ekspedisi Sultan Demak ke Blambangan tersebut bekerjasama dengan Pasuruan dan akhirnya berhasil mengepung Panarukan sehingga Blambangan pun jatuh pada tahun itu. Selanjutnya pada tahun 1639 Sultan Agung menggempur Blambangan dengan kekuatan besar dan berhasil melumpuhkannya. Ekspedisi militer Mataram ke Blambangan dilakukan dua kali lagi pada tahun 1648 dan 1665 sehingga memaksa Blambangan memindahkan ibu kotanya secara berturut-turut ke Bayu dan selanjutnya ke Macanputih (Sudjana, 2001; Margana, 2007; Winarni, 2012).

Masyarakat Jawa pada era Kerajaan Mataram telah mencapai kemapanan budaya sehingga konsep budaya Jawa dapat dideskripsikan dengan jelas. Sebaliknya masyarakat Pandalungan adalah masyarakat pinggiran, tidak pernah secara sungguh-sungguh mendapat sentuhan kultur keraton yang feodalistik dan “terpelajar”. Cukup wajar jika kemudian kebudayaan masyarakat Pandalungan berkembang sesuai dengan ekologi sendiri, menjadi lebih terbuka, moderat, dan demokratis. Namun pada tahap berikutnya, selama beberapa abad, terdapat juga sentuhan kultur feodalistik-birokratis model perkebunan yang dihasilkan dari perilaku orang-orang Belanda yang menjadi penguasa perkebunan, kemudian diadopsi oleh para bawahannya yang terdiri atas orang-orang pribumi. Menjelang masa kemerdekaan, identitas Pandalungan berproses lagi secara meyakinkan menjadi bagian integral bangsa Indonesia. Berbagai perlawanan yang dilakukan tentara Indonesia terhadap pemerintah Kolonial Belanda, dengan dukungan masyarakat Tapal Kuda, menjadi penanda dinamika identitas kultural Pandalungan.

Secara umum karakter masyarakat Pandalungan adalah bersifat terbuka dan mau menerima perbedaan, religius, lugas, egaliter, temperamental, serta suka bekerja keras. Selain itu mereka memiliki solidaritas tinggi, meskipun pada akhirnya solidaritas yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pandalungan lebih bersifat pragmatis ketimbang bersifat kultural. Sifat-sifat positif yang telah disebutkan tadi jika tidak dibina secara cepat, tepat dan terarah, pada akhirnya juga tidak akan mampu lagi beroperasi secara efektif dalam mengusung konsensus kultural Pandalungan.

Karena perkembangan teknologi komunikasi modern yang demikian dahsyat, dengan daya jangkauan yang begitu mendasar terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, maka entitas

kebudayaan yang berkembang di wilayah Pandalungan tidak lagi hanya diwarnai budaya Jawa, Madura, serta budaya sejumlah etnis minoritas lainnya, tetapi telah menyusup ke dalamnya nilai-nilai nasional dan internasional. Nilai-nilai tersebut terutama masuk melalui media massa dengan intensitas yang nyaris tak terukur.

Dibanding masyarakat Jawa Mataraman, Madura, dan Using yang memiliki akar kebudayaan yang menancap lebih dalam—setidaknya akar historis, masyarakat Pandalungan memiliki memori kolektif yang lebih rendah. Untuk memiliki memori kolektif yang kokoh dan berkedalaman, suatu masyarakat harus membangunnya dalam jangka waktu lama, terkadang butuh waktu turun-temurun. Masyarakat Pandalungan tampaknya masih belum merasa berkepentingan terhadap keberadaan memori kolektif yang kokoh tersebut dalam tata pergaulan sosio-kultural mereka. Akibatnya, pada masyarakat Pandalungan lebih sulit dibangun dasar-dasar kepercayaan bersama terhadap nilai-nilai yang harus dijunjung, dihormati, dan ditaati seluruh warga masyarakat.

Masyarakat Pandalungan juga memiliki pandangan yang lebih simpel terhadap tradisi, yakni sebagai sesuatu yang dinilai kurang penting, tidak perlu mendapat prioritas tinggi, dan bahkan dalam beberapa hal dianggap kuno. Secara sepintas hal ini akan memperlihatkan bahwa masyarakat Pandalungan tidak memiliki karya budaya yang bernilai. Memang, inilah antara lain kelemahan mendasar yang melekat pada masyarakat Pandalungan serta masyarakat percampuran pada umumnya. Namun sesungguhnya hal itu juga bisa dinetralisir dan dikelola untuk dijadikan sebagai sesuatu yang menguntungkan, yakni suatu kondisi bahwa secara psikologis masyarakat Pandalungan tidak memiliki beban kultural seberat para tetangganya tersebut.

Pendalungan Raya: Entitas yang Tidak Tunggal

Masyarakat Pendalungan secara administratif berada di 9 kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda. Secara kultural, wilayah persebaran mereka dapat disebut sebagai Pendalungan Raya. Cakupan wilayah yang luas tersebut tidak memungkinkan bagi mereka untuk seragam dan berciri sama. Artinya, masyarakat Pendalungan adalah masyarakat yang tidak tunggal. Identitas kultural Pendalungan masing-masing kelompok di Pendalungan Raya tidak mungkin di-tunggal-kan. Jadi, upaya memahami konsep Pendalungan adalah, pertama-tama, kesediaan untuk memahami ketidaktunggalan tersebut.

Identitas Pendalungan lahir dalam konteks pergulatan panjang masyarakat Jawa dan Madura—juga etnis-etnis lain—yang secara bergelombang datang ke wilayah Tapal Kuda dalam relasinya dengan perkebunan dan para penguasa kolonial di masa lalu. Pembentukan identitas Pendalungan tidak bersifat serta-merta, melainkan melalui tahap yang berlapis-lapis. Namun secara umum tahap-tahap tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga periode utama, yakni (1) periode sebelum era perkebunan, (2) periode perkebunan, dan (3) periode kontemporer (pascaperkebunan). Periodisasi ini cukup penting disusun untuk lebih memudahkan upaya pemahaman terhadap proses pembentukan identitas masyarakat Pendalungan.

Pada periode pertama, masyarakat Jawa setempat berinteraksi dengan masyarakat Madura pendatang. Pola interaksi mereka kemungkinan masih bersifat sederhana dan temporer, dalam hubungannya dengan transaksi perdagangan. Barulah pada periode kedua, pola baru dalam praktik sosial dan ekonomi diinternalisasi oleh kedua belah pihak karena mereka mulai dikenalkan pada teknik berkebun yang relatif modern, serta tata pergaulan para pemilik kebun. Apa pun praktik kebudayaan masyarakat Pendalungan di masa itu, rujukan

utamanya adalah pemerintah lokal (yang di-*back up* oleh pemerintah kolonial) di satu sisi, serta tokoh informal agama Islam di sisi lain. Setelah melampaui era kemerdekaan, pola sosial masyarakat Pandalungan mengalami pergeseran lagi seiring dengan perkembangan jaman. Persinggungan secara intens dengan berbagai kelompok masyarakat dari wilayah kebudayaan lain di Indonesia, ditambah dengan keadaan alam di mana kelompok-kelompok masyarakat Pandalungan tinggal, mendorong munculnya perbedaan di antara mereka. Memang secara umum kebudayaan Pandalungan yang terbentang mulai dari Pasuruan hingga Jember memiliki dasar yang sama, namun bagaimanapun juga kompleksitas dan intensitas relasional antar-kebudayaan tersebut berbeda kadarnya. Itulah sebabnya jika diamati secara lebih seksama akan tampak nuansa perbedaan-perbedaan sosio-kultural tersebut.

Kebudayaan manusia selalu terbentuk secara bertahap berdasarkan hubungan timbal-balik yang diciptakannya dengan alam lingkungannya. Itulah sebabnya masyarakat Pandalungan di Tapal Kuda tidak akan menunjukkan keseragaman sebagaimana masyarakat monokultur karena mereka hidup di lingkungan yang tidak seragam. Masyarakat Pandalungan yang hidup di pesisir, misalnya yang berada di Situbondo, akan berbeda dengan mereka yang menetap di daerah perkebunan dan pertanian, misalnya di Jember. Lingkungan mereka itulah yang pertama-tama menstimulasi terjadinya perubahan kebudayaan serta terciptanya kebudayaan baru. Masyarakat Pandalungan yang hidup sebagai nelayan di pesisir pada umumnya bersifat keras, temperamental, dan pemberani karena terbiasa bekerja di tengah alam yang ganas dan berbahaya. Di lain pihak, masyarakat Pandalungan yang menjadi petani atau peternak di pedesaan berwatak relatif tenang dan lunak, cenderung komunal, serta memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkesenian.

Sementara itu di wilayah perkotaan, masyarakat Pendalungan memiliki mentalitas dan jenis kepribadian yang lebih dinamis, berwatak materialistis, dan individual.

Secara garis besar, berdasarkan karakter sosio-kultural masyarakatnya, wilayah kebudayaan Pendalungan saat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni Pendalungan Barat (Pasuruan dan Probolinggo), Pendalungan Timur (Situbondo dan Bondowoso), dan Pendalungan Selatan (Lumajang, Jember, dan Banyuwangi). Masyarakat Pendalungan Barat lebih banyak terpengaruh kebudayaan Arek, hal ini terutama tampak pada masyarakat Pendalungan di Pasuruan. Masyarakat Pendalungan Timur mendapat banyak pengaruh dari kebudayaan Madura. Sedangkan masyarakat Pendalungan Selatan lebih banyak terpengaruh kebudayaan Mataraman serta Using.

Penjelasan tentang pengelompokan sub-Pendalungan ini sesungguhnya masih membutuhkan studi yang lebih mendalam. Pemetaan yang saya lakukan ini masih bersifat awal, butuh dukungan data dan analisis yang lebih mendalam. Sebagaimana tampak di lapis permukaan kehidupan masyarakat, situasi percampuran antara masyarakat berkultur Jawa dan Madura tidak bersifat merata pada semua bagian di masing-masing daerah, termasuk di Kabupaten Jember. Dengan mudah dapat kita temukan di beberapa desa kultur Jawa tampak dominan, dan sebaliknya di beberapa desa lainnya kultur Madura yang dominan. Di sejumlah titik di wilayah perkotaan bahkan tidak menonjol lagi dominasi kultur Jawa-Madura, melainkan sudah bergeser menjadi generasi atau masyarakat baru yang ditandai oleh penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu.

Para Tetangga

Masyarakat di kawasan Tapal Kuda memiliki suatu karakteristik yang cukup berbeda dengan masyarakat di

kawasan-kawasan kultural lainnya di Jawa Timur. Sebagaimana dijelaskan Sutarto (2006), masyarakat di wilayah ini telah lama menjadi kantong pendukung Islam kultural dan kaum Abangan. Pendukung Islam kultural dimotori oleh para kyai dan ulama, khususnya dari Nahdlatul Ulama (NU), sementara kaum Abangan dimotori oleh tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh yang tergabung dalam Aliran Kepercayaan. Di Banyuwangi, misalnya, pengaruh agama Islam tidak sekuat di Bondowoso, Situbondo, dan Jember; di wilayah ini kaum abangan dan Aliran Kepercayaan lebih berpengaruh, meskipun tidak menonjol dan kasat mata. Gambaran mengenai hal itu dikuatkan oleh kondisi objektif mengenai kehidupan berkesenian di Banyuwangi yang lebih subur dan semarak. Di seluruh Indonesia, di tempat-tempat di mana agaman Islam terasa mendominasi, kesenian tradisional maupun kontemporer tidak dapat berkembang secara agresif mengesankan, kecuali kesenian yang diklaim khas Islam seperti Hadrah dan Terbangan.

Persebaran penduduk di kawasan Tapal Kuda, berdasarkan angka yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2015, adalah sebagai berikut.

Daerah	Jumlah Jiwa
Kab. Lumajang	1.030.193
Kab. Jember	2.407.115
Kab. Banyuwangi	1.594.083
Kab. Bondowoso	761.205
Kab. Situbondo	669.713
Kab. Probolinggo	1.140.480
Kab. Pasuruan	1.581.787
Kota Probolinggo	229.013
Kota Pasuruan	194.815
Jumlah Total	9.608.404

Jumlah Penduduk di wilayah Tapal Kuda, Tahun 2015

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017.

Tabel di atas secara umum menunjukkan jumlah beserta persebaran masyarakat Pendalungan di wilayah Tapal Kuda. Angka-angka di atas juga dapat memberi gambaran mendasar mengenai apa yang terjadi selama ini di wilayah Pendalungan. Dalam 50 tahun terakhir ini berbagai perubahan besar telah mengemuka, baik dalam hal jumlah penduduk maupun orientasi kebudayaan masyarakat. Perubahan-perubahan ini tentu saja dapat dikaitkan dengan transformasi ekonomi, sosial dan politik abad ke-20 di Indonesia, seperti industrialisasi, modernisasi pertanian, pendidikan, dan perbaikan pelayanan kesehatan. Efek berantainya berupa ledakan penduduk, sulitnya mencari pekerjaan, urbanisasi, dan menurunnya moralitas masyarakat.

Dalam hal kebudayaan, masyarakat Pendalungan memiliki kaitan erat dengan masyarakat lain, terutama yang berasal dari wilayah kultural Mataraman, Panaragan, Arek, Madura, dan Using. Kelima daerah kebudayaan itulah yang menjadi sumber potensial kekayaan kultural masyarakat Pendalungan.

Kawasan budaya Mataraman didominasi oleh area pertanian karena tanahnya yang subur, terbentang di sepanjang sungai besar, dengan tanaman utama padi yang diolah secara tradisional. Dua sungai besar yang melintasi daerah itu adalah Bengawan Solo dan Kali Brantas, dan pengembangan sistem irigasi membantu pelaksanaan produksi beras di wilayah tersebut. Keberadaan dua sungai besar itu, menurut Purwandaya (2011), membawa berkah sekaligus kutukan bagi orang-orang di daerah tersebut karena banjir besar terjadi setiap tahun akibat terus berkurangnya hutan di hulu sungai. Selain merendam daerah pemukiman, banjir tahunan ini juga sering merugikan para petani karena menggenangi areal persawahan yang luas sehingga menyebabkan petani gagal panen.

Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Mataraman di masa lalu menerima banyak pengaruh dari masyarakat Jawa

Surakarta dan Yogyakarta karena kawasan tersebut merupakan bagian integral dari daerah kekuasaan Kesultanan Mataram. Sistem nilai budaya Mataraman merupakan sistem nilai budaya feodalistik yang bersumber pada nilai-nilai budaya kraton yang dikembangkan secara sistematis oleh Kerajaan Mataram. Nilai-nilai budaya kraton itulah yang pada akhirnya menjadi dasar sosio-kultural masyarakat Surakarta-Yogyakarta secara turum-temurun, dan selanjutnya secara perlahan namun pasti merembes ke wilayah Jawa Timur bagian barat.

Masyarakat Jawa Mataraman mempunyai pola kehidupan sehari-hari sebagaimana pola kehidupan orang Jawa pada umumnya. Selera berkesenian masyarakat di daerah Mataraman sama dengan selera berkesenian masyarakat Jawa Tengahan, sehingga kesenian yang berkembang dan populer di daerah ini adalah kesenian khas Jawa seperti Jaranan, Ketoprak, Wayang Kulit, Wayang Orang, Campursari, Tayub, dan lain-lain. Namun sayang saat ini kesenian Ketoprak dan Wayang Orang hanya tinggal puing-puingnya saja, padahal dulu keduanya merupakan kesenian yang sangat digemari masyarakat. Berbagai upacara adat Jawa yang dianggap penting hingga sekarang masih tetap diselenggarakan masyarakat Jawa Mataraman, misalnya upacara *tingkeban* (atau *mitoni*, dilakukan pada saat usia kehamilan tujuh bulan, hanya pada kehamilan pertama), *sepasaran* (dilakukan setelah bayi berusia lima hari), dan sebagainya. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah ini adalah bahasa Jawa yang mengacu pada model bahasa Jawa masyarakat Surakarta dan Yogyakarta.

Masyarakat Jawa Panaragan tinggal di wilayah Kabupaten Ponorogo dan dikenal sangat menghormati tokoh informal tradisional yang disebut warok, yang secara spiritual dianggap memiliki berbagai kelebihan dibanding orang biasa. Jenis kesenian yang paling populer di wilayah ini adalah Reyog, dan

daerah inilah yang merupakan daerah asal kesenian yang terkenal itu. Reyog dan warok adalah dua hal yang nyaris tak terpisahkan, dan dua entitas ini sarat dengan muatan yang bersifat mistis-kejawen. Meskipun demikian di wilayah ini juga terdapat cukup banyak pondok pesantren, salah satunya yang terkenal adalah Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang terletak di desa Gontor, kecamatan Mlarak. Setiap tahun masyarakat Ponorogo menyelenggarakan serangkaian acara tradisional yang disebut *Grebeg Suro*. Pada acara tersebut ditampilkan berbagai macam ritual adat dan pertunjukan seni, dan pertunjukan yang terbesar dan diunggu-tunggu masyarakat adalah Festival Reyog Nasional, di mana berbagai sanggar reyog dari berbagai penjuru tanah air, bukan hanya dari Pulau Jawa, berkumpul dan beradu kreasi.

Kawasan budaya Arek, yang terletak di bagian tengah Jawa Timur, sebagian besar berupa daerah perkotaan yang ramai dan berpenduduk padat, kecuali Lamongan dan Kabupaten Malang yang masih didominasi area pertanian. Pada sepanjang jalan raya Surabaya-Malang kini telah berkembang menjadi teritori industri manufaktur, dan secara historis dimulai dengan munculnya pabrik-pabrik gula yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya muncul industri petrokimia yang terletak di Gresik, diikuti oleh sejumlah besar pabrik barang-barang konsumsi di kawasan Surabaya dan Sidoarjo, serta industri tembakau yang terletak di sepanjang jalan utama Surabaya-Malang.

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, sebuah kota metropolitan yang pada akhirnya menjadi pusat perdagangan, industri, komunikasi, pendidikan, dan hiburan, sekaligus menjadi pusat kehidupan dan perkembangan hampir semua jenis kesenian tradisional maupun kontemporer. Di kota ini pernah berkembang kesenian Ludruk

secara mengesankan, namun saat ini hanya tinggal puing-puing reruntuhannya saja yang tersisa di pojok-pojok kampung.

Masyarakat Madura di Pulau Madura sejak lama telah dikenal sebagai kaum yang ulet dan tangguh. Beberapa peneliti meyakini hal itu disebabkan oleh alamnya yang kering dan tandus. Masyarakat Madura terdiri atas para pemeluk agama Islam yang taat, dan agama Islam dijadikan sebagai fondasi kehidupan sosial masyarakat. Itulah sebabnya masyarakat Madura menempatkan kyai sebagai rujukan utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kyai, dan juga dunia pesantren, menempati posisi strategis dalam sistem sosial masyarakat Madura. Kesenian yang berkembang di wilayah ini banyak bernafaskan Islam, misalnya tari Zafin, Sandur, dan Diba'an. Kesenian lain yang masih ada adalah Topeng Dalang, musik Tuk-tuk, dan Saronen yang biasa dimainkan untuk mengiringi karapan sapi. Di beberapa tempat, masyarakat secara massal mengembangkan kerajinan batik khas Madura, misalnya di Desa Tanjung Bumi, Bangkalan. Mereka juga melakukan ritual Petik Laut atau *Rokat Tasse* (larung sesaji). Masyarakat Madura yang berada di daerah pedalaman hidup dengan cara berkebun atau beternak sapi, sedangkan yang berada di daerah pesisir bekerja sebagai nelayan atau pembuat garam tradisional. Sebagian masyarakat Madura tinggal secara berkelompok di rumah adat yang disebut *Tanean Lanjang*.

Masyarakat Using adalah masyarakat asli Banyuwangi yang dianggap sebagai pewaris langsung Kerajaan Blambangan. Istilah “using” pertama kali digunakan dalam tulisan seorang sejarawan Belanda, C. Lekkerkerker, pada tahun 1923. Arti “using” adalah “tidak” atau “bukan”. Menurut Margana (2012), masyarakat Using merupakan konfigurasi etnis baru, peranakan Bali yang tidak berkasta (*out of caste*), yang terbentuk pada masa kolonisasi Bali atas Blambangan selama lebih dari satu

setengah abad. Pada saat ini masyarakat Using beserta kesenian dan tradisinya tersebar di sejumlah desa yang mengelilingi ibukota kabupaten. Kesenian khas mereka yang tetap terjaga hingga sekarang, bahkan mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, antara lain Gandrung, Angklung, dan Barong Kemiren.

Pluralisme, Multikulturalisme, dan Pendalungan

Pluralisme dan Multikulturalisme

Hefner (2007) mengilustrasikan Indonesia, seperti halnya Malaysia dan Singapura, sebagai suatu negara yang memiliki warisan dan tantangan pluralisme budaya (*cultural pluralism*) secara lebih mencolok dibanding negara-negara lain, sehingga ketiganya dipandang sebagai lokus klasik bagi bentukan baru masyarakat majemuk (*plural society*). Pernyataan Hefner tersebut tidak berlebihan karena Indonesia, dan negara-negara tetangga, memiliki sejarah panjang mengenai pluralisme budaya, bahkan jauh sebelum negara-negara tersebut merdeka.

Suatu kawasan multikultural terbentuk karena proses migrasi berbagai etnik yang biasanya berlangsung secara bertahap, dalam waktu relatif lama. Migrasi penduduk dari berbagai penjuru wilayah dan kemudian menetap di suatu wilayah tertentu dalam jumlah cukup besar pada akhirnya membentuk suatu masyarakat multietnik. Masyarakat yang dalam prosesnya tersusun atas dasar keanekaragaman etnik beserta kebudayaannya ini kemudian melahirkan masyarakat majemuk (*plural society*). Peran serta setiap etnik beserta kebudayaan mereka yang berbeda dalam membangun kemajuan suatu masyarakat pada umumnya diterima, diakui, dan diberi tempat. Peran tersebut dianggap wajar, bahkan seringkali dianggap memperkaya dan memberi ciri khas. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya konsep multikulturalisme di sejumlah negara maju.

Untuk dapat menangkap, meresapi, dan selanjutnya mampu menganalisis secara komprehensif berbagai persoalan kultural yang ada pada masyarakat lokal di Indonesia yang majemuk, kita perlu memahami setidaknya dua hal mendasar, yakni (1) persoalan apakah yang sesungguhnya sedang dihadapi oleh masyarakat lokal, dan (2) teori apa yang dapat mendukung kita dalam mengurai, menjelaskan (dan bila perlu mengatasi) persoalan tersebut. Dalam upaya memahami dinamika budaya masyarakat multikultur Pedalungan, misalnya, perspektif antropologis dapat menolong kita.

Dari cara pandang antropologis, berdasarkan kehidupan tradisionalnya, masyarakat Nusantara—termasuk di dalamnya masyarakat Pedalungan—dapat dikategorikan sebagai suatu masyarakat arkais, yaitu masyarakat yang memiliki karakter sebagaimana diidentifikasi Eliade (2002) berikut.

1. Kosmologi menduduki tempat utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pandangan tentang kehidupan dan dunia membentuk satu kesatuan dan keseluruhan yang organik.
2. Hampir keseluruhan pemikiran mereka pertama-tama diungkapkan dalam bentuk simbol. Mereka tidak membedakan mitos dengan sejarah. Tidak ada anggapan sejarah hanya sebagai sejarah; melainkan sejarah sebagai sesuatu yang bertugas mengungkapkan kejadian-kejadian suci.
3. Memiliki tingkah laku yang bersifat eksistensial, artinya praktik-praktik dan kepercayaan religi selalu berpusat pada masalah-masalah fundamental kehidupan manusia.
4. Kehidupannya merupakan suatu sakramen. Realitas yang paling utama adalah Yang Suci (Kudus). Mereka hidup di alam semesta, berada di bawah pengaruh Yang Suci.

Mereka memiliki kerinduan yang dalam untuk tinggal dalam suatu dunia yang suci bersama Yang Suci. Oleh karena itu mereka kelihatan sangat religius.

Sifat-sifat masyarakat Nusantara sebagaimana yang telah diidentifikasi Eliade tersebut dapat menjadi landasan awal bagaimana kita sebaiknya memandang dan memahami masyarakat Pendalungan yang heterogen.

Secara garis besar proses percampuran suatu masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni asimilasi, *melting pot*, dan multikultural. Ketiga pengelompokan ini tidak pernah bersifat solid dan baku, melainkan bersifat gradual dan bahkan tidak jarang bersifat parsial. Proses interaksi budaya pada masing-masing daerah dipengaruhi berbagai hal yang khas sehingga tidak perlu menghasilkan kesimpulan yang bersifat menggeneralisir. Jikalau pada akhirnya ada pernyataan yang bernada menggeneralisir keadaan dan sifat-sifat suatu masyarakat, biasanya hal itu hanyalah suatu cara sederhana untuk mengawali pemahaman terhadap masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan hal itu, tiga model pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar atau landasan pengembangan relasi etnis adalah asimilasi, *melting pot*, dan pluralisme kultural (multikulturalisme) (Giddens, 1995). Pada pendekatan asimilasi, etnis mayoritas dan minoritas dianggap sebagai entitas yang terpisah. Demi tercapainya integrasi, etnis minoritas beserta seluruh atribut kebudayaan yang dimilikinya harus melebur ke dalam mayoritas. Ciri-ciri khas si minoritas harus direlakan untuk memudar. Sementara itu pada pendekatan *melting pot*, berbagai etnis beserta kebudayaannya bercampur-baur, melebur, dan selanjutnya menghasilkan suatu entitas kebudayaan baru. Sedangkan pada model pendekatan multikultural, berbagai keanekaragaman budaya dianggap sebagai suatu kekayaan yang

harus dipelihara dan dilestarikan. Relasi sosio-kultural yang disarankan pada model multikultural adalah pada tataran persentuhan untuk mencapai pemahaman atas keanekaragaman tersebut, bukan si mayoritas mendominasi si minoritas, apalagi si mayoritas melumat si minoritas.

Masyarakat dikatakan bersifat majemuk apabila secara struktural memiliki sub-sub yang bersifat *diverse*, yakni memiliki perbedaan secara substansial. Masyarakat seperti ini biasanya ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus bersama oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilai pada unit-unit sosial yang tercakup di dalamnya dan menjadi elemen-elemen pendukungnya. Para anggota unit-unit sosial itu menganut sistem nilainya sendiri-sendiri secara eksklusif dan kokoh dalam bentuknya yang relatif murni. Dalam situasi ini sering ditandai dengan munculnya gesekan dan konflik-konflik sosial, atau setidaknya oleh kurangnya integrasi dan kurang adanya rasa saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagiannya (Wasino, 2011).

Masyarakat plural, sebagai masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda, tentu saja rentan menghadapi berbagai benturan, perselisihan, dan ancaman perpecahan sosial. Itulah sebabnya pemerintah harus jeli dalam menentukan *platform* yang harus diterapkan dalam menangani masyarakat plural agar terhindar dari adanya kesan etnosentris, pilih kasih dan tidak adil. Di samping itu, *platform* yang tepat juga dapat menjauhkan masyarakat plural dari konflik sosial, baik konflik vertikal maupun horisontal. Oleh karena itu *platform* yang dipilih pemerintah harus bersumber pada konsensus dan nilai bersama masyarakat, dan secara simbolis maupun fungsional memiliki daya rekat sekaligus daya dorong yang kuat.

Istilah multikulturalisme sering dipersamakan dengan pluralisme. Namun sesungguhnya pengertian masyarakat plural (majemuk) cukup berbeda dengan masyarakat multikultural (keragaman budaya). Penekanan masyarakat plural adalah pada persoalan etnisitas, sedangkan pada masyarakat multikultural mencuat anggapan bahwa keanekaragaman budaya sebagai suatu aset yang harus dijaga dan dilestarikan. Pada masyarakat multikultural perspektif yang dikembangkan adalah tata sosial yang toleran serta dialektika budaya yang kreatif dan konstruktif.

Multikulturalisme berasal dari kata *multi-* (banyak) dan *kultural* (budaya), yang secara sederhana berarti keberagaman budaya. Namun demikian makna budaya yang dikandungnya memiliki cakupan luas: seluruh perangkat aktivitas manusia yang membuatnya bermakna, seperti agama, olah pemikiran, bahasa, kesenian, dan sebagainya. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang dianggap ideal karena mengakui dan merayakan perbedaan dalam kesederajatan, baik perbedaan individual maupun perbedaan kelompok berdasarkan perspektif budaya. Ideologi ini merupakan sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme atau keanekaragaman budaya berdasarkan atas perbedaan-perbedaan secara kultural sebagai sebuah corak tatanan kehidupan masyarakat (Suparlan, 2008).

Dengan cakupan yang luas dan kandungan yang beraneka nilai tersebut, multikulturalisme berpotensi menjadi ranah konflik sosial jika tidak dikelola dengan benar. Artinya, multikulturalisme adalah kekayaan yang mudah menjebak dan menjerumuskan. Oleh karena itu segenap energi multikultural masyarakat harus didorong untuk berkembang ke arah yang positif dan produktif, jangan sampai menjadi energi yang justru destruktif bahkan anarkis. Karena multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sekaligus menjadi sebuah wahana untuk

meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia (Suparlan, 2009).

Dasar teori masyarakat majemuk diletakkan oleh J.S. Furnivall berdasarkan penelitiannya mengenai masyarakat Indonesia (Jawa) dan Burma pada tahun 1948. Furnivall (1967), berdasarkan penelitiannya tersebut, secara lugas mengatakan bahwa masyarakat plural atau majemuk merujuk pada masyarakat campuran yang terdiri atas berbagai etnis. Namun konsep campuran ini terbatas dalam arti pergaulan antaretnis. Sebagai individu, masing-masing dari mereka bisa saja bertemu tapi hanya di pasar dalam konteks jual-beli. Setiap kelompok masyarakat menjalankan agama, kepercayaan, tradisi, bahasa, ideologi serta cara hidupnya sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain, namun berada di dalam suatu unit politik yang sama. Bahkan di bidang ekonomi ada pembagian kerja pada garis ras.

Di samping itu perlu menjadi catatan khusus kita, Clifford Geertz (1973) juga telah menjelaskan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terbagi atas subsistem-subsistem yang lebih kurang berdiri sendiri dan dipersatukan oleh ikatan-ikatan primordial.

Pluralisme sebagai suatu produk kesadaran sosial dan politik masyarakat membutuhkan syarat yang tidak bisa ditawar, yakni modal budaya. Jika suatu masyarakat plural di suatu daerah tidak menyadari bahwa modal budaya sungguh-sungguh diperlukan sebagai dasar pemahaman untuk menjadi pluralistik, akan banyak masalah ikutan yang muncul di belakang mereka. Otonomi daerah, misalnya, merupakan kebijakan politik yang didasarkan pada kesadaran sekaligus penghargaan terhadap pluralisme. Itulah sebabnya, jika dasar budayanya belum dikelola dan disiapkan secara memadai, maka berbagai masalah akan silih-berganti membuntuti.

Terdapat banyak tempat di dunia ini yang menjadi ajang percampuran etnis. Salah satu contoh terbaik *melting pot* adalah migrasi yang dilakukan masyarakat dari berbagai penjuru dunia menuju Amerika Serikat, yang oleh Kivisto (2014) diibaratkan sebagai magnet yang menarik para imigran dari seluruh dunia. Meskipun mereka berasal dari Amerika Latin, Karibia, atau Asia, namun kini mereka menganggap diri mereka sebagai orang Amerika. Persinggungan kultural di antara etnis-etnis yang tinggal di wilayah tersebut dapat menghasilkan nilai-nilai baru yang unik. Di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat, multikulturalisme diadopsi secara resmi dan dijadikan sebagai kebijakan pemerintah sejak tahun 1970-an. Multikulturalisme (*multiculturalism*) sebagai filosofi adalah bagian dari pergerakan pragmatisme (*pragmatism*) pada akhir abad 20 di Eropa dan Amerika Serikat, kemudian secara politik dan kebudayaan dikenal sebagai pluralisme (*pluralism*).

Di Indonesia, orang-orang Cina yang bermigrasi dari negeri Cina ke Indonesia menetap secara berkelompok di suatu tempat yang kemudian disebut Pecinan, dan orang-orang Arab juga memilih tinggal berkelompok di Kampung Arab. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka mewujudkan kehidupan dalam suatu kebudayaan yang unik, hasil percampuran antara kebudayaan yang mereka bawa dari negeri leluhurnya dengan kebudayaan masyarakat di mana mereka kini tinggal. Meskipun mereka tetap tinggal berkelompok sesama etnis, namun mereka tidak bisa menghindar dari tata pergaulan yang lebih luas, khususnya dengan masyarakat setempat.

Pada negara multietnis yang memilih fondasi ideologi demokrasi seperti Indonesia, mengembangkan kesadaran pluralisme merupakan suatu keniscayaan, alias pilihan yang tak terhindarkan. Namun hal ini bukannya tanpa masalah. Konsep demokrasi mengandaikan masyarakat sebagai suatu entitas yang

homogen dan egaliter, sementara pluralisme berangkat dari keberagaman budaya yang hidup dalam lingkungan yang demokratis tersebut. Maka wajarlah jika kemudian pluralisme menjadi sebuah isu baru dalam demokrasi, dengan fokus khusus, misalnya hak-hak warga minoritas di tengah-tengah warga mayoritas. Pada masyarakat demokratis yang telah berhasil mengembangkan sikap toleran, tujuan yang ingin mereka capai adalah posisi sosio-kultural minoritas yang sama nyamannya dengan mayoritas.

Di dalam masyarakat plural, sudah selayaknya masing-masing entitas budaya rela untuk saling membuka diri dan membongkar sekat-sekat pembatas etnisitas. Ini diperlukan dalam rangka mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai fondasi, sebagai dasar pijakan bersama untuk hidup harmonis dalam situasi berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Mereka secara perlahan-lahan harus mengarahkan orientasi nilai-nilai yang dianut pada kondisi multikultural. Itulah sebabnya mengapa problematika multikulturalisme menjadi problematika khas masyarakat majemuk. Jakarta dan Surabaya adalah contoh ideal ladang persemaian konsep multikulturalisme. Di kedua kota metropolitan ini masyarakat dari berbagai etnis dan latar kebudayaan datang bergabung untuk mencari penghidupan, dan pada akhirnya mereka harus secara bersama-sama membangun identitas kultural, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya. Dengan cara seperti itulah mereka mendeklarasikan kebersamaan.

Sebagaimana dijelaskan Abdullah (2010), dalam suatu lingkungan multi-etnis yang memiliki ekspresi etnisitas yang berbeda-beda dengan asal-usul yang berbeda-beda pasti berkembang suatu simbol universal yang dapat dikode atau dibaca, paling tidak, oleh hampir semua etnis yang dengan simbol inilah mereka dapat memelihara sistem sosial yang

terintegrasi. Simbol-simbol komunikasi yang mereka bangun bersama-sama tentu saja ditanamkan dan dipelihara dalam suatu ruang publik (*public space*) yang keberadaannya juga telah dinegosiasikan dalam serangkaian interaksi. Dalam interaksi sosial antaretnik semacam itu, simbol-simbol tersebut dapat saling dipertukarkan yang menyebabkan terjadinya penyerapan dan pengayaan ekspresi kebudayaan suatu etnis dalam lingkungan permukiman tertentu. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan tidak selalu menimbulkan konflik antaretnis dan bahkan terjadinya persinggungan atau perhimpitan antaretnis ini dapat memperkaya masing-masing pihak dengan penguasaan bahasa, pengembangan kepribadian, pengayaan wawasan, pendewasaan, dan berbagai praktik sosial yang lebih kaya dengan nilai. Dengan memperhatikan konteks semacam ini, perlu ditegaskan bahwa bukan hanya basis konflik yang patut menjadi isu penting dalam hubungan antaretnis, tetapi juga basis-basis akomodasi sosial yang memungkinkan terjadinya pembauran.

Menjaga Pluralisme dan Multikulturalisme

Masyarakat Pendalungan di Tapal Kuda adalah masyarakat multikultur yang telah mengalami proses transformasi dari masyarakat lama yang bersifat tradisional menjadi masyarakat baru yang relatif modern. Mereka telah belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi jaman. Secara sosiologis, kini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pendalungan banyak yang memilih untuk lebih menekankan peran rasionalitas serta ekonomi pasar. Dalam bidang politik, sebagian besar dari mereka berafiliasi pada parpol keagamaan, sebagian lainnya memilih parpol yang dinilai nasionalis.

Multikulturalisme telah dipraktikkan oleh masyarakat Pendalungan sejak lama, bahkan jauh sebelum memasuki era

kemerdekaan. Orang-orang dengan berbagai latar belakang datang ke kawasan Tapal Kuda dengan tujuan yang sama, yakni untuk memperoleh perbaikan hidup. Mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang sama, marabahaya yang sama, serta kesempatan yang kurang-lebih sama pula. Tidak mengherankan jika dalam kondisi yang demikian multikulturalisme diterima dan disepakati sebagai landasan bermasyarakat dan akhirnya dianggap sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan sosial di lingkungan yang multibudaya. Kondisi masyarakat yang multikultural tersebut, suka atau tidak suka, akan memberi pengaruh pada berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam membangun masyarakatnya.

Masyarakat Madura dan Jawa memiliki *cultural platform* yang sama, yakni agama Islam. Oleh karena itu di antara kedua masyarakat tersebut terdapat potensi akulturasi yang cukup tinggi. Pada tataran individu, akulturasi itu bisa terjadi pada ranah kepribadian, misalnya sikap toleran, keberanian bertindak, sopan-santun, keterbukaan, dan sebagainya. Masyarakat Jawa dan Madura akan lebih mudah berakulturasi karena mereka jelas-jelas mempunyai nilai-nilai dasar yang sama, dibanding akulturasi antara masyarakat Jawa dengan Bali atau masyarakat Madura dengan Cina.

Akulturasi, sebagai suatu proses sosial, dapat terjadi pada tataran individu karena seluruh elemen budaya pada dasarnya merupakan hasil konstruksi secara simultan antara individu dan sosial. Jika seseorang secara individual berperilaku atas dasar nilai-nilai, kepercayaan, dan norma yang disepakati bersama oleh suatu masyarakat, misalnya masyarakat Jawa, maka dia boleh dianggap sedang mengusung budaya Jawa. Demikian pula sebaliknya, jika dia tidak menunjukkan perilaku, nilai-nilai, kepercayaan, dan norma yang dianut masyarakat Jawa, maka dia tidak bisa dianggap sedang mengusung budaya Jawa.

Masyarakat multikultural biasanya memiliki media atau saluran komunikasi massa yang mencerminkan keberagaman masyarakat tersebut, misalnya program-program acara radio yang disampaikan dalam bahasa daerah. Di Jember, hampir semua radio memiliki acara berbahasa Jawa, Madura, dan Using. Di Radio Sooka ada acara “Warung 51” yang berbahasa Jawa; di RRI Program 1 Jember juga ada acara sejenis. Di Radio Suara Akbar ada acara “Mitra Jawilan”, juga berbahasa Jawa, telah berlangsung lebih dari 20 tahun.

Multikultur itu bukan sekedar penghormatan terhadap hak-hak kultural setiap kelompok masyarakat. Lebih dari itu, multikultur juga berisi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, secara bersama-sama, untuk mereduksi segala sesuatu yang dapat membahayakan atau menghancurkan keharmonisan masyarakat. Sebagai contoh, etnis keturunan Tionghoa telah berada di Indonesia secara turun-temurun, sejak jaman kolonial. Banyak di antara mereka yang sukses menjadi pengendali ekonomi di berbagai kota di Indonesia, bahkan hampir semua sektor ekonomi, mulai dari sektor produksi hingga distribusi mereka kuasai. Namun rupanya mereka kurang belajar dari sejarah, sehingga dari waktu ke waktu, dari jaman ke jaman, timbul kesan bahwa mereka kurang menyatu dengan masyarakat pribumi. Akibatnya masyarakat umum banyak yang merasa tidak suka, dan akumulasi dari ketidaksukaan itu adalah, antara lain, kerusuhan 1998 di mana etnis keturunan Tionghoa yang menjadi sasaran utama kebencian masyarakat. Etnis Cina di Indonesia hingga sekarang cenderung tetap dipandang sebagai “orang asing” atau “bukan pribumi” meskipun mereka telah turun-temurun berada di Indonesia. Hal seperti ini tidak terjadi pada etnis keturunan Arab atau India yang juga datang dari luar Indonesia. Meskipun di seluruh kawasan Tapal Kuda jumlah etnis Cina hanya kecil saja, namun seperti di tempat-tempat lain,

mereka memiliki andil cukup besar dalam proses pembentukan sosial-budaya masyarakat karena keunggulan mereka di bidang ekonomi. Tetap terbuka kemungkinan terjadi sentimen ras.

Memang secara umum selama ini tidak ada gejolak atau konflik sosial yang secara mendasar mengguncang sendi-sendi kehidupan masyarakat Pendalungan. Namun jika hal itu yang dijadikan sebagai indikator stabilitas sosio-kultural kawasan, jelas hal itu menyesatkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila semua pihak menjaga semangat multikultur secara terus-menerus. Kerukunan harus disemaikan agar tumbuh pemahaman bahwa setiap ekspresi kebudayaan memiliki nilai-guna bagi setiap pemilikinya, tidak ada ordinat atau superordinat atas satu budaya dibanding budaya lainnya. Keragaman budaya dengan demikian bisa menjadi modal sosial dan tidak ada alasan untuk saling menegasikan.

Orang Pendalungan dan Pluralisme Budaya

Pendalungan, sebuah Proses

Tafsir mengenai suatu kebudayaan, termasuk dalam hal ini budaya Pendalungan, bisa saja bersifat personal. Oleh karena itu hasilnya bisa berbeda antara satu tafsir dengan tafsir lainnya, bahkan bisa bertentangan, selama tidak mengatasnamakan masyarakat luas. Jika seseorang mengajukan sebuah tafsir dengan mengatasnamakan masyarakat, kemudian tafsir tersebut ditolak oleh salah satu elemen masyarakat yang bersangkutan, berarti tafsir tersebut bermasalah. Ini perlu saya perjelas di sini karena dalam menggambarkan budaya Pendalungan saya tidak berdiri atas nama, atas persetujuan, atau atas permintaan Pemerintah Daerah.

Ada persoalan penting yang harus saya garis bawahi ketika saya melakukan penelitian—termasuk di dalamnya upaya menafsirkan—budaya Pendalungan, yaitu adanya fakta bahwa Pendalungan sebagai suatu entitas kultural dibangun berdasarkan pluralitas budaya; ada kemungkinan tafsir yang saya hasilkan juga bersifat plural dan primordial. Demikian pula tafsir orang lain mengenai Pendalungan. Memang, masing-masing penafsir boleh saja menolak, atau setidaknya tidak membenarkan tafsir pihak lain, namun tidak boleh menyalahkan, sejauh tafsir tersebut disertai argumentasi yang memadai. Masing-masing pihak harus menerima tafsir pihak lain sebagai suatu realitas yang berbeda; dunia ini secara fisik penuh

kekurangan dan keterbatasan, namun ide, perspektif, serta pikiran manusia mampu menjangkau wilayah tanpa batas.

Harus saya akui bahwa tidak mudah menjelaskan apa yang selama ini saya konsepsikan sebagai masyarakat dan kultur Pentalungan. Meskipun kata kuncinya adalah relasi antaretnik, namun pada praktiknya hubungan antaretnik selalu bersifat kompleks, bukan sekedar penjelasan hitam-putih tentang asal-usul geografis dan genealogis masing-masing etnis. Penjelasan juga harus mencakup elemen-elemen lain yang menjadi sumber pembentukan identitas lainnya seperti kondisi lingkungan alam, agama, pendidikan, pekerjaan, dan bahkan afiliasi politik. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut Clifford Geertz sebagai *thick description* atau paparan mendalam, bukan *thin description* atau paparan sempit tanpa unsur interpretasi. Deskripsi mendalam semacam itu berguna untuk membantu siapa saja yang ingin memahami masyarakat dan kultur Pentalungan secara lebih komprehensif, lebih mendalam hingga ke akar-akarnya yang tidak tampak di permukaan.

Saya perlu membahas selintas mengenai Suku Betawi di sini sebagai contoh kasus, agar pemahaman kita terhadap proses pembentukan masyarakat Pentalungan lebih mudah dilakukan. Beberapa peneliti beranggapan bahwa masyarakat Betawi yang kita kenal saat ini berasal dari hasil percampuran antaretnis dan bangsa pada masa lalu, baik sebelum atau pada era kolonial. Secara biologis, mereka yang menyatakan dirinya sebagai orang Betawi adalah produk percampuran aneka suku dan aneka bangsa yang datang dengan kehendak sendiri atau yang sengaja didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Batavia. Shahab (1997) memperkirakan bahwa etnis Betawi baru terbentuk antara tahun 1815-1893. Sebelumnya, dalam pergaulan sehari-hari penduduk asli Jakarta mengidentifikasi dirinya sebagai orang Melayu atau menurut lokasi tempat

tinggal mereka, seperti orang Kwintang, orang Kemayoran, orang Tanahabang, dan seterusnya. Setelah tahun 1970-an, yang merupakan titik balik kebangkitan kebetawian di Jakarta, terjadilah pergeseran predikat dari Melayu ke Betawi. Orang-orang yang dulu menyebut dirinya sebagai orang Melayu akhirnya menyebut dirinya sebagai orang Betawi. Jika dilacak ke belakang, munculnya kesadaran mengenai keberadaan orang Betawi sebagai sebuah kelompok etnis dan sebagai satuan sosial dan politik, diawali pada tahun 1923 ketika Muhammad Husni Thamrin, salah satu tokoh pergerakan masyarakat Betawi, mendirikan organisasi *Pemoeda Kaoem Betawi*. Masyarakat Betawi tersadar bahwa sesungguhnya mereka merupakan sebuah suku tersendiri, yakni suku Betawi.

Pada hakekatnya, proses pembentukan masyarakat Betawi sebagai sebuah etnis tidak jauh berbeda dengan pembentukan masyarakat Pentalungan. Yuswadi (2001) menganggap konsep Pentalungan sebagai konsep lokal yang masih belum jelas maknanya secara definitif. Konsep ini digunakan untuk menunjukkan adanya percampuran budaya antaretnis, terutama etnis Jawa dan Madura di wilayah Jawa Timur, yang kemudian melahirkan proses hibridisasi budaya. Dalam hemat saya, penyebutan ‘orang Jawa’ atau ‘orang Madura’ tidak hanya merujuk pada seseorang yang berbahasa Jawa atau Madura, melainkan orang yang secara total menjadikan Jawa atau Madura sebagai fondasi identitas kultural sepanjang hidupnya.

Persoalan pemakaian istilah Pentalungan ini saya anggap penting karena secara teoritis dapat digunakan sebagai sebuah konsep untuk memahami, sekaligus menjelaskan, realitas kebudayaan masyarakat multietnis, khususnya yang berada di Jawa Timur bagian timur yang terdiri atas mayoritas etnis Madura dan Jawa. Dengan demikian masyarakat Pentalungan

adalah suatu “realitas imajiner” yang sesungguhnya dibangun dalam kerangka politik kebudayaan.

Riwayat hubungan masyarakat Jawa dan Madura telah berlangsung sejak lama. Kitab *Pararaton*³ menceritakan tentang seorang Demang Nayapati di Singasari yang bernama Banyak Wide, dengan gelar Arya Wiraraja, yang tidak disukai oleh pihak istana Singasari sehingga dijauhkan dan menjadi adipati di Sumenep (pada masa lalu disebut Songenep). Peristiwa itu terjadi setelah Raja Wisnuwardhana mangkat dan kedudukannya sebagai raja digantikan oleh putranya, yaitu Kertanegara. Selanjutnya Arya Wiraraja bersama orang-orang Madura membantu Raden Wijaya membangun Majapahit di hutan Tarik.

Beberapa prasasti, seperti prasasti Mulamalurung (1255), Piagam Kudadu (11 September 1294) dan Prasasti Sukamerta (29 Oktober 1295), menyebutkan peristiwa penting mengenai jalannya pengungsian Raden Wijaya ke Madura, kemudian bertemu dengan Arya Wiraraja di daerah perbatasan Sumenep. Arya Wiraraja menyarankan pada Raden Wijaya agar kembali ke Jawa, berpura-pura patuh, tunduk, meminta ampun, dan menghamba kepada Raja Jayakatwang; kelak jikalau sudah dipercaya, hendaknya minta diberi hutan Tarik, lalu mendirikan desa di tempat itu. Para kawula dari Madura yang akan melaksanakan penebangan hutan untuk dijadikan desa. Jumlah kawula dari Madura yang terlibat dalam proses tersebut tentunya tidak sedikit. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada akhirnya banyak warga Madura yang tersebar dan tinggal di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Sebagian dari kawasan pesisir utara Jawa Timur didiami oleh masyarakat Madura,

³ *Pararaton*, atau *Serat Pararaton*, adalah sebuah naskah mitologis yang ditulis dalam bahasa Jawa Kawi, berisi silsilah raja-raja Singasari dan Majapahit. Tidak ditemukan petunjuk siapa penulis kitab ini.

mulai dari pesisir Gresik, Surabaya, Bangil, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, hingga Banyuwangi. Bahkan di beberapa kawasan pesisir pantai selatan, seperti Jember, Lumajang, dan Malang, juga didiami masyarakat Madura, meskipun jumlahnya tidak sebanyak di kawasan pantai utara. Tempat-tempat tersebut telah menjadi kampung halaman orang-orang Madura yang pada saat ini sebagian besar sudah tidak punya lagi sangkut-paut dengan Pulau Madura atau masyarakat Madura di Pulau Madura. Bersama dengan masyarakat Jawa yang berada di wilayah tersebut, tak pelak lagi mereka telah berinteraksi secara intens dan menjadi orang-orang Pendalungan.

Faktor utama yang mendasari terwujudnya suatu masyarakat campuran, yang kemudian kita sebut sebagai masyarakat Pendalungan, adalah migrasi. Jika yang menjadi daya-tarik utama para pendatang untuk mengadu nasib di Amerika adalah pertumbuhan ekonomi negeri tersebut yang melesat begitu pesat, maka keperawanan dan kesuburan kawasan Tapal Kuda adalah magnet yang menjadi pemikat orang-orang Madura dan Jawa untuk datang dan menghuni wilayah ini. Selain itu tidak sedikit di antara mereka yang sengaja datang karena direkrut untuk dipekerjakan di perkebunan. Tentu saja masyarakat Madura dan Jawa yang berkonteks pertanianlah yang pertama-tama tertarik pada keperawanan dan kesuburan tanah. Orang-orang Jawa datang ke kawasan ini karena tersedianya lahan yang masih kosong dan subur, orang-orang Madura datang karena di tempat asal mereka tanah pertanian tidak subur, sementara di sini tanah begitu subur serta masih banyak yang kosong belum tergarap. Latar belakang yang sama tersebut mempermudah jalan menuju terjadinya percampuran budaya di antara kedua belah pihak, diperkaya oleh pihak-pihak lain yang menyertai di kemudian hari. Oleh karena itu terjadilah kemajemukan dalam kehidupan beragama,

sosial dan budaya di lingkungan baru yang didiami oleh para pendatang tersebut. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa proses integrasi kultural yang terjadi di wilayah Tapal Kuda ini adalah secara gradual dan butuh waktu lama.

Mereka itulah yang antara lain kita sebut sebagai orang-orang Pentalungan. Para pionir Pentalungan.

Dalam perspektif budaya, menurut Sutarto (2006), yang disebut masyarakat Pentalungan adalah masyarakat hibrida, yakni masyarakat berbudaya baru akibat terjadinya percampuran dua budaya dominan. Dalam konteks kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, budaya Pentalungan adalah percampuran antara dua budaya dominan, yakni budaya Jawa dan budaya Madura. Selanjutnya Sutarto menekankan bahwa dalam konteks geopolitik dan geososio-kultural, masyarakat Pentalungan merupakan bagian dari masyarakat Tapal Kuda (Sutarto, 2006). Artinya, masyarakat hibrida Jawa-Madura ada di banyak tempat, namun yang berada di kawasan Tapal Kuda sajalah yang dapat disebut sebagai masyarakat Pentalungan. Penyebutan yang berlaku secara spesifik ini lebih diniatkan sebagai upaya menandai keberadaan masyarakat multikultur di kawasan Tapal Kuda, sebagaimana kita menandai masyarakat multikultur di Jakarta yang kita sebut sebagai masyarakat Betawi.

Wahjono (2011) memiliki penjelasan yang agak berbeda. Menurutnya masyarakat Pentalungan adalah sekumpulan orang dengan latar budaya campuran Jawa-Madura, dan mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni 1) orang Jawa yang telah dibesarkan di desa-desa di pulau Madura, 2) keturunan dari perkawinan Jawa-Madura, 3) orang-orang Madura yang bermigrasi ke Jawa dengan menyeberangi selat Madura. Kelompok pertama berbicara menggunakan bahasa Madura dan bahasa Jawa secara bergantian yang pada akhirnya secara tidak sengaja melahirkan bentuk bahasa baru hasil asimilasi kedua

bahasa tersebut. Adapun kelompok kedua terbentuk secara historis sejak 1671 ketika seorang bangsawan Madura, Trunojoyo, menghadiahkan gadis-gadis Madura kepada prajurit Jawa yang bergabung dengannya untuk melawan Mangkurat I, raja yang sedang berkuasa di Mataram (1646-1677, putra Sultan Agung). Sementara itu kelompok ketiga adalah orang-orang Madura yang sekarang ini tinggal di kota-kota di wilayah Tapal Kuda. Masyarakat Pendalungan Pasuruan pada umumnya adalah orang-orang Madura yang berasal dari daerah Bangkalan, sedangkan masyarakat Pendalungan Probolinggo berasal dari daerah Sampang dan Pamekasan, dan masyarakat Pendalungan Situbondo berasal dari daerah Sumenep.

Pada diri masyarakat Pendalungan, berbagai dimensi kehidupan—baik sosial, budaya, ekonomi, religi—cenderung membentuk anyaman multikultural. Mereka tidak membangun identitas kultural dengan cara melenyapkan berbagai kekhasan kultur lokal dan etnik, melainkan justru memanfaatkan unsur-unsur lokal dan etnik sebagai kekuatan penopang. Bagi Raharjo (2006), Pendalungan tak ubahnya sebagai ‘sebuah orkestra multikultural’ yang berjalan dengan harmonis dan dinamis.

Masyarakat Pendalungan pada umumnya mewarisi watak khas Madura, yakni keras, temperamental, tangguh, pekerja keras, namun juga setia. Di kalangan masyarakat Madura dikenal istilah *cak'en kyaenah* (apa kata pak kyai), dan hal ini tetap menjadi pegangan hidup sebagian masyarakat hingga kini. Masyarakat keturunan Jawa di Jember ada yang mengikuti pandangan demikian dan mengatakan *apa jare kyaine*. Menurut Lombard (2000), agama Islam di kalangan masyarakat Madura merupakan faktor identitas yang penting dan mereka menolak perilaku kompromistis orang Jawa. Orang Madura secara umum dikenal memiliki sikap berterus-terang (terbuka, *blak-blakan*), sedangkan orang Jawa secara umum dikenal bersikap tertutup

(*mendhem jero*). Sementara itu sifat-sifat Jawa lainnya juga masuk dalam diri mereka, seperti sifat *titis*, *temen*, dan *tatag* (Wahjono, 2011). *Titis* berarti fokus, tepat sasaran, langsung pada yang dituju, serta efektif dan efisien. Dengan watak ini seseorang bisa menghindari pemborosan. *Temen* adalah sikap bersungguh-sungguh, jujur, tulus ikhlas, dan tekun. Sikap ini menjadikan seseorang dapat dipercaya. *Tatag* berarti tabah dan mantap dalam menghadapi perkara sesulit apa pun, berusaha menyelesaikannya, sekaligus berani menerima hasilnya.

Orang-orang Pandalungan mayoritas beragama Islam, namun dapat dikatakan bahwa tingkat pengamalan keislaman mereka rata-rata masih berada di tataran syariat. Mereka sangat mencita-citakan untuk bisa pergi berhaji ke Tanah Suci Makkah. Selain untuk menunaikan rukun Islam, menjadi “seorang haji” dianggap sebagai suatu pencapaian status sosial yang tinggi. Oleh karena itu mereka berjuang keras, bahkan sering kelewat keras, untuk bisa berhaji, dan setelah pulang dari Mekkah para tetangga dan handai taulan akan memanggil mereka dengan sebutan “Ji” atau “Pak/Bu Haji”.

Orang-orang Pandalungan sering menyebut dirinya sebagai masyarakat religius. Oleh karena itu mereka menjuluki daerahnya sebagai Kota Santri. Jika dilihat dari jumlah pondok pesantren, masjid, atau musholla, memang daerah Tapal Kuda mengesankan sebagai kawasan Islam. Di wilayah ini kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menemukan berbagai aktivitas keagamaan, misalnya pengajian, yasinan, tahlilan, istighasah, khataman Alqur’an, dan lain-lain. Namun realitas tersebut ternyata belum menunjukkan kesadaran sosial masyarakat yang islami. Toleransi mereka masih terhitung rendah. Maka tidak mengherankan jika kasus pencurian, pelanggaran lalu-lintas, pembuangan sampah secara sembarangan, pemakaian trotoar untuk berjualan, atau penyerobotan lahan milik negara, masih

sering terjadi. Masjid-masjid dan musholla-mushalla riuh membunyikan *loud-speaker* tanpa pandang waktu. Bahkan di kelurahan Antirogo, Jember, terdapat sebuah masjid yang di menaranya yang menjulang tinggi terpasang lebih dari 25 buah *loud-speaker*. Masyarakat yang berada di sekitar masjid atau musholla akan tinggal diam, tidak memprotes hal sensitif semacam itu, belajar ikhlas dan sabar, tapi sesungguhnya mereka selalu menggerutu secara diam-diam, sepanjang waktu, karena sering merasa terganggu.

Kasus *loud-speaker* ini memang hanya sebuah contoh kecil, namun secara makro mencerminkan keseluruhan sikap dan perilaku mayoritas orang Pendalungan. Begitu banyak anjuran moral kepada umat beragama untuk berbuat baik, menghindari segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kemungkar, baik dalam kaitannya dengan Tuhan, sesama manusia, maupun alam lingkungan. Namun sebagian besar masih berupa dogma yang tertulis, dibaca, dan dihafal, belum sampai pada tataran jiwa dan tindakan. Keharmonisan sosial hanya terjadi di lapis permukaan, belum sampai ke kedalaman. Para tokoh agama (kyai, ustadz) dan dunia pesantren ternyata hingga sekarang masih belum mampu memberi warna secara mendasar pada sisi sosio-kultural seperti itu. Mereka masih sibuk berkuat pada pengartikulasian dakwah secara verbal.

Kondisi yang ada pada kalangan elit birokrasi dan politik daerah juga sama mengenaskannya. Para pejabat pemerintah dan politikus di wilayah Pendalungan lebih suka menaruh perhatian—terkadang secara berlebihan—pada kyai atau para tokoh agama lainnya. Celaknya mereka tampak enggan menaruh perhatian pada kehidupan keagamaan masyarakat. Desakan untuk menamai Jember sebagai “Kota Santri”, “Bumi Sholawat”, serta nama-nama lain yang mewacanakan Jember sebagai “Kota Islam”, misalnya, menunjukkan bahwa kualitas

pemahaman mereka terhadap religiusitas dan ke-Islam-an masih di level formal. Jika Pemerintah Daerah mengakomodasi hal-hal semacam ini, maka agama akan terperosok karena dimanipulasi para petualang politik untuk kepentingan politik praktis mereka. Pada akhirnya, di mata masyarakat, agama dan para tokoh agama akan kehilangan dimensi spiritualitas dan religiusitasnya.

Pendalungan di Jember

Di tempat-tempat pertemuan antaretnik seperti di wilayah Tapal Kuda, termasuk Kabupaten Jember di dalamnya, sangat dimungkinkan terjadinya proses percampuran budaya, baik secara langsung—melalui perkawinan campuran antaretnik, maupun secara tidak langsung—saling terpengaruhnya elemen-elemen budaya. Dari semua upaya pembacaan dan pemahaman tentang budaya Pendalungan, kesan yang muncul paling kuat adalah perpaduan antara kultur Jawa dan Madura. Maka kata kunci untuk memahami Pendalungan adalah “percampuran” karakteristik etnis-etnis tersebut.

Secara umum, karakteristik masyarakat Pendalungan di Jember berbeda dengan masyarakat di dua kabupaten tetangga, yakni Bondowoso dan Situbondo, di mana mayoritas penduduk di kedua kabupaten tersebut adalah orang Madura. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari di kedua daerah tersebut hampir 100% bahasa Madura. Biasanya mereka yang tidak berbahasa Madura adalah para pendatang baru yang bekerja dan tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu tidak mengherankan jika di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo pengaruh budaya Madura terasa lebih dominan. Sementara itu di Jember pengguna bahasa Jawa dan bahasa Madura relatif berimbang sehingga atmosfir persentuhan budaya Jawa-Madura lebih bisa dirasakan. Pada umumnya orang-orang Pendalungan bertempat tinggal di daerah perkotaan (Sutarto, 2006). Sebagian

besar migran Jawa bermukim di wilayah Jember bagian selatan, dengan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Para migran Jawa itu berasal dari Kediri, Ponorogo, Malang, serta daerah-daerah Jawa Timur bagian barat lainnya. Bahkan di antara mereka ada juga yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Sebagian besar dari mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa Madura secara aktif, sisanya hanya menguasai bahasa Madura secara pasif.

Pada perkembangannya, Pentalungan itu bukan hanya percampuran antara dua kultur dominan Jawa dan Madura ditambah dengan kultur-kultur pendukung lainnya. Sekarang 'Indonesia' sebagai suatu entitas kultural juga turut ambil bagian dalam pembentukan masyarakat baru. Sebagian anak-anak muda, terutama di wilayah perkotaan, tidak mampu berbahasa Jawa atau Madura. Kalaupun mampu, kadarnya rendah saja. Mereka merasa lebih nyaman berbahasa Indonesia karena sejak kecil oleh orang tuanya telah terbiasa diajak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Meski demikian mereka itu tetap menjadi bagian integral kebudayaan Pentalungan.

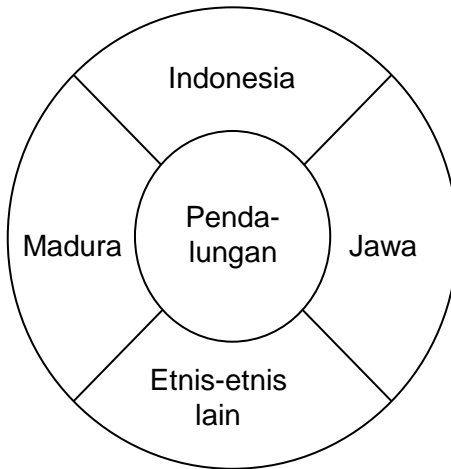
Secara ideologis sebagian besar generasi baru yang lahir di wilayah Pentalungan tidak sungguh-sungguh berafiliasi secara kuat pada kebudayaan Jawa atau Madura. Ekologi budaya Pentalungan tidak memungkinkan bagi mereka untuk tumbuh menjadi orang Jawa/Madura "yang ideal" sebagaimana biasa dipersepsikan masyarakat. Akan tetapi, kemampuan dan kecerdasan mereka sebagai manusia pada akhirnya dapat menghasilkan suatu pemikiran dan strategi bagaimana cara mengatasi keterbatasan fondasi kebudayaan tersebut, dan selanjutnya terbukti bahwa kondisi 'tidak sungguh-sungguh Jawa/Madura' tersebut merupakan sumber daya yang unik dan khas untuk masa depan kebudayaan Pentalungan. Kondisi unik yang saya gambarkan sebagai keadaan "tidak sungguh-sungguh

Jawa/Madura” seperti itu tentu saja tidak mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang baru datang dan menetap di kawasan Tapal Kuda, atau mereka yang sudah relatif lama menetap tetapi belum sungguh-sungguh merasa menjadi orang Tapal Kuda; mereka tetap merasa sebagai orang Tulungagung, Yogyakarta, atau dari mana saja mereka berasal. Atau dengan kata lain, mereka memosisikan diri mereka sebagai *the outsiders* alias orang luar. Hal semacam itulah terutama yang menjadi penyebab kegagalan mereka untuk mengerti dan mampu memahami bagaimana sesungguhnya kondisi psikologi budaya masyarakat Pentalungan.

Nilai-nilai ke-Indonesia-an akan mengisi, atau bahkan mendominasi, ruang-ruang kosong dalam diri masyarakat Jember, dan juga masyarakat Pentalungan Raya, yang diakibatkan oleh kesenjangan kultural pada diri mereka. Nilai-nilai ke-Indonesia-an itu terutama hadir secara konkrit berupa bahasa Indonesia. Pada kasus-kasus semacam ini, bahasa Indonesia menghegemoni dan terinternalisasi tanpa bisa dielakkan lagi.

Setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia berhak untuk menjadi bagian integral dari sebuah etnis. Seseorang harus menjadi warga suku Jawa, Madura, Batak, atau suku lainnya. Mengapa demikian, karena kita telah memilih *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan nasional kita, dan dengan demikian secara otomatis menjadi semboyan setiap warga negara Indonesia. Jika Si Fulan merasa dirinya bukan orang Jawa, Madura, Batak, atau bagian dari salah satu suku di Indonesia, maka sesungguhnya Si Fulan tidak menjadi bagian dari ke-*bhinnekaan*-an Indonesia. Itulah sebabnya identitas kultural, yang antara lain direpresentasikan dengan etnisitas atau kesukuan, sangat diperlukan di Indonesia.

Gambar di bawah ini memberi ilustrasi bagaimana konsep Pendalungan terbentuk di kawasan Tapal Kuda.



Gb. Pertemuan budaya-budaya pendukung Pendalungan

Secara garis besar masyarakat Jember menemukan bentuk sosio-kulturalnya melalui tiga cara, yakni asimilasi, *melting pot*, dan multikultural. Proses ini tentu saja tidak berlangsung mendadak dan serentak, tapi membutuhkan waktu yang lama dan bertahap. Ketiga konsep percampuran budaya tersebut secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Cara pertama, yakni asimilasi, merupakan pembauran dua kebudayaan atau lebih yang disertai dengan hilangnya ciri-ciri khas kebudayaan asli, digantikan dengan terbentuknya kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai dengan usaha-usaha mengurangi, atau bahkan menghilangkan sama sekali, berbagai perbedaan di antara orang-orang atau komunitas-komunitas yang berasimilasi tersebut. Cara kedua, yakni akulturasi, merupakan suatu proses sosio-kultural yang terjadi ketika suatu masyarakat beserta elemen-elemen kebudayaannya berinteraksi dengan elemen-elemen kebudayaan lain. Pada proses selanjutnya kebudayaan lain

tersebut diterima, disaring, diserap, dan diolah sedemikian rupa oleh masyarakat sehingga menjadi bagian integral dari kebudayaan masyarakat tersebut tanpa menyebabkan punahnya kebudayaan yang aslinya. Sedangkan cara ketiga, yakni multikulturalisme, merupakan perspektif atau sudut pandang terhadap suatu corak kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan, yang mendukung dan mengutamakan penghargaan serta penghormatan terhadap keberagaman hidup manusia, yang di dalamnya tercakup nilai-nilai, norma-norma, tradisi, serta segala aspek kehidupan lainnya.

Ketiga cara percampuran budaya tersebut pada masing-masing daerah dipengaruhi berbagai hal yang khas dan kontekstual. Lingkungan yang bernuansa budaya Jawa-Madura secara otomatis, dalam jangka panjang, akan membentuk masyarakat penghuninya beradaptasi pada lingkungan tersebut. Masyarakat akan terkondisi dan akhirnya memiliki habitus khas Jawa-Madura. Lingkungan yang multikultur menjadi arena dan wacana keseharian secara terus-menerus sehingga menjadikan pola pikir masyarakat Jember berbeda dengan masyarakat yang berlingkungan monokultur. Jika diamati secara seksama, perbedaan tersebut akan tampak pada seluruh aspek kehidupan mereka, baik pada pikiran, tindakan, atau apa saja yang dihasilkan oleh pikiran dan tindakan mereka.

Khusus mengenai deklarasi atau penetapan Jember sebagai Kota Pandalungan oleh Pemerintah Kabupaten Jember,⁴ saya memaknai hal itu sebagai suatu langkah dalam membaca keragaman etnik di wilayah ini, kemudian meramunya sehingga

⁴ Bupati Jember, dr. Faida, MMR., mendeklarasikan Jember sebagai Kota Pandalungan pada 14 Mei 2016 ketika membuka pelaksanaan Festival Pandalungan II yang diselenggarakan Kantor Pariwisata Jember, dibantu Rumah Budaya Pandalungan (yang didirikan pada 2 Mei 2016).

menjadi suatu kerangka konseptual untuk memahami sifat kultural masyarakat. Upaya pembacaan yang komprehensif semacam itu diperlukan dalam rangka “membawa Jember ke masa depan” melalui trek yang tepat. Tak pelak lagi, apa yang menjadi modal terpenting dalam upaya mengembangkan suatu masyarakat beserta kebudayaannya, tak talin dan tak bukan, adalah pengetahuan mendasar tentang masyarakat beserta kebudayaannya itu.

Deklarasi Jember sebagai Kota Pendalungan oleh Bupati tersebut merupakan proses penegasan identitas budaya yang memiliki konsekuensi vertikal dan horisontal. Proses semacam ini merupakan proses sosial-budaya yang cukup penting karena menjelaskan tiga hal, yakni: (1) Adanya dinamika kebudayaan di tempat itu; (2) Adanya kepedulian Pemerintah Daerah terhadap praktik berkebudayaan; dan (3) Adanya titik-tolak bagi upaya pengembangan kebudayaan daerah.

Akan tetapi, seluruh gagasan, upaya, dan selanjutnya proses (re)konstruksi dan pengembangan kebudayaan daerah dalam rangka pembangunan “manusia yang berkebudayaan” haruslah diartikulasikan dalam bentuk praksis, bukan sekedar penawaran ide-ide normatif semata. Sedahsyat apa pun gagasan yang ditawarkan tidak akan pernah berdampak nyata serta konstruktif terhadap perubahan sosial manakala berhenti pada tataran wacana belaka. Apa yang terjadi di banyak tempat selama ini adalah penciptaan wacana-wacana yang bombastis dan memikat, namun nol besar dalam pelaksanaannya di lapangan. Atau jika dilaksanakan, biasanya hanya berupa basa-basi dan seremonial saja tanpa konsep aplikatif jangka panjang.

Pada setiap upaya (re)produksi identitas kultural semacam ini akan selalu muncul resistensi di dalam diri sekelompok orang, terutama mereka yang kurang sanggup membaca dan memaknai dinamika politik kebudayaan. Akan tetapi hal itu tidak menjadi

persoalan berarti sejauh ada konsistensi Bupati dan pihak-pihak terkait dalam mewadahi berbagai bentuk ekspresi kebudayaan dan memberi keleluasaan pada seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan dialektika budaya.

Identitas Kultural Pendalungan di Jember

Identitas Kultural

Identitas secara terminologis adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh seseorang, atau sekelompok orang, yang secara signifikan membedakannya dari orang lain. Perbedaan-perbedaan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lain menjadi kata kunci bagi terciptanya suatu identitas. Dengan demikian pengertian identitas masyarakat Jember merupakan jati diri masyarakat Jember. Rumusan identitas tersebut merupakan intisari dari bertemu, bercampur, dan bepadunya faktor-faktor biologis, ideologis, psikologis, dan sosiologis masyarakat Jember. Oleh karena itu ketika berbicara tentang identitas kultural suatu masyarakat, maka yang harus tercakup di dalamnya adalah keseluruhan aspek kehidupan masyarakat tersebut. Sukimi (2004) menyebutkan bahwa suatu keunikan yang terdapat pada seseorang atau suatu masyarakat seringkali dijadikan sebagai elemen penting bagi pengenalan identitas orang atau kelompok tersebut. Ciri fisik, corak dan gaya berpakaian, pola perilaku, dan aktivitas-aktivitas budaya yang memperlihatkan keunikan sering dianggap sebagai elemen yang mencerminkan identitas. Secara positif identitas dapat memberi kebanggaan dan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Identitas juga dapat dinyatakan melalui berbagai aktivitas, terutama kesenian, karena aktivitas

berkesenian mampu menunjukkan karakter mendasar suatu masyarakat secara efektif dan otentik.

Identitas kultural selalu bersifat konstruktif. Artinya, tidak ada suatu identitas yang tumbuh secara alamiah, tanpa rekayasa ideologis, tanpa pikiran-pikiran kreatif-fungsional dan strategis yang mendasarinya. Penciptaan atau penyematan identitas kultural semacam itu digagas dan dirancang karena diperlukan untuk mempermudah upaya-upaya mobilisasi sosio-kultural secara cepat dan massal, baik vertikal maupun horisontal. Misalnya, bagaimana memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pro-kebersihan lingkungan? Pemerintah cukup mengingatkan pada masyarakat (jika mayoritas beragama Islam) bahwa “kebersihan adalah sebagian dari iman”. Memang seruan saja tidak cukup efektif karena gerakan pro-kebersihan harus bersifat total dan multidimensional, tapi hal itu diharapkan dapat menjadi kerangka dasar menguatnya kesadaran kolektif karena melalui seruan tersebut masyarakat diingatkan bahwa mereka beragama Islam dan wajib hukumnya bagi orang Islam mengupayakan kebersihan lingkungan.

Penerimaan masyarakat Jember pada nilai-nilai kultural tertentu jelas akan menuntun mereka pada praktik-praktik kultural tertentu pula dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan pada akhirnya menjadikan diri mereka terikat pada suatu identitas yang spesifik, yang dibangun di atas nilai-nilai kultural tertentu itu. Dalam memahami proses produksi identitas kebudayaan ini terdapat dua alur logika yang bisa ditelusuri. *Pertama*, model logika pasar, yakni bahwa setiap produk identitas budaya dianggap memasyarakat jika populer, dan pada puncaknya dipraktikkan oleh banyak orang. *Kedua*, model logika kualitas, yakni bahwa setiap produk identitas budaya harus dapat diukur berdasarkan kualitas, sama sekali di luar pertimbangan popularitas. Namun di atas semua itu, harus

dipahami bahwa manusia tidak akan pernah bisa berada di dua ruang kultural sekaligus. Ia harus memilih untuk berada di “sini” atau di “sana”. Tidak bisa mendua, tidak ada pula yang namanya “ruang antara”. Tempat semacam itu hanya seperti ada, tapi sesungguhnya tidak ada. Oleh karena itulah identitas kultural harus dikonstruksi, di-ada-kan, agar seseorang bisa bermukim di dalamnya. Bahwa saya, sebagai individu, telah pindah ke Jember dan telah menjadi penduduk Jember selama puluhan tahun, tidak akan mengubah sejarah hidup saya sebagai seseorang yang dilahirkan di Kediri. Namun, ketika saya memutuskan untuk bermukim di Jember, bagaimanapun juga saya harus meredefinisikan identitas kultural saya, supaya saya mempunyai “rumah budaya” tempat saya menjalani hidup dengan nyaman di kota ini. Dengan kata lain, saya berusaha untuk mencari sesuatu yang mengakar dan dapat saya jadikan sebagai sandaran budaya. Sebagaimana dikatakan Stuart Hall (1991), identitas bukanlah “suatu totalitas yang tertutup atau yang disegel”. Selalu ada momen untuk melakukan *rediscovery* atau pencarian ulang bagi akar budaya. Proses (re)teritorialisasi dan (re)definisi terhadap identitas ini, atau bahkan terhadap etnisitas, pada intinya mengacu pada apa yang diistilahkan oleh Hall sebagai “Old and New Identities, Old and New Ethnicities”.

Kebudayaan Urban di Jember

Urban culture atau budaya urban adalah kebudayaan masyarakat perkotaan, suatu gaya berpikir, bertindak, dan berperilaku yang berkaitan erat dengan persoalan modernitas. Kehidupan masyarakat urban hampir selalu diidentikkan dan juga dicampur-adukkan dengan permasalahan industrialisasi, urbanisasi, dan konsumsi. Hal ini terjadi karena aspek-aspek kehidupan dan kebutuhan hidup masyarakat urban semakin kompleks, dan gaya hidup modern yang mereka pilih akan

mengarahkan mereka untuk terus-menerus mengonsumsi aneka benda dan jasa yang mencitrakan modernitas.

Masyarakat yang berada di wilayah percampuran budaya, seperti halnya masyarakat Pendalungan, seolah-olah tampak tidak mempunyai norma dan sistem nilai kultural yang kuat. Mereka seolah-olah tidak memiliki sesuatu yang pantas untuk dijadikan sebagai penanda identitas. Terlebih jika dikaitkan dengan hadirnya semacam ekspektasi pada diri masyarakat untuk memiliki penanda identitas yang orisinal, unik, khas dan tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Seolah-olah penanda kultural suatu masyarakat itu harus etnis, tradisional, dan arkais. Jika memang harus seperti itu, jelas hal itu akan menjadi beban kultural yang berat bagi masyarakat di wilayah perkotaan dan percampuran budaya. Bertolak dari kondisi ini, adalah suatu kelaziman, bahkan akhirnya menjadi suatu keharusan, jika pada akhirnya masyarakat Pendalungan memberanikan diri untuk mencari dan menemukan apa yang bisa menjadi penanda bagi keberadaan mereka.

Dibandingkan dengan masyarakat homogen, pola relasi sosial dan sistem stratifikasi pada masyarakat Pendalungan yang heterogen cenderung bersifat lebih terbuka dan fleksibel. Kita dapat mengajukan pertanyaan penting: Dalam kondisi yang demikian itu, bagaimanakah masyarakat Jember memilih, mendefinisikan, dan mengembangkan kebudayaannya?

Masyarakat Jember, meskipun berada 200 km dari ibu kota provinsi—Surabaya, ternyata tidak luput dari keinginan untuk menjadi sebuah ruang diskursus penyemaian modernitas. Secara intens dan signifikan Pemerintah Kabupaten Jember mendorong masyarakat Jember untuk terlibat dalam diskursus modernitas tersebut. Berbagai indikator modern dihadirkan, seperti pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan berjaringan, hotel, restoran, bandara, dan sebagainya.

Oleh karena merasa tidak memiliki basis kultural tradisional yang kuat, masyarakat Pendalungan di Jember pada akhirnya lebih memilih berorientasi pada nilai-nilai budaya yang bersifat kontemporer, kekinian. Berbagai bentuk aktivitas kebudayaan yang meruang pada kekinian dianggap sebagai modern, dan sering menjadi oposisi biner bagi segala aktivitas yang berbau tradisi dan bersifat lokal. Maka, secara cepat berbagai aktivitas yang mengikuti tren global akan dianggap lebih masuk akal, bahkan lebih prestisius, dibanding yang berbau lokal. Tentu saja hal ini tidak bersifat menyeluruh, tetapi fakta mengenai hal itu dapat dengan mudah ditemukan di Jember.

Memang, pada umumnya mereka yang tinggal di daerah perkotaan menjadi lebih spontan dalam menerima unsur-unsur kebudayaan internasional yang dianggap bermanfaat dan bernilai positif. Dibanding masyarakat lain di Indonesia yang memiliki basis kultural—yang secara historis—lebih kuat, masyarakat Pendalungan memiliki akselerasi lebih tinggi dalam mengadopsi modernitas. Model-model kesenian hibrida, atau kesenian yang tidak taat pada akar tradisi, cenderung lebih dipilih dan disukai. Itulah sebabnya seni kentrung versi Kentrung Djos bisa bertahan puluhan tahun, Ketoprak Humor disambut lebih hangat ketimbang ketoprak konvensional, dan pertunjukan wayang kulit dengan ‘dalang sabet’ lebih digemari daripada dalang yang mengandalkan *antawacana*. Secara garis besar, proses produksi kultural dalam masyarakat berlangsung dengan tanpa referensi yang bersifat historis. Contoh paling aktual mengenai hal ini adalah lahirnya JFC (*Jember Fashion Carnival*), suatu produk kultural yang muncul dari kancah hibridisasi budaya masyarakat Pendalungan Jember, yang lebih mengedepankan selera global dan kekinian. Sebagian besar anak-anak muda di Kota Jember merasa cocok dan mudah menerima produk budaya semacam ini.

Terdapat kekhawatiran yang cukup mendalam di beberapa kalangan, khususnya pihak-pihak yang peduli terhadap masalah kebudayaan, bahwa dari waktu ke waktu budaya lokal secara perlahan namun pasti akan tergerus oleh budaya global. Format kehidupan masyarakat, misalnya dalam hal pekerjaan, makanan, hobi, dan lain-lain, telah terbukti meninggalkan model dan citarasa lama dan bergeser ke arah model dan citarasa global. Sebagian orang memang masih sering *ngopi* dan *marung*, tapi tidak lagi di warung-warung tradisional sederhana, melainkan di cafe atau resto cepat saji yang ditata bergaya modern. Pelaksanaan pesta *mantenan* tidak lagi dilaksanakan di terop, dengan tata laksana gaya tempo dulu, tapi diselenggarakan di hotel, atau di gedung tertentu dengan model *standing party*.

Masyarakat Pendalungan Jember, dan secara umum masyarakat Pendalungan Raya, yang dianggap tidak memiliki basis kultural tradisional kuat ini sesungguhnya memiliki masalah cukup mendasar, yakni rentan tersesat pada belantara “kebudayaan pseudo-modern”, yakni suatu situasi dan kondisi di mana masyarakat dengan rakus mengonsumsi produk-produk modern palsu, suatu produk yang tampaknya saja modern namun sesungguhnya tidak memiliki akar realitas dan kultural yang jelas, dan masyarakat buru-buru menganggapnya sebagai sesuatu yang modern. Nilai-nilai yang ditawarkan kebudayaan pseudo-modern adalah nilai-nilai yang “bebas nilai”, yang tidak memiliki implikasi ideologis dan religiusitas kuat, alias hanya bersifat permukaan dan lahiriah, seperti pusat perbelanjaan, butik, salon, toko waralaba, dan resto internasional. Hal-hal tersebut sesungguhnya bersifat ilusif dan artifisial, tidak menyumbangkan nilai unik apa pun bagi proses pembentukan identitas kultural masyarakat. Langkah selanjutnya, akibat dari mengonsumsi produk-produk ilusif dan artifisial itu mudah ditebak, yakni dengan penuh semangat dan kerelaan mereka

akan segera merekonstruksi identitas baru dengan merujuk pada produk-produk yang mereka konsumsi tersebut.

Kebudayaan pseudo-modern secara filosofis tidak identik dengan Pentalungan; justru ia berpotensi mengancam identitas kebudayaan Pentalungan. Saya sebut berpotensi mengancam karena kebudayaan pseudo-modern hanya mengusung simbol-simbol yang dangkal nilai, yang hanya memiliki makna permukaan, tidak sampai pada makna dalam dan substansial. Kebudayaan pseudo-modern menggiring masyarakat untuk mudah menanggalkan kebudayaan tradisionalnya, namun tidak mampu menyediakan jalan bagi mereka untuk sampai pada modernitas. Alhasil, kebudayaan pseudo-modern akan selalu menyesatkan siapa saja untuk menjadi gerombolan manusia ahistoris, manusia latah tanpa kepribadian kuat.

Terlepas dari rekayasa politik maupun rekayasa birokratis yang terbukti tidak menghasilkan manfaat sosio-kultural yang signifikan, hal yang menggembirakan adalah bahwa masyarakat Jawa dan Madura di Jember telah memiliki pijakan bersama, atau *common platform*, yang terbentuk dari persamaan agama yang dianut, yakni Islam. Mereka juga memiliki pengalaman persentuhan kultural dalam jangka waktu yang relatif lama, juga bertukar konsep-konsep abstrak mengenai kesatuan dan harmoni yang akhirnya menjadi pijakan hidup bersama. Tanpa pengalaman persinggungan kultural, serta tanpa upaya merawat kesatuan dan harmoni, semua itu hanya akan menjadi kata-kata rekayasa politis-birokratis belaka yang hanya bisa ditegakkan dengan paksaan. Masyarakat Pentalungan di Jember telah menunjukkan bahwa pluralisme bukan gagasan abstrak yang bersifat *given*, yang dijatuhkan begitu saja dari langit oleh seorang dewa yang sedang *nganglang jagad*. Ia lahir dari konteks historis tertentu dan harus diperjuangkan.

Pendalungan: Mencari Bentuk

Apakah kebudayaan masyarakat Pendalungan saat ini telah mewujud sebagai suatu kebudayaan yang mapan? Tentu saja belum. Saya mempunyai alat ukur sederhana untuk menilai apakah suatu masyarakat telah berada pada sebuah kemapanan budaya. Cukup dengan mengajukan sebuah pertanyaan tunggal yang sederhana: Bagaimanakah orang Jawa / Madura / Cina / Pendalungan itu sesungguhnya? Berdasarkan pertanyaan sederhana itu Anda bisa menjawab secara sederhana pula: “orang Jawa itu penyabar”, “orang Madura itu keras”, “orang Cina itu hemat”, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan orang Pendalungan? Belum ada “kata sifat” yang segera bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik orang Pendalungan; ini membuktikan bahwa kebudayaan Pendalungan masih belum mapan. Tentu saja ini hanya *stereotype*, alat ukur main-main dan tidak ilmiah.

Di tengah-tengah kebudayaan dunia yang tak henti datang menghampiri dan berseliweran di sekeliling kita melalui media, kebudayaan masyarakat Pendalungan terus berproses, berubah-ubah karena sejumlah alasan. Menurut Abdullah (2006), perubahan budaya terjadi karena beberapa sebab berikut.

Pertama, mencairnya batas-batas kebudayaan. Jika dulu kebudayaan selalu diikat oleh batas-batas fisik yang jelas, kini tidak lagi. Contohnya kebaya, sungkeman, wayang kulit, blangkon yang selalu diidentikkan dengan kebudayaan Jawa. Namun ketika kesadaran atau pola pikir manusia mengalami perubahan, mencairnya batas-batas klasik teritorial identitas, mobilisasi manusia, kecanggihan intelektualitas yang dicapai, media komunikasi yang semakin modern, masyarakat menjadi terintegrasi bukan hanya pada level lokal tetapi dunia sehingga batas-batas identitas suatu kebudayaan pun mencair dan memudar. Tradisi sungkeman pada masyarakat Jawa sebagai

simbol kepatuhan seorang anak kepada orang tua cukup diganti dengan berkomunikasi lewat telepon atau alat canggih lainnya. Dengan adanya integrasi tatanan global semacam ini, kebudayaan tidak lagi terikat pada batas-batas fisik yang kaku dan sempit, yang semula hanya disebabkan oleh ikatan ruang yang bersifat deterministik.

Kedua, adanya politik ruang dan makna budaya. Perubahan makna suatu simbol juga disebabkan oleh struktur kekuasaan yang berubah. Hal ini terjadi karena suatu kebudayaan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang di mana kebudayaan itu dibangun, dipelihara, dan dilestarikan, atau bahkan diubah. Dengan adanya kepentingan kekuasaan yang berbeda, maka ruang yang menjadi wadah tempat kebudayaan pun mengalami re-definisi sejalan dengan kepentingan baru yang tumbuh. Contohnya perubahan rancangan ruang. Dulu pusat-pusat kebudayaan memegang kendali dan suara dalam menentukan karakter suatu ruang sosial, kemudian karena perbedaan kepentingan maka terjadi definisi ulang ruang agar sesuai dengan orientasi pihak yang berkuasa. Karena itu, makna kebudayaan pun harus tunduk terhadap siapa yang mendefinisikan ulang. Simbol dan makna kebudayaan pun menjadi suatu objek yang kehadirannya dihasilkan melalui proses negosiasi sejumlah pihak yang berkepentingan.

Ketiga, ketika hegemoni kepentingan politik kekuasaan terjadi, maka secara bersamaan pemaksaan terhadap ruang dan identitas budaya pun terjadi. Masyarakat pun terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang beragam dalam memaknai ruang dan identitas budaya. Kontestasi berbagai institusi terjadi secara intensif yang menyebabkan individu-individu menjadi objek dan komoditas berbagai kepentingan yang berbeda. Mereka yang tersubordinasi pun ikut melakukan kontestasi dalam bentuk pemaknaan dekonstruktif atau pembangkangan

terhadap pendefinisian ruang dan identitas budaya yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Tarik menariknya antara pemegang kendali kuasa dengan mereka yang tersubordinasi pun menjadikan identitas kebudayaan mengalami rekonstruksi dan reproduksi yang berbeda, yang sarat kepentingan.

Dari seluruh dampak tersebut di atas, tergesernya budaya lokal oleh budaya global adalah yang paling patut diwaspadai. Kecenderungan umum yang terjadi pada media elektronik, khususnya televisi, adalah munculnya “gerakan” pemarjinalan bentuk-bentuk budaya lokal. Bagi para kreator, seharusnya ketegangan antara yang global dan lokal ini menjadi inspirasi dalam memproduksi kreasi-krasinya. Dalam ketegangan tersebut ada ruang kreatif maha luas yang disediakan, yakni sesuatu yang kita sebut sebagai budaya hibrida, menggabungkan dua elemen yang berbeda, bahkan mungkin berlawanan, dengan tetap mempertahankan karakter dasar keduanya.

Terjadinya konflik dalam suatu proses kebudayaan memang sering tak terhindarkan. Meskipun begitu, dalam pandangan Abdullah (2006), tanpa adanya konflik kepentingan sulit dibayangkan lahirnya suatu kesadaran tentang perubahan yang sistematis menuju suatu sistem sosial yang lebih berkembang. Karena itu Abdullah menegaskan bahwa upaya memahami kebudayaan harus dimulai dengan mendefinisikan ulang kebudayaan tersebut, bukan sebagai kebudayaan generik yang merupakan pedoman turun-temurun, tetapi harus dijadikan sebagai kebudayaan diferensial (yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial). Kebudayaan bukanlah suatu warisan yang secara turun-temurun dipraktikkan secara kolektif, tetapi menjadi kebudayaan yang lebih bersifat situasional yang keberadaannya tergantung pada karakter kekuasaan dan juga hubungan-hubungan yang berubah dari waktu ke waktu. Usaha merajut kebudayaan berlangsung dalam suatu ruang yang penuh

dengan kepentingan berbagai pihak yang turut ambil bagian dalam proses tersebut.

Jember Kampung Halaman Pendalungan

Di bulan Agustus, ketika HUT kemerdekaan Indonesia diperingati, biasanya dimeriahkan dengan berbagai lomba, karnaval, atau kirab budaya. Sebagian dari para peserta pada acara tersebut, khususnya karnaval, memilih mengenakan pakaian daerah. Ada yang memakai pakaian adat Jawa ada juga yang memakai pakaian adat Madura. Eksistensi dua pendukung kebudayaan tersebut akan langsung tercermin pada pakaian yang mereka kenakan. Artinya, sebagian besar masyarakat Jember yang beretnis Madura tetap mengidentifikasi dirinya sebagai orang Madura. Orang-orang Jember yang beretnis Jawa juga demikian. Namun mereka sudah tidak merasa memiliki ikatan emosional yang berlebihan dengan “Pulau Madura” atau “Tanah Jawa” tempat orang tua atau nenek moyang mereka dilahirkan. Mereka kini justru lebih terikat pada tanah di mana mereka melahirkan anak-anak mereka. Biasanya yang masih memiliki ikatan kuat dengan Pulau Madura atau Jawa *kulonon* adalah para pendatang yang tidak dilahirkan di Jember.

Diaspora Madura, baik di wilayah Tapal Kuda maupun di daerah-daerah lain di Indonesia, identik dengan budaya yang melekat pada orang Madura sebagai migran, yakni bagaimana mempertahankan eksistensinya di antara etnis lainnya serta bagaimana orang lain yang berinteraksi dengan mereka dapat memahami dan memaknai keberadaannya sebagai etnis Madura. Memang nyaris tidak mungkin masyarakat pendatang itu dapat sepenuhnya melepaskan diri atau memutus hubungan begitu saja dengan daerah asal mereka. Tetapi akan tampak kemudian, terutama di Jember, bahwa lambat-laun mereka bukan lagi orang Kediri yang tinggal di Jember atau orang Pamekasan yang

menetap di Jember, melainkan telah bertransformasi sebagai ‘orang Jember yang berasal dari Kediri’ atau ‘orang Jember yang berasal dari Pamekasan’. Inilah proses re-identifikasi identitas, di mana identitas itu, menurut Hall (1991), tidak pernah komplis atau sempurna, atau tidak pernah akan berakhir. Atau dengan kata lain, identitas akan selalu berada dalam proses formasi. Identitas berarti proses identifikasi di mana struktur identifikasi tersebut selalu dikonstruksikan melalui ambivalensi, seperti antara *us* dan *other*, atau ‘kita’ dan ‘mereka’. *Other* juga ada dalam diri kita, dalam arti *other* juga merupakan bagian dari proses identifikasi identitas kita sendiri karena kita melihat *other* dalam pandangan diri kita. Diri kita juga dilihat dalam pandangan *other*.

Masyarakat Pendalungan di Jember cenderung tidak lagi melakukan pembedaan antara “yang lokal” dan “pendatang” karena sesungguhnya tidak pernah ada interpretasi yang mencukupi di antara keduanya. Masyarakat lebih cenderung melihat pada ranah manakah pertarungan identitas mungkin terbangun sebagai suatu bentuk strategi untuk dapat memenangkan pertarungan identitas karena identitas dibangun atas dasar dialektika yang intens antara “yang lokal” dan “pendatang”. Hal demikian itu menandakan bahwa masyarakat Pendalungan di Jember lebih terbuka terhadap perolehan pengalaman baru, lebih berani menerima berbagai resiko, dan memiliki empati lebih besar, meskipun di sisi lain cenderung lebih berwatak individualistis.

Di pusat dan pinggiran kota, perpaduan dan adaptasi budaya Jawa-Madura memang terjadi, meskipun pada akhirnya tetap berorientasi pada budaya Jawa (Raharjo, 2006). Menurut Raharjo, contoh paling jelas atas interaksi antara Madura dan Jawa tersebut adalah lahirnya bahasa Jawa dialek Jember. Tetapi apakah “bahasa Jemberan” itu memang benar-benar ada, dan

pantas disebut sebagai bahasa Jawa dialek Jember, masih perlu kajian dan pembuktian lebih lanjut.

Berdasarkan pengalaman saya pribadi yang telah tinggal di Jember selama tiga puluh lima tahun, saya melihat bahwa antara budaya Jawa dan Madura dapat dikontraskan secara total, baik tentang pandangan hidup, bahasa, perilaku, etika, selera, maupun produk-produk keseniannya. Namun di wilayah Pendalungan ini kedua entitas tersebut tidak mudah untuk dipisahkan karena secara kultural telah terjadi jalinan yang saling mengisi dan menguatkan. Jember bukan hanya Jawa, bukan hanya Madura, melainkan campuran kedua etnis tersebut ditambah lagi dengan etnis-etnis lain. Yang dimaksud dengan percampuran di sini tidak terbatas secara biologis melainkan juga kultural. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa Jember merupakan wilayah multikultur yang selama ini telah berhasil secara intens mempraktikkan dan akan selalu membutuhkan landasan multikulturalisme dalam kehidupan sehari-harinya.

Raharjo (2006) menangkap adanya proses subordinasi terhadap budaya Madura oleh budaya Jawa, meskipun kondisi tersebut tampak berlangsung secara alamiah. Dengan kata lain budaya Jawa berposisi sebagai ordinat, sedangkan etnis Madura sebagai subordinat yang berusaha untuk beradaptasi, lalu ‘menjadi Jawa’ secara kultural. Inilah yang selanjutnya memunculkan apa yang disebut sebagai Pendalungan, yakni ketika orang Madura dalam bersosialisasi dan beradaptasi dengan masyarakat Jawa secara evolutif menjadi ‘Jawa Pendhalungan’. Namun lebih lanjut Raharjo menekankan bahwa secara historis maupun sosio-kultural interaksi dan komunikasi beragam etnislah—tidak hanya Jawa dan Madura—yang telah menciptakan kondisi kultural masyarakat Pendalungan. Ada etnis Tionghoa, Arab dan Using, meskipun secara kuantitas mereka minoritas. Artinya, dalam pemahaman Raharjo tersebut,

Pendalungan merupakan proses interaksi dan komunikasi di antara beragam etnis yang berakar pada peran sosial dan atraksi kultural masing-masing yang kemudian menghasilkan budaya hibrida. Hibridasi dalam konteks ini tidak hanya membicarakan proses perpaduan antara bermacam budaya yang menghasilkan budaya baru. Hibridasi yang terjadi di wilayah Pendalungan merupakan hibridasi struktural dan hibridasi kultural.

Dalam pandangan saya, di sini subordinasi kultural sebagaimana yang dimaksudkan Raharjo tersebut di atas tidak sungguh-sungguh terjadi. Walaupun terjadi, sifatnya hanya kasuistik dan kadarnya rendah saja. Bahwa di antara masyarakat Jawa dan Madura, juga dengan etnis-etnis lain, terjadi dialektika budaya, memang benar. Tapi bukan kebudayaan Jawa dan Madura berhadapan-hadapan sebagai dua kontestan yang memperebutkan piala kemenangan. Ini adalah persoalan multikulturalisme, bukan persoalan etnisitas. Adalah hal yang wajar jika dalam suatu wilayah yang pluralistik seperti Jember, atau wilayah Tapal Kuda lainnya, secara terus-menerus terjadi negosiasi dan bahkan kompetisi pengaruh dalam upaya memproduksi identitas kultural Pendalungan. Namun sejauh ini antara etnis Jawa dan Madura masing-masing memiliki kekuatan dan daya tawar yang relatif berimbang, tidak ada upaya eksplisit untuk saling memperkecil, menghapus, atau mengalahkan. Dengan kata lain, tidak ada dominasi suatu etnis terhadap etnis lainnya. Blum (1991) meletakkan konsep multikulturalisme berhadapan-hadapan secara diametral dengan rasisme. Dalam hal ini Blum memahami rasisme sebagai *“the domination or victimization of some groups by others, and with the notion of the subordinate groups as inferior or less worthy than the dominant group.”* Di Jember, atau secara lebih luas di kawasan Tapal Kuda, hal itu tidak terjadi.

Di dalam masyarakat plural seperti di Jember, masing-masing entitas budaya harus rela saling membongkar dan membuka diri ketika mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk hidup bersama dalam situasi berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Kesadaran masyarakat Jember sebagai masyarakat plural, yang di dalamnya terdiri atas berbagai etnis dan kultur, dapat tumbuh dan berkembang karena mereka secara *de facto* berada dalam situasi plural dalam jangka waktu relatif lama. Maka tidak mengherankan jika perspektif kultural mereka secara alamiah mengarah pada pluralisme dan multikulturalisme. Terjadi di Jember sejak lama: Orang Jawa bisa menikmati sate Madura atau rujak Madura, sementara orang Madura bisa menikmati sate Ponorogo atau pecel Madiun. Wujud sederhana pluralisme budaya konsumen.

Menelisik Asal Kata Pendalungan

Pendalungan, sebuah Eksonim

Pendalungan adalah istilah yang disematkan oleh pihak lain kepada masyarakat yang hidup di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Hal semacam itu sering kita jumpai di berbagai tempat, dan disebut dengan *eksonim* atau nama/sebutan untuk suatu tempat/masyarakat yang diberikan oleh pihak lain. Lawan katanya adalah *endonim* atau *otonim*, yang berarti nama/sebutan yang diberikan untuk diri sendiri. Sebutan Wong Using untuk orang-orang asli Banyuwangi juga eksonim, sedangkan sebutan Wong Tengger untuk orang-orang yang mendiami kawasan Pegunungan Tengger adalah endonim. Penamaan terhadap suatu masyarakat semacam ini penting dilakukan dalam rangka menandai keberadaan masyarakat tersebut, sekaligus dalam rangka memahami mereka, baik untuk kepentingan akademis maupun non-akademis. Pemberian nama atau sebutan terhadap suatu masyarakat biasanya dilakukan karena tidak adanya sebuah penanda yang dianggap khas atau otentik secara internal.

Terkait dengan penamaan terhadap masyarakat Tapal Kuda tersebut, selama ini berseliweran pertanyaan mendasar: Apa makna kata Pendalungan? (Pertanyaan lain tentang siapa yang memberi sebutan tersebut dan sejak kapan nama itu digunakan, telah saya uraikan pada bab terdahulu.)

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1985), secara etimologis konsep Pendalungan berasal dari kata *dalung* yang

berarti “dulang besar dari logam”. Senada dengan penjelasan tersebut, Prawiroatmodjo (1981) dalam *Bausastra Jawa-Indonesia II* menjelaskan bahwa konsep pendalungan berasal dari kosa kata Bahasa Jawa *dhalung* yang berarti “periuk besar”. Sehubungan dengan penggunaan *dalung* atau *dhalung* yang berarti “periuk besar” tersebut, Yuswadi (2001) menekankan bahwa “ini adalah sebuah metafora untuk menggambarkan keberadaan suatu wilayah yang menampung beragam kelompok etnik dengan latar belakang budaya berbeda, yang kemudian melahirkan proses hibridisasi budaya”.

Ketika mengartikan istilah Pendalungan, Sutarto (2006) dan Raharjo (2006) dalam tulisan mereka juga menggunakan kamus *Bausastra Jawa – Indonesia* (1981) sebagai dasar. Di dalam kamus tersebut, kata Pendalungan juga mengandung arti ‘berbicara/berkata dengan tiada tentu adabnya/sopan-santunnya’. Dalam konteks realitas masyarakat dan kebudayaan di kawasan Tapal Kuda, menurut Sutarto (2006), definisi itu bisa berarti bahwa bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat adalah bahasa yang kasar (*ngoko*) atau bahasa yang struktur gramatiknya belum mapan. Sementara itu Raharjo (2006) juga menjelaskan bahwa secara etimologis kata Pendalungan berasal dari dasar Bahasa Jawa *dhalung* yang berarti “periuk besar”. Dalam konsep simbolik, “periuk besar” bisa didefinisikan sebagai tempat bertemunya bermacam masyarakat yang berbeda etnis dan kebudayaan, kemudian saling berinteraksi dalam ruang dan waktu sehingga melahirkan suatu varian baru kebudayaan yang disebut Pendalungan.

Metafora “periuk besar” sebagai tempat bertemunya bermacam masyarakat dan kebudayaan ini, dalam pandangan saya, hingga saat ini masih cukup relevan untuk digunakan dalam rangka menjelaskan keberadaan masyarakat Pendalungan Jember maupun Pendalungan Raya..

Pendalungan, Definisi Kamus

Dalam kamus *Javanese English Dictionary* (Robson dan Wibisono, 2002) tercantum dua makna yang berasal dari kata **mendhalung** atau **mendhalungan**, yaitu:

- 1) *of mix blood*, dan
- 2) *confused (esp in applying the rules of speech level)*.

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) hanya diberikan penjelasan mengenai:

dalung/da•lung/ n 1 dulang besar dibuat dari logam (perak); 2 Jw lampu besar dibuat dari logam (tembaga) dipakai pada pertunjukan wayang kulit; belencong

sementara itu *Kamus Bahasa Jawa (online)* yang disusun oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bekerja sama dengan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas Dikpora DIY mencantumkan beberapa kata yang berhubungan dengan pendalungan.

mendhalungan [məṇḍalujaŋ] kn: 1 engg. pranakan campuran. 2 pc. guneman ora karuan unggah-ungguh; kc. gendhalung.

gendhalungan [gəṇḍalujaŋ] kn: guneman tanpa tata-krama (ora trep enggoné nganggo unggah ungguhing basa).

dhalung [ḍaluŋ] engg. kn. 1 kendhil gedhe, blencong.

bendhalungan [bəṇḍalujaŋ] engg. kn; guneman kang ora bener enggoné ngetrapaké unggah-ungguh.

Sementara itu dalam *Baoesastra Djawa*, sebuah kamus bahasa Jawa yang disusun Poerwadarminta (1939), yang selama ini sering menjadi rujukan utama suatu pembahasan yang

berkaitan dengan terminologi berbahasa Jawa, tercantum kata *pendhalungan*, dengan penjelasan sebagai berikut.

pendhalungan

: kn. ak. gunêman ora karuwan unggah-ungguhe.

Dalam kamus yang disusun Poerwadarminta tersebut, kosakata *pendhalungan* digolongkan sebagai kata yang ‘kn’ (*kramangoko*; berdasarkan levelnya) dan ‘ak’ (*arang kanggone*; jarang dipergunakan). Perlu digarisbawahi di sini bahwa hampir semua kamus tersebut di atas, kecuali yang disusun Poerwadarminta, tidak memiliki *entry* beserta penjelasan yang memadai mengenai kata *pandhalungan*, *pandalungan*, *pendhalungan*, *pendalungan*, *padalungan*, maupun *pedalungan*. Yang bisa ditemukan adalah penjelasan mengenai *dhalung/dalung*. Sementara itu kata *mendhalungan* muncul dalam *Serat Centhini*. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa kata ‘pendalungan’ merupakan kosa kata yang secara khas muncul berdasarkan pengucapan orang-orang di wilayah Tapal Kuda. Masyarakat Jawa Tengah atau Jawa Mataraman tidak mengenal kata tersebut dalam penggunaan sehari-hari; yang mereka kenal adalah kata *dhalung*, *mendhalungan*, *gendhalungan*, atau *bendhalungan*.

Mêndhalungan dalam Serat Centhini

Kata *mêndhalungan* telah tercantum dalam *Serat Centhini*, tepatnya pada jilid ke-6, halaman 92, *pupuh* ke-85.⁵

Pamurunge pan têtung prêkawis
dhingin wani wanuh asêmbrana
tan mituhu ing wêkase
ambadalakên wuwus

⁵ Sumber yang saya rujuk adalah *Pustaka Centhini: Ikhtisar Seluruh Isinya* oleh Adisasmita (1979).

asring-asring anyêmpaluki
basane mênthalungan
diksura dhahulu
nganggo atine priyangga
kang mangkono tan winahyu bangsa inggil
andhap sêsaminira

Berikutnya kata *mênthalungan* digunakan lagi dalam jilid ke-9 halaman 292, *pupuh* ke-19.

Jayèngraga gumujêng jro galih
ngunandika e lah iki beka
anukup wong turu ijèn
têmbunge dene aku
mênthalungan tan wasis ing ling
kêburu karêpira
layak durung tau
linge gêrok pêgat-pêgat

Pada kedua *pupuh* tersebut kata *mênthalungan* memiliki arti sebagaimana yang dijabarkan dalam sejumlah kamus bahasa Jawa, yakni berkaitan dengan seseorang yang dianggap “tidak cakap berbahasa Jawa dengan baik, tanpa mengenal tatakrama,” dan hal seperti itu dianggap sebagai “tidak tergolong priyayi, melainkan masuk golongan masyarakat rendah.”

Serat Centhini ini harus kita posisikan sebagai sumber penting untuk memperoleh gambaran sekaligus pemahaman yang lebih memadai mengenai penggunaan kata *mênthalungan* secara praktis. Buku ini adalah salah satu karya besar dari khasanah kesusastraan Jawa, ditulis dalam bahasa dan tulisan Jawa, berbentuk tembang *Macapat*. Tembang khas Jawa ini terdiri atas beberapa jenis lagu yang memiliki irama tertentu, jumlah suku kata tertentu, serta akhir kata tertentu pula pada setiap baris dan baitnya. Masing-masing tembang menghasilkan

efek suasana tersendiri yang ingin ditimbulkan. *Serat Centhini* selesai ditulis pada tahun 1814, dengan judul asli *Serat Suluk Tambangraras*. Pemrakarsa proyek penulisan serat ini adalah KGPA Anom Amengkunagoro III, putera Pakubuwono IV (raja Surakarta yang memerintah pada tahun 1788-1820). Selanjutnya KGPA Anom Amengkunagoro III menggantikan ayahandanya sebaga raja, dengan gelar Pakubuwono V (memerintah pada tahun 1820-1823). Tim penyusun *Serat Centhini* terdiri atas beberapa orang, yakni Ki Ng. Ranggasutrasna dan R. Ng. Yasadipura II, keduanya adalah pujangga kerajaan, beserta sejumlah nama lainnya.

Serat Centhini lengkapnya terdiri atas 12 jilid, seluruhnya berjumlah lebih dari 3500 halaman. Buku ini sering dianggap sebagai “Ensiklopedia Kebudayaan Jawa” karena berisi berbagai pengetahuan, tata-cara, adat istiadat, legenda, cerita, dan berbagai hal lainnya yang beredar di kalangan masyarakat Jawa pada sekitar abad ke-16-17. Isi *Serat Centhini* mencakup berbagai sisi kebudayaan Jawa. Pokok ceritanya adalah kisah pelarian dua putra dan satu putri dari Sunan Giri III (Giri Parapen) ketika ditaklukkan oleh Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1636. Putra pertama bernama Jayengresmi yang diiringi dua santri Gathak dan Gathuk. Dia berpisah dengan kedua adiknya, Jayengsari dan Niken Rancangkapti, yang diiringi oleh santri Buras. Kisah perjalanan melarikan diri inilah yang direkam, di mana sang tokoh menemukan banyak peristiwa serta bertemu dengan berbagai tokoh di seluruh Jawa yang menceritakan berbagai cerita, legenda, adat istiadat dan berbagai ilmu. Buku ini juga dilengkapi dengan kisah perjalanan Mas Cebolang, seorang santri yang nantinya akan menjadi suami Niken Rancangkapti dan berganti nama menjadi Syech Agungrimang. Kisah perjalanan para tokoh cerita dalam rangka mencari kesempurnaan hidup sebagai orang Islam.

Serat Centhini terus-menerus dikutip dan dipelajari oleh para peneliti Indonesia dan asing. Buku ini dipuji oleh Denys Lombard sebagai salah satu karya agung kesusastraan dunia yang terlahir di Jawa. Elizabeth D. Inandiak melakukan penulisan kembali *Serat Centhini* dalam bentuk prosa liris, dalam bahasa Perancis (2002), dan selanjutnya karya yang berbahasa Perancis tersebut diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia (2008).

Pendalungan, Definisi Masyarakat

Di beberapa tempat di Jawa Tengah dan kawasan Mataraman, Jawa Timur, masyarakat sering menggunakan kata ‘mendalungan’ untuk menyebut jenis bebek pedaging hibrida hasil kawin silang. Jika bebek sawah (lokal) betina dikawinkan dengan bebek Persia jantan, hasilnya adalah bebek *tiktok*. Jika bebek sawah (lokal) jantan dikawinkan dengan bebek Persia betina, hasilnya bebek mendalungan.

Kata ‘mendalungan’ juga digunakan untuk menyebut salah satu jenis dalang wayang kulit, berdasarkan karakter pribadi serta fungsi sosial yang diembannya. Menurut Safari (2010) terdapat sepuluh jenis dalang wayang kulit, salah satunya adalah ‘dalang mendalungan’. Definisi dalang mendalungan adalah *asal laris ditanggap akeh rabine ora ngurus panjak* (yang penting laris, banyak penanggap, suka kawin, tidak suka mengurus para pemusiknya).

Padmodiwirio (2011:124) dalam sebuah memoar yang ditulisnya juga menggunakan kata ‘mendalungan’ secara spesifik, yakni ketika bercerita tentang seorang kawannya yang berasal dari Jawa Timur: “Soegiarto tertawa bebas, lalu memakimaki (ia seorang mendalungan Besoeki Jatim).” Kutipan dialog dari memoar tersebut menegaskan bahwa yang patut mendapat sebutan mendalungan adalah orang Jawa Timur bagian timur

(Besoeki), dan mereka menunjukkan sifat ekstrovert (tertawa bebas dan memaki-maki).⁶

Bagong Pujiono (dalam Hadi, 2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep dan Penerapan Mendhalungan dalam Pertunjukan Wayang Golek Kebumen” menjelaskan konsep mendhalungan sebagai suatu kreasi campur dalam tokoh pewayangan Wayang Golek di Kebumen. Mendhalungan merupakan ekspresi totalitas dalang dalam pertunjukan Wayang Golek Kebumen yang di dalamnya terdapat unsur *pilah*, *pilih*, dan *polah* serta *gathuk*, *runtut*, *jebles*, *manjing*, dan *cucut* sebagai elemen estetikanya. Konsep mendhalungan, dalam pengertian ini, terletak pada unsur *catur* (bertutur). Melalui kemampuan dalam mempraktikkan *catur*, seorang dalang akan mampu melukiskan kejadian pada adegan dan sosok karakter tokoh wayang yang dimainkannya. Hal ini akan memunculkan kesan “hidup” dalam alam riil penonton. Artinya, kemampuan *catur* dalang mampu menghadirkan realitas kejadian dalam imajinasi penikmat wayang. Ketiga unsur tersebut menjadi luluh dalam satu kesatuan yang utuh dalam pertunjukan wayang golek Kebumen yang berkualitas dan menarik bagi penonton. Kedua, mendhalungan sebagai sebuah konsep estetika *garap catur* yang dalam penerapannya memiliki unsur-unsur *pilah*, *pilih*, dan *polah*. *Pilah* adalah kemampuan seorang dalang dalam membedakan karakter tokoh wayang. *Pilih* adalah kemampuan dalang dalam memilih dan menentukan kosa kata sesuai dengan bahasa pedalangan yang disajikan ke dalam *janturan*, *kocapan*, dan *ginem*. Sedangkan *polah* adalah kemampuan seorang dalang dalam mengekspresikan *pilah* dan *pilih* dalam pakeliran,

⁶ Raden Suhario Padmodiwirio bin Raden Kusnendar Padmodiwirio, atau kerap disapa Hario Kecik, adalah seorang veteran pejuang dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal dengan jabatan Pangdam IX Mulawarman.

sehingga melahirkan suatu sajian pertunjukan wayang golek Kebumen yang berkualitas.

Konstantinos Retsikas (dalam Prasisko, 2016 dan Hadi, 2016), berdasarkan penelitiannya di Alas Niser, Probolinggo, menemukan bahwa kata *pedalungan* berasal atau terbentuk dari rangkaian kata *medal* (bahasa Jawa *krama*, yang berarti keluar, pergi, merantau atau meninggalkan) dan *lunga* (bahasa Jawa *ngoko*, yang berarti berangkat, pergi atau keluar). Istilah tersebut diperuntukkan bagi orang asli Madura yang tinggal dan menetap di luar pulau Madura, khususnya di Jawa bagian timur. Sebutan ini menurut Retsikas disematkan oleh orang Jawa yang tinggal di Surabaya dan Yogyakarta.

Saya menganggap penjabaran Retsikas mengenai kata *pedalungan* tersebut cukup problematis. Istilah itu sangat ganjil jika diucapkan oleh orang Jawa dengan cara menggabungkan dua kata yang berasal dari tataran bahasa atau *level of speech* yang berbeda. Penggabungan dua kata *medal* (dari level *krama*/tinggi) dan *lunga* (dari level *ngoko*/rendah) adalah tidak masuk akal. Jika orang Jawa menggabungkan kedua kata tersebut, hasilnya adalah *medalkesah* (medasah) atau *metulunga* (metulung). Jadi, *pedalungan* yang berasal dari *medal* dan *lunga* ini hanyalah hasil kerja *othak-athik gathuk*, alias mencari-cari arti yang pas dengan cara menghubungkan-hubungkan sesuatu agar tampak sesuai. Dalam penggunaan bahasa Jawa, ada tradisi *kerata basa* atau *jarwa dhosok*, yakni upaya memahami makna suatu kata berdasarkan asal-usul (suku) kata, atau penjabaran (*jarwa*) secara singkat (*dhosok*). Misalnya kata *dhalang* memiliki arti ‘ngudhal piwulang’ (menjabarkan ajaran), *selasa* berarti ‘sela-selane mangsa’ (waktu yang paling kosong), *desember* berarti ‘gedhe-gedhene sumber’ (sumber air paling besar); *guru* berarti seseorang yang harus ‘digugu lan ditiru’ (dipercaya dan dicontoh).

Yuswadi (2005) mendefinisikan kata Pendalungan sebagai (1) sebuah percampuran antara budaya Jawa dan Madura dan (2) masyarakat Madura yang lahir di wilayah Jawa dan beradaptasi dengan budaya Jawa. Sementara itu sebagian masyarakat secara sederhana mengartikan “orang Pendalungan” sebagai “hasil perkawinan antarsuku/ras”. Ilustrasi yang diambil dari hasil penelitian Kusnadi (dalam Raharjo, 2006) berikut ini dapat memperjelas hal itu: ... Pak Mangun (51 tahun), adalah warga Desa Tegal Boto, Jember. Dia dilahirkan di Panaongan, Sumenep Utara, Madura. Ketika bermigrasi dan bekerja di Jember, dia menikah dengan seorang perempuan Tegal Boto yang disebutnya sebagai orang Jawa. Ketika peneliti bertanya tentang siapa saja yang bisa disebut sebagai orang Pendalungan, Pak Mangun menjawab, “Saya ini kan orang Madura. Isteri saya orang Jawa. Dari perkawinan tersebut, saya dikaruniai 2 anak perempuan. Nah, 2 anak saya itu yang bisa disebut sebagai orang Pendalungan”. Pak Komari (47 tahun), seorang nelayan yang tinggal di kampung Payangan, Watu Ulo, ketika saya wawancarai mengaku dirinya sebagai seorang Pendalungan karena ayahnya beretnis Jawa dan ibunya beretnis Madura.

Pak Mahawan, 56 tahun, mantan wartawan dan karyawan pabrik gula di Jember, memiliki pemahaman yang sama dengan Pak Mangun dan Pak Komari, bahwa orang Pendalungan adalah seseorang yang lahir dari perkawinan antara orang Jawa dan orang Madura. Adapun Mbah H. Husni (98 tahun), sesepuh para nelayan di kampung Payangan, beranggapan bahwa orang Pendalungan tidak harus keturunan Jawa-Madura. “Ayah saya asli orang Mandar, ibu saya orang Sumenep, Madura, dan saya ini adalah orang Pendalungan,” ujar Mbah Husni. Sementara itu Pak Joko Tri, 52 tahun, seorang guru SMP di Jember, memiliki pengertian yang agak berbeda. Menurutnya, orang Pendalungan adalah seseorang yang lahir dari perkawinan campuran antara

orang Jawa atau Madura dengan orang Eropa, misalnya orang Belanda, Inggris, atau Portugis.

Uraian yang disampaikan berdasarkan wawancara di atas memperlihatkan bahwa pemaknaan istilah Pendalungan di kalangan masyarakat cukup bervariasi. Namun ada suatu kesamaan dalam berbagai pendapat yang berbeda tersebut (kecuali pendapat Retsikas), yakni anggapan atau pemahaman tentang Pendalungan sebagai ‘produk suatu percampuran etnis’.

Pendalungan, sebuah Perspektif

Franz Boas (1989), seorang pencetus pemikiran antropologi modern, menyatakan bahwa “Bila kita benar-benar bermaksud memahami pemikiran manusia, maka seluruh analisa pengalaman harus berdasarkan pada konsep mereka dan bukannya konsep kita.”

Dalam kaitannya dengan penentuan kata mana yang lebih tepat untuk digunakan, apakah kata *pedalungan*, *pendalungan*, *pendhalungan*, *pandalungan*, ataukah *pandhalungan*, saya menganggap bahwa adanya perbedaan dalam penggunaan kata tersebut adalah wajar dan biasa. Pada masyarakat yang berbasis kelisanan, hal semacam itu sering terjadi. Namun dalam persepsi saya, merujuk pada gagasan Franz Boas, kata ***Pendalungan*** adalah yang lebih tepat untuk digunakan. Kata Pendalungan memiliki kesamaan secara lisan maupun tulisan. Sejak dulu masyarakat di wilayah Tapal Kuda, mulai dari Pasuruan hingga Banyuwangi menggunakan kata tersebut, setidaknya secara lisan. Berdasarkan perspektif emik (*native's point of view*), apabila kita ingin memahami suatu masyarakat maka kita harus menggunakan sudut pandang masyarakat tersebut. Ini berbeda dengan pendekatan etik (*scientist's point of view*) yang menganalisa suatu gejala sosial berdasarkan pandangan pihak lain di luar masyarakat yang dianalisa. Studi emik ini, di bidang

kebudayaan, lebih komprehensif dalam menjelaskan fenomena sosio-kultural suatu masyarakat dengan asumsi bahwa pelaku atau aktor suatu tindakan lebih tahu tentang proses-proses yang terjadi dalam dirinya daripada orang lain, dan pengetahuan mengenai proses mental tersebut diperlukan dalam rangka memahami mengapa seseorang atau suatu masyarakat melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Pelto, 1970; Foster dan Anderson, 1978; Harris, 1988). Dikotomi emik-etik dalam antropologi diperkenalkan oleh Marvin Harris (1988). Mula-mula seorang ahli bahasa, Kenneth Lee Pike, yang membangun istilah emik dan etik berdasarkan perbedaan dalam linguistik antara fonetik dan fonemik. Masing-masing merujuk kepada keterkaitan secara objektif antara ‘bunyi’ di satu pihak dan ‘makna suatu bunyi’ di pihak lain. Dalam pengertian sederhana, emik mengacu pada pandangan warga masyarakat yang dikaji, sedangkan etik mengacu pada pandangan si peneliti.

Pengucapan suku kata ‘da’ dalam kata ‘pendalungan’ sama dengan ‘da’ dalam kata ‘pendakian’ atau ‘pendahuluan’ dalam bahasa Indonesia. Jika dalam ejaan bahasa Jawa suku kata dengan bunyi seperti itu ditulis dengan ‘dha’, sementara dalam bahasa Indonesia cukup dengan ‘da’. Dengan demikian penggunaan kata pendalungan adalah dalam perspektif masyarakat Tapal Kuda, sekaligus sesuai dengan kaidah tulis bahasa Indonesia. Jika kita menggunakan kata pendhalungan atau pandhalungan, kaidah yang digunakan adalah kaidah bahasa Jawa/Madura, dan hal itu terkesan Jawa/Madura sentris. Namun demikian perlu dicatat, pemilihan kata *pendalungan* tersebut, khususnya dalam penulisan buku ini, tidak saya maksudkan sebagai bentuk penegasian penggunaan (khususnya secara tertulis) kata *pandhalungan* dan lain-lain. Dalam konteks tertentu, seseorang bisa menggunakan suatu istilah sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun ditulis dan diucapkan secara

berbeda, nama/kata *Jawa*, *Jowo*, atau *Java* merujuk pada substansi yang sama. Perbedaan itu terletak pada konteks penggunaan, bukan makna.

Orang Pendalungan Berkesenian

Identitas kultural masyarakat Pendalungan secara otomatis melekat pada berbagai aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan, termasuk aktivitas berkesenian. Meskipun pada tataran tertentu masyarakat Jawa dan Madura di wilayah Tapal Kuda memilih mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing, namun karena mereka menghadapi situasi sosial serta kondisi alam yang sama, maka timbullah perasaan senasib-sepenanggungan. Hal yang demikian itu memudahkan terjadinya akulturasi budaya di antara mereka. Terlebih lagi keberadaan mereka di tempat baru tersebut dengan maksud memperbaiki tingkat kehidupan, bukan untuk menyebarluaskan kebudayaan asli dari daerah mereka. Seni pertunjukan yang mereka bawa dan kembangkan, misalnya, tidak dalam rangka mempertahankan identitas kultural melainkan untuk mengisi dan melengkapi kehidupan mereka di daerah baru tersebut.

Pernyataan Sutarto (2006) bahwa masyarakat Pendalungan tidak memiliki akar kesenian, budaya, dan tradisi yang kuat, tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Masyarakat Pendalungan adalah masyarakat campuran berbagai etnis, oleh karena itu pada etnis-etnis itulah akar seni budaya Pendalungan harus dicari. Sebaliknya jika kita berniat menemukan seni budaya yang manakah yang bisa dikategorikan sebagai produk seni budaya Pendalungan, dengan menggunakan asumsi dasar “seni

yang asli / tidak asli”, maka kita tidak akan berhasil menemukan apa pun karena asumsi dasar kita keliru.

Lantas, seperti apakah kesenian Pendalungan itu?

Memang cukup sulit menentukannya. Sebagian orang bahkan beranggapan bahwa masyarakat Pendalungan tidak memiliki kesenian. Pendalungan, sebagaimana telah saya sebut di atas, adalah produk dari suatu percampuran etnis dan budaya budaya, maka wajar jika keseniannya juga bersifat campuran. Ada kesenian Jawa, Madura, Banyuwangi, Arab, Cina, kontemporer, dan sebagainya. Ciptaan baru yang berbasis gado-gado juga ada. Sejumlah kesenian yang saya anggap khas dan merepresentasikan Pendalungan adalah seni Janger Banyuwangi, Singo Ulung (Bondowoso) / Can-macanan Kaddhuk (Jember), Kentrung Trio Noor (Bondowoso), Patrol (Jember), Lengger (Jember), Danglung (Lumajang). dan Kentrung Djos.

Meskipun masyarakat Pendalungan relatif terbuka terhadap masuknya nilai-nilai asing dan baru, terutama yang bersumber pada *urban culture*, namun Sutarto (2006) menengarai bahwa tipe kebudayaan orang Pendalungan adalah kebudayaan agraris-egaliter. Penanda simbolik yang tampak jelas dari tipe kebudayaan ini, menurut Sutarto, terdapat pada berbagai seni pertunjukan yang digeluti dan penggunaan bahasa sehari-hari yang secara dominan menggunakan ragam bahasa kasar (*ngoko*) dan bahasa campuran (dua bahasa daerah atau lebih).

Walau pada kenyataannya masyarakat Pendalungan adalah masyarakat multikultur, namun batas-batas kultural antaretnis masyarakat Pendalungan relatif tipis sehingga berbagai eksperimen penciptaan seni mendapat ruang apresiasi yang lebih luas. Adalah para seniman Banyuwangi yang cukup memahami posisi mereka sebagai anggota masyarakat seperti ini. Alex Jokomulyo, misalnya, bisa dijadikan sebagai salah satu contoh konkrit. Koreografer tari kenamaan dari Kabupaten Banyuwangi

ini menciptakan sebuah tari yang dia beri judul *Perawan Pandalungan*. Melalui tari ciptaannya tersebut Alex bercerita tentang anak hasil perkawinan antaretnis (antara Jawa-Madura, Jawa-Using, atau Madura-Using). Karena dalam proses penciptaan tari tersebut Alex dipengaruhi oleh kondisi multikultural masyarakat di wilayah Tapal Kuda, maka Alex sengaja memasukkan unsur-unsur gerak tari Madura, Jawa, dan Ponorogo, yang selanjutnya dipadukan dengan estetika tari Gandrung sebagai dasarnya. Alex juga memasukkan elemen-elemen musik Madura, Jawa, dan Ponorogo untuk memperkaya gamelan Banyuwangen yang digunakannya dalam berkreasi. Melalui karya tarinya *Perawan Pandalungan* ini Alex hendak menegaskan pandangannya bahwa Banyuwangi bukan hanya milik masyarakat Using, tetapi juga milik masyarakat-masyarakat lain yang hidup di sana, dan mereka harus saling menghormati dalam hal perbedaan kultural (Setiawan dan Subahianto, 2016).

Peta Kesenian Pandalungan

Dipandang dari segi kebudayaan, daerah Tapal Kuda merupakan titik temu berbagai macam pengaruh kebudayaan, baik kebudayaan Madura, Jawa, Bali, maupun dari kebudayaan asing seperti Cina, Arab, dan Eropa. Unsur-unsur pengaruh ini tampak jelas pada cabang-cabang budaya dalam pengertian sempit yang berkembang di kawasan ini, terutama pada bentuk kesenian seperti seni bangun, seni ukir, seni suara, seni tari dan khususnya seni pertunjukan rakyat (Winarni, 2012).

Hampir semua jenis kesenian yang berkembang di daerah Tapal Kuda juga tersebar di daerah-daerah kebudayaan lainnya di Jawa Timur. Namun perbedaan karakter dan semangat dalam berproseslah yang pada akhirnya membawa masyarakat Pandalungan menuju suatu proses kreatif baru. Sebagaimana

disinyalir oleh Sutarto (2006), orang Pendalungan bersifat sangat adaptif dan akomodatif sehingga perubahan-perubahan besar yang melanda dunia ditangkap dengan mudah dan bahkan ditiru. Sifat terbuka semacam itulah yang agaknya menjadikan kesenian masyarakat Pendalungan tidak hanya berupa karya-karya tradisional yang mereka warisi dari para leluhur, tetapi juga berbagai genre kesenian yang datang dari luar.

Peta persebaran kesenian masyarakat Pendalungan, ditilik dari orientasi kulturalnya, dapat dipilah ke dalam dua kategori, yaitu (1) kesenian Pendalungan tradisional yang merupakan ekspresi rakyat dalam berkesenian dengan materi estetika yang diwarisi dari nenek-moyang, dan (2) kesenian Pendalungan jenis kontemporer yang banyak dipengaruhi oleh tata nilai dan tradisi kreativitas masyarakat Barat. Sedangkan berdasarkan proses penciptaannya juga dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu (1) kesenian yang diciptakan orang Pendalungan, bisa mengacu pada seni tradisional, bisa pula pada seni kontemporer, dan (2) kesenian yang dimainkan oleh orang Pendalungan; bisa seni tradisional, bisa pula seni kontemporer.

Peta persebaran kesenian Pendalungan dalam perspektif kontemporer dan tradisional ini meliputi seluruh kota dan kabupaten Pendalungan Raya di kawasan Tapal Kuda, meskipun dengan kecenderungan yang bervariasi. Dua gejala kesenian tersebut, baik yang kontemporer maupun tradisional, seringkali berkembang secara mandiri dan kadang-kadang saja bertemu di suatu titik. Artinya, keberanian kreatif untuk menggabungkan unsur-unsur seni tradisional dan kontemporer tidak dimiliki oleh banyak seniman di Tapal Kuda. Keberanian dan konsistensi untuk secara kreatif melakukan penggabungan unsur-unsur seni tradisional-kontemporer itu, misalnya, dapat kita temukan pada kesenian Campursari. Walaupun kesenian ini bukan produk seni khas Pendalungan, namun di beberapa tempat di kawasan Tapal

Kuda terdapat beberapa kelompok seni Campursari yang mampu bertahan, berkembang, dan menemukan penikmat setianya. Sebagai contoh, di Jember terdapat sebuah kelompok musik jenis ini, yang bernama Campursari Gonjing Miring, yang telah berkarya secara konsisten selama hampir dua dasa warsa. Di Banyuwangi terdapat sebuah genre musik rakyat yang disebut Kendang Kempul, dengan instrumen utama sesuai dengan namanya, yakni kendang (jenis khas Banyuwangi) dan kempul. Namun pada perkembangan selanjutnya kesenian ini cenderung bertransformasi menjadi musik dangdut-pop/rock daerah dan semakin kehilangan ruh tradisionalnya.

Para seniman di kawasan Tapal Kuda hingga kini terus berupaya menggali dan berinovasi untuk menemukan produk-produk kesenian yang berkarakter khas Pendalungan. Pemkot Probolinggo, misalnya, terus memfasilitasi upaya penggalan potensi kesenian lokal antara lain melalui pergelaran kesenian Pendalungan dalam rangkaian acara ‘Semipro’ (Seminggu di Probolinggo). Pemkab Jember melakukan hal yang sama melalui Festival Pandhalungan yang sudah berlangsung sejak tahun 2015. Sementara itu Pemkab Lumajang berusaha melestarikan musik Danglung melalui penyelenggaraan festival musik Danglung. Seni musik Danglung ini diklaim sebagai kesenian khas Lumajang dan diyakini telah ada sejak era kuno ketika wilayah Lumajang masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Bagi banyak daerah, memiliki produk seni yang berkarakter khas lokal dan memiliki ciri-ciri setempat merupakan impian yang harus diwujudkan.

Secara umum, masing-masing Pemerintah Daerah telah berperan penting dalam upaya pengembangan sosio-kultural masyarakat setempat. Tetapi, dan inilah kelemahan mendasar aparat pemerintah di Indonesia, mereka masih bertindak sebatas kerangka kerja formal belaka. Model pendekatan yang dipilih

dan diterapkan tetap model struktural yang kaku, tidak efektif, dan kurang menyentuh akar permasalahan. Pola kerja sama dengan elemen-elemen masyarakat, misalnya dengan para seniman dan peneliti, lebih bersifat insidental karena melulu bergantung pada program basa-basi dan besarnya pendanaan. Akibatnya, ketika dana tersedia maka program akan berjalan, namun bila tidak ada dana maka program akan terbengkalai.

Kesenian Pandalungan

Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 1994). Manusia berkesenian karena ingin mengekspresikan gagasan-gagasannya secara estetis pada orang lain. Demikian pula dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Pandalungan. Namun aktivitas berkesenian tersebut tidak selalu dilakukan secara spesifik atau semata-mata dalam rangka gelar seni, melainkan sering menyatu dengan berbagai aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Pada kasus yang demikian, kesenian telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu produk-produk kesenian tersebut, khususnya karya seni tradisional, dapat dijadikan sebagai penanda kultural masyarakat pemilikinya.

Berbagai produk kesenian tradisional yang berkembang di wilayah pendalungan secara garis besar mencerminkan kultur yang mendukung identitas budaya masyarakat Pandalungan. Itulah sebabnya mengapa di wilayah ini dengan mudah kita temukan kesenian-kesenian Jawa, Madura, Using, Arab, Cina, dan lain-lain. Namun demikian, karena wilayah Pandalungan adalah wilayah pertemuan budaya, maka sebagian kesenian yang ada telah mengakomodasi berbagai pengaruh kesenian lain dan dalam beberapa hal menjadi berbeda dengan kesenian asal. Lagi pula masyarakat Pandalungan tergolong masyarakat yang adaptif, tidak segan-segan menerima, menyerap, dan kemudian

mengolah berbagai pengaruh luar sehingga memunculkan seni percampuran. Selanjutnya, semangat mereka yang bergelora dalam mengekspresikan nilai-nilai estetis mendorong terjadinya invensi dan modifikasi kesenian.

Namun demikian tidak jarang akan kita temukan suatu produk kesenian yang tidak jelas akar budayanya, tidak jelas pula sumber rujukannya, tiba-tiba muncul dan berkembang begitu saja di kalangan masyarakat. Salah satu contoh mutakhir kasus ini adalah munculnya sebuah kreativitas masyarakat Jember dan sekitarnya yang disebut *Mini-sound*. Ini adalah fenomena baru yang merebak di Jember dalam dua tahun terakhir. Sekelompok orang (berkisar antara 10 hingga 20 orang; ada kelompok anak-anak, kelompok remaja, bahkan kelompok ibu-ibu) *nge-dance* atau menari dengan gerakan yang kompak sembari diiringi musik berirama rancak yang diputar melalui *sound-system* kecil, diletakkan di atas rak beroda sehingga bisa dengan mudah dipindah ke mana-mana. *Sound-system* kecil, atau *mini-sound* menurut sebutan mereka, itulah yang akhirnya menjadi nama bagi genre seni tari berkelompok tersebut. Sebuah grup *Mini-sound* dianggap sukses dan terkenal bila sering diundang oleh berbagai kalangan untuk mempergelarkan kemahirannya, misalnya dalam acara ulang tahun. Mereka juga tampil pada acara karnaval yang diselenggarakan oleh desa atau kecamatan. Sayang sekali kreativitas semacam ini, meskipun saat ini cukup populer, biasanya tidak mampu bertahan lama.

Masyarakat Pendalungan adalah masyarakat merdeka, tidak mengacu pada pusat kebudayaan tertentu, sehingga masing-masing daerah menjadi pusat kebudayaan bagi dirinya sendiri. Jika daerah-daerah pewaris kebudayaan mapan tampak bergerak secara linear, setia sebagai ahli waris seni budaya yang diturunkan kepadanya, masyarakat Pendalungan justru berani bebas berimprovisasi, tidak hanya bergerak lurus ke depan tapi

juga ke kanan-kiri. Semangat berkebudayaan mereka adalah, terutama, menciptakan produk-produk kultural baru yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan jaman, demi peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Inilah sesungguhnya etos intelektual mereka dalam menjadikan diri mereka warga masyarakat modern, dan dengan demikian pada akhirnya tuntutan yang ditujukan terhadap masyarakat Pendalungan untuk menghadirkan lokalitas kebudayaan menjadi tidak relevan lagi.

Masyarakat Pendalungan adalah masyarakat yang mampu belajar dengan cepat untuk menjadi modern, dan dalam banyak hal lebih suka berorientasi pada nilai-nilai budaya dan peradaban masa kini. Pada umumnya masyarakat Pendalungan yang tinggal di daerah perkotaanlah yang memiliki akselerasi tinggi terhadap gerak jaman dan modernitas. Oleh karena itu mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk memenuhi kriteria mental sebagaimana dipersyaratkan masyarakat modern di seluruh dunia, yakni (1) Berpola pikir serta pola perilaku rasional yang diwujudkan dengan kemampuan menghargai karya orang lain, menghargai waktu, menghargai kualitas, berpikir kreatif, efisien, produktif, percaya pada diri sendiri, disiplin, dan bertanggung jawab, dan (2) Memiliki sifat relatif terbuka, yaitu mau mempertimbangkan dan bahkan menerima pandangan serta gagasan orang lain.

Kesenian Tradisional

Karena orang Madura identik dengan Islam, maka tidak mengherankan jika mereka tidak cukup produktif di bidang seni pertunjukan, sebagaimana Islam tidak memberi ruang dan perhatian cukup besar terhadap seni pertunjukan. Sebagian dari mereka berkesenian sejauh kesenian tersebut dianggap “Islami”. Di kawasan Tapal Kuda, masyarakat keturunan Madura cenderung tetap memilih untuk memainkan seni-seni tradisi

khas Madura. Kesenian tradisional yang berkembang di Bondowoso adalah Singo Ulung dan Wayang Kerte, di Jember Can-macanan Kaddhuk dan Musik Patrol, sementara itu Hadrah dan Terbangun berkembang di pondok-pondok pesantren yang tersebar cukup merata di semua wilayah. Banyaknya pesantren di Tapal Kuda pada akhirnya turut memberi warna santri pada kesenian-kesenian yang berkembang.

Di kalangan etnis Madura, dalam hal pengembangan seni pertunjukan, di samping terjadi proses penerjemahan konsep kesenian berbahasa Jawa menjadi berbahasa Madura, juga terjadi keterlibatan lintas etnis dalam kesenian Tionghoa dan Arab tanpa mengubah format pertunjukan maupun bahasanya. Dalam kesenian Barongsai dan Liang liong di Jember, misalnya, sebagian anggota berasal dari etnis Madura maupun Jawa. Begitu pula yang terjadi dengan seni Gambus (Arab), Kendang Kempul dan Janger (Using), terdapat keterlibatan etnik Madura dan Jawa (Raharjo, 2006).

Di kawasan Tapal Kuda, salah satu jenis musik yang persebarannya cukup luas adalah musik kentongan. Di Jember disebut dengan Musik Patrol. Musik ini sesungguhnya adalah musik tradisional khas masyarakat Madura di Pulau Madura, namun dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Pendalungan dan selanjutnya berkembang dengan kekhasan masing-masing daerah. Selain di Jember, Musik Kentongan juga berkembang di daerah-daerah lain di Tapal Kuda, yakni di Probolinggo, Situbondo, Pasuruan, Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi. Jika perangkat musik patrol di beberapa daerah dibuat dari bambu, di Jember bahannya dari kayu, terutama kayu nangka. Jenis dan variasi pukulannya pun berbeda.

Musik Patrol berkembang cukup baik di Jember dan hingga kini masih mendapat tempat di hati masyarakat. Instrumen musik yang digunakan terdiri atas sejumlah kentongan kayu

dengan ukuran bervariasi, dari yang kecil hingga besar. Masing-masing kentongan mempunyai nama, misalnya *kenthir*, *kenthar*, *ting-tung*, serta kentongan besar yang berfungsi sebagai bas. Instrumen tambahan yang umum digunakan berupa kendang, remo, tamborin, rebana dan seruling (di Madura alat musik tiup yang digunakan adalah sronen). Sejumlah grup Musik Patrol menambahkan instrumen *electone* dan bas listrik. Para mahasiswa Universitas Jember secara rutin pada bulan Ramadhan menyelenggarakan festival tahunan musik patrol sejak tahun 2000. Acara tersebut biasanya dimulai pada pukul 21 hingga pukul 3 dini hari, disaksikan oleh masyarakat dengan antusiasme cukup tinggi. Musik rakyat ini biasanya dimainkan oleh kelompok-kelompok remaja pada malam hari di bulan Ramadhan sambil berkeliling kampung, baik untuk ronda siskamling maupun sekedar untuk membangunkan warga menjelang sahur.

Di Jember, warga masyarakat keturunan etnis Jawa yang menempati wilayah selatan Jember (seperti Ambulu, Wuluhan, Balung, Puger, Gumukmas, Kencong, Jombang, Umbulsari, dan Semboro) sampai saat ini masih mempraktikkan produk budaya Jawa baik dalam hal bahasa, kesenian, maupun adat-istiadat lainnya. Masyarakat keturunan Jawa di Ambulu dan Wuluhan, misalnya, sampai saat ini masih melestarikan kesenian Reyog yang berasal dari tradisi nenek moyangnya di Ponorogo. Selain itu, sebagian masyarakat di selatan juga menggemari Wayang Kulit, Jaranan, dan Campursari.

Sementara itu di wilayah bagian utara, hingga saat ini masyarakat tetap bertahan pada orientasi budaya Madura. Bahasa Madura merupakan bahasa komunikasi sehari-hari bagi sebagian besar warga masyarakat di Kecamatan Arjasa, Jelbug, Sukowono, Kalisat, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang, dan Pakusari. Di samping Ludruk ala Madura, masyarakat di sana

gemar melihat pertunjukan Hadrah sebagai kesenian pesantren yang menjadi orientasi pendidikan etnis Madura. Pengajian juga menjadi acara favorit mereka karena di samping mendapatkan wejangan-wejangan tentang ajaran Islam, mereka juga bisa bertemu dengan para Lora (sebutan untuk kyai) ataupun Gus (anak kyai) yang dianggap bisa mendatangkan berkah bagi kehidupan warga (Raharjo, 2006).

Wayang Topeng khas gaya Madura dahulu cukup banyak penggemarnya, berkembang subur di beberapa kabupaten, yakni Bandowoso, Panarukan, Kraksaan, Jember dan Lumajang. Namun sekarang keberadaan kesenian berbahasa Madura ini semakin langka dan sulit ditemukan. Di daerah Bondowoso, Panarukan, dan Kraksaan, yang penduduknya sebagian besar orang Madura, pertunjukan Wayang Topeng masih cukup digemari. Dulu di daerah Jember dan Lumajang, yang sebagian penduduknya etnis Jawa, pertunjukan Wayang Topeng gaya Jawa juga dapat dijumpai. Selain pertunjukan Wayang Topeng dengan membawakan cerita, ada juga pertunjukan yang hanya berupa tari-tarian dengan pemain mengenakan topeng dan irigan musik sronen. Di Jember, kesenian jenis ini sudah tidak dapat dijumpai lagi. Seni Macapat Madura juga termasuk kesenian yang digemari masyarakat Madura dan masih ada hingga saat ini, meskipun semakin jarang. Kebiasaan masyarakat Madura membaca Macapat adalah pengaruh Jawa. Kebiasaan *mele'an* (tidak tidur semalam suntuk) atau yang di Jawa disebut macapatan untuk *lek-lekan*, seperti pada waktu ada kelahiran bayi, hajat perkawinan dan sebagainya adalah umum dalam masyarakat Madura (Winarni, 2012).

Di kota Jember, jenis kesenian yang ada lebih beragam, baik yang berasal dari khasanah kebudayaan Jawa, Madura, maupun etnis-etnis lain. Salah satunya adalah Lenggger, sejenis tarian rakyat yang mirip dengan Tayub. Kesenian Lenggger

merupakan kesenian yang cukup digemari masyarakat Jember tempo dulu. Di Kota Probolinggo dan di Jawa Tengah ada juga kesenian dengan nama Lengger, tetapi cukup berbeda dengan yang ada di Jember. Di Kecamatan Mangunharjo, Probolinggo, pertunjukan Lengger lebih mendekati pertunjukan Tayub yang hingga sekarang masih banyak terdapat di Nganjuk dan Tuban; di Jawa Tengah, tari Lengger dimainkan oleh seorang penari laki-laki (mengenakan topeng) dan seorang penari perempuan. Pertunjukan dibagi menjadi beberapa babak, setiap babak berlangsung sekitar 10 menit. Kesenian ini masih sering dipergelarkan di beberapa tempat di Jawa Tengah, misalnya di Banyumas dan Wonosobo, ditampilkan pada acara hajatan, hari besar, penyambutan tamu daerah, atau acara festival budaya. Sementara itu tari Lengger Jember adalah kesenian *mbarang*, atau mengamen. Pada saat ini kesenian tari Lengger Jember semakin redup dan terancam punah. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an masih sering ada pertunjukan Lengger di halaman Stasiun Jember atau di sudut Pasar Tanjung. Tari Lengger Jember ini konon dahulu menjadi bagian dari ritual kesuburan. Artinya, pertunjukan diselenggarakan dalam kaitannya dengan ungkapan harapan dan rasa syukur para petani. Kemungkinan kesenian ini dulu dibawa oleh para pendatang yang berasal dari Jawa Tengah, kemudian bercampur dengan warna lokal. Musik pengiring, kostum, dan gerak tari, misalnya, didominasi oleh gaya Jawa Timuran.

Beberapa jenis kesenian lainnya yang memiliki akar tradisi dan masih dapat ditemukan, bahkan beberapa di antaranya berkembang dengan cukup baik, di wilayah Pedalungan adalah sebagai berikut.

- **Jaran Kencak.** Kesenian ini masih hidup di Jember dan Lumajang, menampilkan atraksi berupa seekor kuda yang telah dilatih untuk berjalan dengan langkah-langkah berirama

layaknya sedang menari. Kesenian ini sekarang bahkan diangkat sebagai ikon budaya Lumajang.

- **Hadrah/Terbangan.** Kesenian bernafaskan Islam, dengan iringan dasar seperangkat alat musik rebana/terbang, ini masih cukup mudah ditemukan di seluruh wilayah Tapal Kuda terutama di pondok-pondok pesantren..
- **Ludruk.** Teater rakyat ini berkembang dengan baik di Kabupaten Jember.
- **Janger.** Teater rakyat khas Banyuwangi ini terutama berkembang di Kabupaten Banyuwangi, namun juga dapat ditemukan di Kabupaten Jember. Teater rakyat ini dulu bahkan berkembang hingga ke daerah Malang.
- **Mamacah/Macapat.** Seni membaca cerita, dilagukan. Di Jember disebut Mamacah, berbahasa Madura, sedangkan di Banyuwangi disebut Macapat, berbahasa Jawa.
- **Pencak Silat.** Seni beladiri yang ditampilkan dengan diiringi kendang dan jidor.

Masih terdapat sederet panjang nama-nama kesenian yang hingga kini dipraktikkan masyarakat Pendalungan. Mereka tidak terlalu peduli dari mana kesenian itu berasal, namun mereka lebih mempertimbangkan apakah kesenian-kesenian tersebut cukup relevan bagi mereka. kesenian lain yang masih bisa ditemukan adalah Glepang, Jaranan, Jaran Bodhak, Kenong Telo', Glundengan, dan sebagainya. Bahkan masih di daerah Jember masih bisa ditemukan kesenian Kotheakan Lesung yang langka dan nyaris punah.

Upaya Menciptakan Kesenian khas

Tidak mudah bagi siapa pun untuk menciptakan suatu produk kesenian yang dapat diterima masyarakat secara luas, dan pada gilirannya menjadi 'tradisional'. Tari Lahbako, misalnya, meskipun telah berumur lebih dari 30 tahun sejak

diciptakan, hingga kini oleh masyarakat Jember belum bisa diterima secara “ikhlas” sebagai tari khas daerah.

Tari Lahbako adalah tari yang diciptakan untuk menjadi tari tradisional khas Jember. Tari ini menggambarkan para perempuan yang sedang sibuk mengolah daun tembakau. Kata ‘lahbako’ merupakan akronim dari ‘olah tembakau’. Pencipta tari ini adalah Bagong Kussudiardja, seorang pencipta tari kenamaan dari Yogyakarta. Proses penciptaan tari, yang dilakukan pada tahun 1983, ini diprakarsai oleh Bupati Jember Suryadi Setyawan yang merasa prihatin karena pada waktu itu Jember tidak memiliki tari khas daerah. Sumber ide penciptaan adalah masyarakat Jember yang sebagian besar merupakan petani tembakau. Sejak jaman kolonial Belanda, Jember memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbaik dan terbesar di Indonesia. Tari Lahbako biasanya ditarikan secara berkelompok, sedikitnya 4 orang penari perempuan, menggambarkan aktivitas para perempuan yang bersama-sama berangkat menuju ke kebun, memetik daun tembakau, kemudian membawanya pulang dan mengolahnya. Musik pengiring tari Lahbako adalah Musik Patrol. Tari ini cukup sering dipentaskan di Jember, mungkin karena sanggar-sanggar tari yang sedikit jumlahnya di Jember tidak memiliki banyak pilihan jenis tari. Sangat berbeda dengan masyarakat Banyuwangi yang kekayaan tari-tarian daerahnya berlimpah-ruah. Pementasan tari Lahbako biasanya dilakukan pada acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, misalnya untuk menyambut tamu daerah dan festival budaya.

Upaya kreatif Pemerintah Daerah maupun sanggar-sanggar seni untuk mengisi kekosongan karya seni khas daerah, atau untuk memperkaya yang sudah ada, cukup sering dilakukan di berbagai tempat. Namun ternyata upaya semacam itu tidak selalu membawa hasil menggembirakan. Selain karena faktor

sumberdaya seniman yang kurang memadai, juga karena sistem pengelolaan dan pemasaran produk seni yang tidak jalan. Oleh karena itu perlu ada paradigma baru dan strategi khusus yang diterapkan agar terjadi pertemuan antara produsen dan konsumen seni budaya.

Pengembangan Kesenian

Posisi berbagai kesenian rakyat di tanah air, termasuk di wilayah Tapal Kuda, saat ini semakin terpinggirkan karena kurang mampu bersaing dengan aneka produk budaya dari luar yang membanjiri seluruh pelosok negeri melalui media massa, khususnya televisi. Aneka produk kesenian dari luar tersebut pada akhirnya lebih populer daripada kesenian rakyat karena mendapat dukungan penuh dari media massa. Tampak bahwa kesenian rakyat tidak memiliki daya tahan yang memadai dalam menghadapi dinamika perkembangan jaman. Melalui media massa, dan juga Internet, masyarakat pun semakin bebas menentukan pilihan hiburan apa saja berdasarkan seleranya. Secara internal, para seniman tradisional kurang mampu mengembangkan diri sehingga secara estetis pertunjukan mereka kurang berdaya saing ketika berhadapan dengan seni pertunjukan kontemporer, dan proses pewarisan seni oleh pelaku kesenian rakyat tersebut belum menemukan metode yang dapat diterapkan secara komprehensif (Ilham, 2015).

Jelas bahwa kesenian rakyat perlu dipertahankan, bahkan dikembangkan karena kesenian rakyat memiliki energi kultural yang besar, yang tidak cukup tersedia pada kesenian-kesenian kontemporer. Masyarakat di seluruh dunia telah sejak lampau mengetahui apa saja manfaat kesenian selain sebagai media hiburan. Pengembangan nilai-nilai positif yang menunjang penguatan karakter masyarakat dapat dicapai melalui kesenian. Oleh karena itu berbagai jenis kesenian tradisi yang selama ini

telah terbukti bermanfaat dalam kehidupan masyarakat harus dipertahankan. Sebagai contoh, selama beberapa dasawarsa, kesenian Janger menjadi salah satu seni pertunjukan rakyat yang berhasil meraih popularitas di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Kesenian ini juga mampu mengundang banyak penonton dan penikmat karena penampilannya sebagai teater rakyat yang tidak hanya menjadi sarana hiburan (tontonan) semata, namun sekaligus dimaksudkan untuk menampilkan keteladanan (tuntunan) yang dapat dijadikan refleksi tatanan kehidupan sehari-hari (Ilham, 2015).

Persentuhan masyarakat Pentalungan dengan berbagai produk budaya (pop) regional, nasional, maupun internasional jika dilakukan secara benar justru akan memperkaya nilai-nilai yang selama ini telah dimiliki masyarakat lokal. Persoalannya, tidak mudah menentukan dan membuat standardisasi mengenai bagaimanakah 'cara yang benar' itu. Terlebih lagi, budaya pop sering dituduh dekaden, pembawa kehancuran moral, serta tuduhan-tuduhan lain yang negatif. Mengenai hal ini dunia pendidikan, khususnya pendidikan kesenian, harus serius ambil bagian. Pendidikan kesenian harus dimaknai, terutama, sebagai upaya pengembangan kesenian daerah. Oleh karena itu para pelaku pendidikan, khususnya pada pendidikan tinggi seni, berkewajiban untuk terlibat secara aktif dalam penggalan dan pengembangan kesenian di daerah masing-masing.

Pendidikan kesenian telah diberikan sejak di pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, bahkan secara khusus sampai pendidikan tinggi. Jika telah berjalan dengan baik sesuai dengan agenda yang direncanakan, mestinya tidak perlu ada kekhawatiran lagi mengenai kelangsungan hidup seni budaya daerah. Dunia pendidikan kita telah membekali generasi muda dengan nilai-nilai budaya bangsa, dan oleh karenanya mereka mampu menghargai hasil karya budaya bangsanya dan pada

akhirnya ikut aktif melestarikannya. Sebagaimana dikatakan Lowenfeld dan Brittain (1975), kegiatan seni dapat membantu setiap individu dalam mengembangkan daya estetika, persepsi, intelektual, emosional, daya cipta, dan teknik.

Untuk tujuan pembelajaran maupun studi kebudayaan, kesenian masyarakat Pendalungan dapat dipelajari berdasarkan genrenya, dikelompokkan sebagai berikut: seni pertunjukan (seni tari, seni musik, seni teater), seni rupa, seni sastra, seni arsitektur, seni media rekam, dan seni bela diri. Sedangkan berdasarkan asal-usul penciptaannya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni kesenian hasil adopsi, modifikasi, dan invensi. Contoh-contoh berdasarkan pengelompokan ini dapat dilakukan dengan terlebih dulu melakukan riset berskala luas dan mendalam. Riset semacam itu tidak saja diperlukan bagi upaya pelestarian kesenian, tetapi juga diperlukan bagi upaya pengembangan pariwisata budaya di wilayah Pendalungan Raya.

Kentrung Djos, Seni Produk Pendalungan

Dalam sebuah percakapan dengan Prof. Bagio,⁷ saya sempat terperangah ketika beliau mengatakan, “contoh paling konkrit kesenian asli produk masyarakat Pendalungan adalah Kentrung Djos.” Mungkin karena secara emosional saya terlibat secara intens dengan Kentrung Djos sejak awal kelahirannya, maka tidak terpikir di benak saya bahwa kesenian ini “Pendalungan banget”. Demikian pula beberapa kawan yang telah puluhan tahun terlibat dalam Kentrung Djos, tidak memikirkannya sebagai produk Pendalungan atau bukan. Mereka lebih suka berpikir di tataran kreatif. Maka setelah saya renungkan, tidak ragu-ragu lagi saya mengatakan bahwa sesungguhnya kesenian

⁷ Prof. Bagio, lengkapnya Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr, Ph.D., adalah ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Jember.

inilah yang dapat dijadikan sebagai salah satu contoh nyata seperti apa wujud seni pertunjukan khas Pentalungan itu. Kesenian ini tidak saja dilahirkan di Jember, tetapi nyaris keseluruhan aspeknya mencerminkan sifat-sifat Pentalungan yang *mix-culture*.

Pada tahun 1982, ketika saya menjadi mahasiswa baru di Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) Unej, saya dan kawan-kawan seangkatan ditugaskan menyiapkan sebetuk seni pertunjukan yang unik dan segar untuk acara rutin tahunan “Malam Inaugurasi” bagi mahasiswa baru. Saya mengajukan usul untuk mementaskan seni kentrung dan disetujui. Tapi karena keterbatasan kemampuan saya dan kawan-kawan, serta tiadanya peralatan musik pengiring yang diperlukan, akhirnya kentrung yang ditampilkan bukan kentrung model Kediri (sebagaimana yang sudah dikenal orang), melainkan “kentrung modifikasi”. Pementasan pertama diselenggarakan pada bulan Oktober 1982, mengangkat lakon klasik *Joko Tarub dan 7 Bidadari*. Di kemudian hari, ketika kami mendapat kesempatan untuk kembali mementaskan kentrung modifikasi tersebut, kami memberi nama kelompok tersebut “Kentrung Djos”. Selain enak dan mudah dibunyikan, “djós” merupakan kependekan dari “derap jiwa orang sastra.”

Setelah naik pentas bersama Kentrung Djós, saya mulai rajin “berburu” pertunjukan kentrung dan berbagai pertunjukan teater rakyat lainnya. Di Blitar, pada tahun 1984, saya beruntung dapat menyaksikan pertunjukan kentrung yang dikomandani Pak Markam, satu-satunya dalang kentrung yang tersisa di daerah tersebut. Di Tulunggung, pada tahun 1986, saya menyaksikan pertunjukan kentrung dengan dalang seorang perempuan, juga satu-satunya dalang kentrung yang masih bertahan di daerah tersebut. Di Nganjuk, pada awal tahun 1990-an, saya nonton dua buah pertunjukan kentrung. Di Banyuwangi ada pertunjukan

Pacul Gowang yang sangat lucu, juga seni Janger yang digemari masyarakat. Tak ketinggalan, di Bondowoso dan Jember saya menikmati pertunjukan kentrung Trio Noer yang khas. Grup kentrung Trio Noer ini berasal dari Bondowoso dan menggunakan bahasa Madura, masih mampu bertahan hingga awal tahun 2000-an.

Para anggota Kentrung Djos yang berasal dari berbagai daerah turut meramaikan warna-warni budaya kesenian ini. Misalnya Supartu dan Yatiman, yang berasal dari Banyuwangi, menyumbangkan corak Banyuwangen yang cukup kental. Suyatno, yang berasal dari Lamongan, memberi nafas Jawa Timuran, dan Maryani dari Blitar memberi warna Mataraman.

Mengenai bentuk khas pementasan Kentrung Djos perlu dijabarkan beberapa hal di sini. Seni Kentrung yang tersebar di daerah Kediri, Blitar, dan sekitarnya, biasanya dalam pementasannya hanya beranggotakan 2 hingga 4 orang, yang terdiri atas seorang dalang (sambil memukul kendang atau ketipung) dan seorang hingga tiga orang pemusik. Pementasan biasanya berlangsung semalam suntuk (5-7 jam). Dalang bertutur, pemain musik akan *nyenggaki* (menyahuti, menimpali) dengan celetukan, pantun, atau lagu-lagu pendek. Sementara itu Kentrung Djos selain mempertahankan keberadaan dalang dan pemusik, juga menghadirkan “wayang”, yakni para aktor/aktris yang memeragakan tokoh yang diceritakan oleh dalang. Artinya, Kentrung Djos tidak hanya mementingkan unsur audio, namun juga unsur visual. Dalang bertugas mengucapkan dialog, sedangkan para aktor/aktris bertindak sebagai “wayang”, beracting sesuai dengan dialog yang diucapkan dalang tersebut.

Pementasan Kentrung Djos lebih singkat, berkisar antara satu hingga dua jam, dengan menggunakan naskah tertulis sebagai basis pertunjukan. Pada perkembangan lebih lanjut, Kentrung Djos mengadakan eksperimen mengenai bentuk

pementasan ini, sehingga menemukan tiga jenis model pementasan, yakni: 1) dalang mengucapkan dialog, pemain berakting, 2) seluruh pemain mengucapkan sendiri dialog masing-masing, dan 3) gabungan dari kedua model di atas, yakni antara dalang dan pemain berbagi dialog. Namun model yang paling sering dipilih adalah model pertama.

Musik pengiring dalam pertunjukan Kentrung Djos merupakan pengembangan dari kentrung yang sudah ada. Kentrung di Kediri hanya menggunakan peralatan musik yang terbuat dari kulit (kendang, ketipung, terbang, jidor), maka Kentrung Djo melengkapinya dengan peralatan musik gamelan, seperti gong, saron, demung, kenong, dan siter. Bahkan jika perlu, dalam situasi tertentu, peralatan musik lain juga dipakai, seperti cukulele, tamborin, *snar-drum*, *keyboard*, *bas guitar*, dll. Lagu-lagu yang dimainkan dalam pertunjukan Kentrung Djos tidak hanya terbatas pada parikan dan tembang saja, tetapi juga lagu-lagu kreasi baru (langgam, keroncong, dll.). Gending-gending yang dimainkan sebagai pengiring keluar dan masuknya para tokoh cerita berasal dari berbagai genre seni pertunjukan, mulai dari ludruk, janger, wayang kulit, ketoprak, gending-gending Sunda, Bali, Banyuwangen, dan sebagainya.

Meskipun Kentrung Djos juga memainkan cerita adaptasi dari naskah Barat, seperti: *Romeo dan Juliet*, atau naskah ciptaan sendiri, seperti *Djos Sarjana Masa Depan*, namun kebanyakan cerita yang dimainkan Kentrung Djos merupakan cerita rakyat, yakni cerita-cerita yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, seperti: *Sarip Tambak Oso*, *Sakerah*, *Minak Jinggo*, *Sampek Eng Thay*, *Roro Mendut*, *Joko Tarup*, dll.

Sampai dengan tahun 2017, ketika buku ini saya susun, grup Kentrung Djos yang telah bertahan selama 35 tahu tetap berkegiatan meskipun aktivitas pementasannya tidak sesering dulu.

Bahasa Orang Pendalungan

Pertemuan Bahasa-Bahasa

Setidaknya sejak awal abad ke-20, masyarakat di kawasan Tapal Kuda dikenal sebagai masyarakat plural, terdiri atas berbagai etnis dan kultur yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain etnis mayoritas, yakni Madura dan Jawa, terdapat pula etnis minoritas Arab, Cina, Using, dan Mandar. Namun karena mereka tumbuh dan berkembang dalam situasi plural dalam jangka waktu relatif lama, maka perspektif sosio-kultural mereka lambat-laun diwarnai oleh semangat pluralisme dan multikulturalisme. Sebagian dari orang-orang keturunan Madura tetap menganggap dirinya orang Madura, demikian pula orang-orang keturunan etnis lain. Namun demikian mereka sudah tidak terlalu kental lagi dengan etnisitas masing-masing. Etnisitas dan identitas mereka adalah bagian dari proses sosial dan historis, sebagai suatu fenomena yang hadir karena diciptakan, dipertahankan, dan diubah berdasarkan interaksi yang intens. Mereka itulah orang-orang Pendalungan.

Dalam hal bahasa, yang dominan digunakan sebagai media komunikasi sehari-hari masyarakat Pendalungan adalah bahasa Jawa dan Madura. Tentu saja bahasa Indonesia juga digunakan secara luas, terutama di kalangan anak muda, serta pada berbagai forum formal. Di sekolah-sekolah, bahasa daerah yang diajarkan adalah kedua bahasa tersebut, tergantung di mana

lokasi sekolah berada.⁸ Di Kecamatan Silo dan Kecamatan Pakusari, Jember, misalnya, yang diajarkan adalah bahasa Madura, sedangkan di Kecamatan Rambipuji, Jember, bahasa Jawa. Meskipun demikian, akibat dari intensitas pergaulan masyarakat berbahasa Jawa dan Madura dalam jangka waktu relatif lama telah mengakibatkan bahasa komunikasi sehari-hari masyarakat tidak lagi “murni” bahasa Jawa atau Madura. Berbagai kosa kata, frasa, istilah, atau bentuk ekspresi baru, bermunculan akibat intensitas pergaulan tersebut, khususnya di wilayah kota.

Dalam berkomunikasi, masyarakat Tapal Kuda memiliki kecenderungan bilingualitas/multilingualitas yang cukup tinggi, yakni mampu menguasai dua bahasa atau lebih. Kontak intensif antara dua bahasa atau lebih pada masyarakat Tapal Kuda menimbulkan gejala alih kode (*code-switching*), campur kode (*code-mixing*), dan interferensi (*interference*). Alih kode adalah penggunaan dua bahasa atau variasi bahasa secara berganti-ganti di dalam wacana yang sama. Ini berarti bahwa si pembicara bilingual beralih dari perangkat sistem bahasa yang satu ke perangkat sistem bahasa yang lain, seperti dari bahasa Jawa ke bahasa Madura, atau dari bahasa Madura/Jawa ke bahasa Indonesia. Alih kode terjadi karena dorongan psikologis serta faktor sosial dan situasional.

Campur kode juga terjadi, yakni pengambilan elemen secara tetap dari bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang dipakai karena tidak ada elemen yang tepat dalam bahasa yang dipakainya itu. Dengan kata lain, elemen yang diambil itu milik sistem yang berbeda. Motivasinya adalah motivasi linguistik dan

⁸ Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah, yang diajarkan di sekolah-sekolah di Jawa Timur adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura.

hasrat untuk menjelaskan/ interpretasi semata; tidak dipengaruhi oleh faktor situasional.

Kontak yang intensif antara dua bahasa atau lebih di dalam situasi yang bilingual/multilingual juga akan menimbulkan gejala interferensi (pengacauan), yakni perubahan bentuk bahasa sebagai akibat dari penerapan dua buah sistem bahasa yang berbeda secara serempak pada diri seorang komunikator bilingual/multilingual.

Di Probolinggo, baik di wilayah kota maupun kabupaten, sebagian masyarakat berbahasa Jawa dan sebagian lainnya berbahasa Madura. Namun masyarakat Probolinggo yang berbahasa Jawa tersebut berlogat Madura. Di Banyuwangi, Jember, dan Lumajang juga kurang-lebih demikian. Orang-orang keturunan Arab di Bondowoso jika bertemu dengan kawan lamanya biasa berkata: *“Mak abit tak temo bik situ”* (Kok lama sekali tidak bertemu dengan situ). Ini adalah bahasa Madura bercampur bahasa Indonesia tidak baku.

Dalam kebudayaan berbagai masyarakat, bahasa selalu menjadi faktor determinan, khususnya dalam proses transmisi berbagai nilai untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai tradisi masyarakat tersebut. Bagi masyarakat tradisional, bahasa lisanlah faktor determinan itu (Ilham, 2015). Apakah dengan demikian penamaan Pandalungan, yang berarti “berbicara secara buruk” menemukan pembenaran? Tentu saja tidak. Di kalangan masyarakat intelektual, dalam hal menyikapi perilaku berbahasa masyarakat Pandalungan semacam itu, peran mitos telah diambil alih oleh logos (akal pikir). Taylor (1871) menganggap mitos sebagai produk kekacauan atau kebingungan manusia yang mencampuradukkan begitu saja pengalaman mimpi dan bangunnya. Pendek kata, mitos adalah sesuatu yang kita percayai dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran, tapi sesungguhnya tidak benar. Oleh karena itu, jika dulu yang

tampak adalah masyarakat Pendalungan berbahasa secara buruk, kini hal itu dianggap sebagai suatu keunikan, suatu keniscayaan dalam masyarakat campuran di mana pun berada.

Bahasa Jemberan

Di Jember, akulturasi budaya Jawa dan Madura yang berlangsung relatif lama melahirkan variasi bahasa yang khas. Terjadinya keragaman atau variasi bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang heterogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan cukup beragam. Dalam interaksi sosial semacam itu fenomena bahasa yang kerap terjadi antara lain alih kode dan campur kode.

Berdasarkan hasil penelitian Rahman (2015), akulturasi antara bahasa Jawa dan bahasa Madura di Jember menghasilkan dialek baru, yaitu bahasa Jawa dialek Jemberan (Pandalungan) yang digunakan oleh masyarakat Jember dalam berkomunikasi sehari-hari. Rahman memerinci penutur bahasa Madura berada di daerah Jember timur dan utara. Sementara itu, sebagian besar penutur bahasa Jawa berada di kawasan Jember selatan dan barat. adapun di Jember bagian tengah jumlah penutur bahasa Jawa dan Madura relatif sama. Dengan adanya pemakaian dua bahasa tersebut maka timbullah bahasa Pandalungan.

Penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Raharjo (2006), menyimpulkan hal yang sama, bahwa bahasa Jawa dialek Jember digunakan komunitas Madura dan Jawa yang bertempat tinggal di kota dan pinggiran kota. Warga keturunan Tionghoa, Arab, dan Using juga melakukan proses interaksi dengan warga Jawa dan Madura. Etnis Tionghoa, terutama dalam menjalankan transaksi dagang, banyak berinteraksi dengan menggunakan bahasa Madura maupun bahasa Jawa bercampur logat Tionghoa yang cukup kental. Begitu pula dengan etnis Arab. Di kota-kota kecamatan, seperti Ambulu, bisa dijumpai perkampungan Arab

yang warganya biasa berkomunikasi dengan bahasa Jawa bercampur logat bahasa Arab. Bagi kekayaan dan kekhasan bahasa Jemberan, orang-orang Tionghoa dan Arab tersebut sesungguhnya tidak hanya menyumbangkan logat, tetapi juga banyak kosa kata.

Rahman (2015) mengumpulkan sejumlah kosa kata Jemberan yang diperolehnya dari tulisan-tulisan di kaos: *Sih koh!*, *boh*, *palang*, *mbois*, *nggilani*, *polae*, *longor*, *cek enggak'e*, *creme*, *mak taker*, *gile*, *metao*, *sengak*, *marra*, *digegeeri*, *beno ra*, *huh kah*, *salbut*, *megeli*, *mbulet*. Ungkapan *Sih koh!* bermakna menggoda, sama halnya dengan kata *cie*. *Boh* merupakan partikel dalam bahasa Madura yang menunjukkan ekspresi kaget, sedangkan kata *palang* bermakna bahaya, sehingga bila kata *boh* dan *palang* disatukan maka bermakna “bahaya” serta mengekspresikan “sesuatu yang tidak biasa.” Kata *mbois* bermakna keren, gaul, kekinian, terbaru. Kata *nggilani* bermakna menjijikkan. Kata *polae* memiliki makna ambigu, yaitu tingkah laku. Pemakaian dua kata yang berbeda ini disesuaikan dengan konteks tuturan. Kata *longor* bermakna konyol. Kata *cek enggak* sama dengan kata *gak banget*. Namun dalam ekspresi tersebut ditambah dengan kata *raa kah* yang memberi penekanan emosi, yang bermakna menyepelekan, menganggap remeh, atau menganggap tidak penting suatu hal, biasanya digunakan pada saat marah atau sedang kecewa.

Bahasa Jemberan juga melahirkan ungkapan dengan kosa kata yang unik, misalnya *sana'an rah* (tolong agak ke sana), *munduran rah* (tolong agak mundur), *cek gantengnya* (alangkah tampannya). Juga ungkapan dalam bentuk singkatan, misalnya *kardhi* (berasal dari *karepa dhibhik*, yang berarti ‘semaunya sendiri’), *kardhiman* (berasal dari *karepa dhibhik man-menyumam* yang berarti ‘semaunya dan seenaknya sendiri’). *Kardhi* atau *kardhiman* biasanya ditujukan pada seseorang yang

dianggap menjengkelkan. Selain itu, bahasa Jemberan diwarnai oleh pola bahasa Madura, seperti pola $\frac{3}{4}$ (bukan $1\frac{1}{2}$), yaitu kata-kata yang tidak utuh dalam pengucapannya, seperti *lun-alun* (alun-alun), *lon-alon* (pelan-pelan), *ku-mlaku* (berjalan-jalan), *can-macanan* (bukan harimau yang sebenarnya), *ker-ekeran* (bertengkar), dan sebagainya.

Bahasa Jawa dialek Jember, menurut Wibisono dan Sofyan (2001), biasa digunakan oleh orang-orang Madura di kota dan pinggiran kota ketika mereka berkomunikasi dalam ranah sosial dengan etnis Jawa, tetapi ketika berkomunikasi dengan sesama etnis Madura mereka tetap menggunakan Bahasa Madura. Bahasa lisan yang mereka gunakan memang berbeda jauh dengan Bahasa Jawa standar. Pemilihan bahasa tersebut didasari beberapa faktor, antara lain (1) beridentifikasi dengan mitra wacana, dalam hal ini etnis Jawa, dan (2) menyatakan sifat positif terhadap Bahasa Jawa. Wibisono dan Sofyan memberi contoh bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari antara etnis Jawa (EJ) dan etnis Madura (EM) sebagai berikut.

EJ : *Kate nang endi, Mas?*

EM : *Gak onok, iki ku-mlaku.*

Jawaban '*Gak onok, iki ku-mlaku*' merupakan usaha menggunakan Bahasa Jawa yang dipengaruhi bahasa Madura.

EJ : *Dari mana, Mas?*

EM : *Dari laut.*

Jawaban '*Dari laut*' merupakan usaha menggunakan Bahasa Indonesia yang dipengaruhi kosa kata bahasa Madura. Laut di sini berarti selatan, atau "laok" dalam bahasa Madura.

Gak onok umur (meninggal) adalah bahasa Jawa Jemberan yang juga dipengaruhi bahasa Madura. Sedangkan *gak dikek'i weruh* merupakan bahasa Jawa Jemberan yang terpengaruh bahasa Indonesia 'tidak diberi tahu'.

Selama ini memang bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jember disebut sebagai “bahasa Jawa dialek Jember” (Wibisono dan Sofyan, 2001; Raharjo, 2006; Rahman, 2015). Tetapi saya beranggapan bahwa hal itu masih terlalu prematur. Masih diperlukan pendalaman atau studi lebih lanjut mengenai “bahasa Jemberan” atau “dialek Jember” ini, baik dalam hal penamaan, struktur, maupun kosa kata.

Bahasa Daerah yang Semakin Hilang

Para pendatang yang menempati daerah Jember, pada masa lalu, sebagian besar adalah orang-orang yang berbahasa Jawa dan Madura. Di Jember mereka tetap menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa komunikasi sehari-hari mereka. Namun pada perkembangannya, bahasa Jawa dan bahasa Madura cenderung mengalami penurunan jumlah penutur aslinya. Menurut Salikin (2016), para penutur asli bahasa Madura tidak mau atau enggan menggunakannya dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah bahwa mereka tidak mau dianggap tidak maju, sehingga mereka memilih berbahasa Indonesia. Menurut mereka, dengan berbahasa Indonesia menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang berpendidikan. Ini tidak hanya terjadi pada kalangan awam saja, kaum terpelajar seperti mahasiswa dan dosen penutur asli bahasa Madura juga memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Salikin juga mengilustrasikan bagaimana bahasa Bali yang mengalami penurunan jumlah penutur. Orang Bali yang berusia 30 tahun ke atas masih mampu secara aktif menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan orang Bali yang berusia antara 20 sampai dengan 30 tahun sudah mulai kurang aktif menggunakan bahasa daerahnya dan anak-anak Bali yang berusia di bawah 20 tahun sudah tidak peduli lagi dengan keadaan bahasa daerahnya.

Sementara itu Alwi (2001) mengisahkan bagaimana keadaan yang dialami bahasa Jawa. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Jawa menduduki peringkat paling atas kelompok delapan besar bahasa daerah yang jumlah penuturnya paling banyak, diikuti oleh bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Banjar, dan bahasa Bali. Namun demikian tidak berarti bahwa bahasa Jawa jauh dari ancaman kepunahan. Bahasa Jawa kini menempati posisi pinggiran dan hanya digunakan orang tua, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Amir Mahmud, kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ada kecenderungan penghilangan identitas kemanduraan, terutama di kalangan generasi muda. Dalam kurun waktu 1980 - 1990 jumlah penutur bahasa Madura mengalami penurunan, dari 6.913.977 penutur (4,71% dari jumlah penutur bahasa daerah di Indonesia) menjadi 6.792.447 penutur (4,29%). Data tersebut menunjukkan bahwa dalam satu dekade saja jumlah penutur bahasa Madura berkurang sekitar 121.530 orang, atau dengan kata lain setiap tahunnya 12.153 penutur bahasa Madura meninggalkan bahasa daerahnya (Salikin, 2016).

Di Jember bagian utara ada kecenderungan pemakain bahasa Madura yang mulai menurun. Kini banyak suami-istri beretnis Madura berkomunikasi dengan putra-putrinya memakai bahasa Indonesia, padahal antara suami-istri tersebut tetap menggunakan bahasa Madura. Alasan mereka sangat pragmatis yaitu bahwa mereka tidak ingin anak-anak mereka mengalami hambatan bahasa ketika nantinya harus masuk TK atau SD karena bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Para remaja, yakni para pelajar SMP dan SMA, juga berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dalam pergaulan di antara mereka. Jika ada orang lain yang mengajak mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Madura, mereka akan

menjawab dengan bahasa Indonesia. Alasan mereka sederhana, mereka sudah tidak mampu memakai bahasa daerah yang halus. Beberapa remaja beralasan bahwa bahasa Indonesia lebih keren dibanding bahasa Madura (Salikin, 2016).

Keadaan semacam itu lambat-laun akan menyebabkan lenyapnya bahasa daerah. Menurut Salikin (2016), penyebab utama kepunahan bahasa daerah adalah karena para penuturnya meninggalkan atau bergeser ke pemakaian bahasa lain yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi, sosial, politik, maupun psikologis. Di Indonesia selama dua dekade ini banyak orang yang meninggalkan bahasa daerahnya dan beralih menggunakan bahasa Indonesia, terutama mereka yang tinggal di perkotaan. Sementara itu Soetomo (1985) menyebutkan bahwa faktor nonkebahasaan memengaruhi masuknya bahasa daerah atau bahasa asing. Faktor nonkebahasaan menurutnya adalah (1) sistem budaya, bahasa yang dipandang sebagai tata lambang konstitusi, tata lambang evaluasi, dan lambang ekspresi, (2) sistem sosial, yaitu penggunaan bahasa harus sesuai dengan status dan peranan sosial pemakai bahasa, dan (3) psikologi penutur, yaitu penggunaan suatu bahasa mungkin karena dilatarbelakangi oleh persepsi, motivasi, identitas, pengalaman, dan hal-hal yang bersifat pribadi.

Dilihat dari perspektif pelestarian budaya, penggunaan bahasa daerah di Jember tergolong mengkhawatirkan. Generasi muda di Jember lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka, padahal di rumah masih menggunakan bahasa Jawa atau Madura. Hal ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak sejak lama.

Pemerintah daerah wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh kelangsungan bahasa daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan

pembagian tersebut, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Orang Pendalungan dan Globalisasi

Globalisasi Membelit Dunia

Istilah global atau globalisasi sesungguhnya bukan hal baru. Beberapa ratus tahun sebelum Masehi, Democritus, seorang filosof, mengatakan bahwa "bagi orang bijak, seluruh dunia ini terbuka, karena asal jiwa yang baik adalah seluruh dunia." Beberapa ratus tahun sesudah itu Nabi Muhammad berkata, "Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina." Selanjutnya pada abad ke-15 bangsa-bangsa Eropa berlayar meninggalkan negerinya menuju tanah harapan baru, demi memperluas wilayah kekuasaan. Mereka mengincar sumber daya ekonomi baru yang tidak terdapat di negaranya (Zoebazary, 2013). Menurut Kartodirdjo (2003), fenomena globalisasi pada masa lalu itu telah dikenal sebagai gejala mondialisasi. Hanya bedanya globalisasi masa kini mengalami akselerasi yang luar biasa, mempunyai tempo amat cepat dan kontinyu serta intensif, karena media menggunakan teknologi yang semakin canggih.

Pada era kini, hubungan antarkota, antarnegara, bahkan antarbenua dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Pada masa dahulu, Pemerintah Kolonial Belanda membutuhkan waktu berbulan-bulan bila ingin mengonfirmasi perkembangan politik terbaru di Pulau Jawa. Kini masalah itu bisa dilakukan dalam hitungan detik. Jika penduduk kota London dapat menikmati siaran langsung pertandingan sepak bola antara

Manchester United Vs. Chelsea pada suatu sore, maka pada saat yang sama para penggemar bola di desa Antirogo, Jember, yang berjarak ribuan kilometer dari London, juga bisa menyaksikan pertandingan itu melalui parabola. Hal-hal semacam itulah yang oleh para ahli disebut sebagai globalisasi.

Istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt (1983) dalam artikelnya “The Globalization of Markets” yang merujuk pada politik-ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Selanjutnya pengertian ini melebar, menjangkau keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Menurut Barker (2004), globalisasi merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah di seluruh penjuru dunia dan merasuk ke dalam kesadaran kita. Produksi global atas produk lokal dan lokalisasi produk global. Definisi lain, yang dibuat oleh Bank Dunia, mengatakan bahwa globalisasi adalah proses integrasi ekonomi dan masyarakat melalui arus informasi, ide, aktivitas, teknologi, barang, jasa, modal, dan manusia antarnegara (Stern, 2000). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses integrasi manusia sejangat, dan menjadikan dunia menjadi semacam *global village*, desa global. Jarak antara satu tempat dengan tempat lain dihubungkan dengan teknologi informasi, sehingga dunia terasa semakin sempit dan tanpa sekat pembatas.

Globalisasi ini, tanpa disadari banyak pihak, telah melahirkan kegelisahan yang luar biasa dalam diri masyarakat. Hal itu diakibatkan oleh jangkauan dan dampak globalisasi yang nyaris tak terhindarkan, yang merangsang berkembangnya suatu standarisasi kehidupan di berbagai bidang, sementara masyarakat masih ingin tetap mempertahankan ekspresi budaya dan nilai-nilai tradisi leluhur, atau kemungkinan belum siap menghadapi datangnya perubahan. Sungguh tidak mungkin bagi

masyarakat untuk menjalani keduanya sekaligus karena pada hakekatnya masyarakat tidak dapat hidup terus-menerus dengan standar ganda. Ekspresi budaya yang berusaha dipertahankan di seluruh lapisan masyarakat biasanya mengacu pada warisan budaya dan nilai tradisi. Salah satu contoh nyata yang masih dipraktikkan masyarakat adalah *slametan*—sebagaimana telah ditulis Geertz dalam *The Religion of Java* (1960), dianggap sebagai sebuah acara komunal yang mengekspresikan sekaligus memperkuat aturan budaya umum dan kekuasaan yang dimaksudkan untuk melawan kekuatan lain.

Globalisasi Media dan Konsumerisme

Teknologi komunikasi telah mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Pendalungan, sehingga selalu ada interaksi lintas jarak yang kompleks antara suatu peristiwa lokal dengan aneka peristiwa di tempat lain yang mereka jadikan referensi. Akhirnya, peristiwa kultural yang mereka lakukan merupakan bagian dari jejaring budaya global. Perlu disadari bahwa globalisasi media (*globalized media*) telah terjadi, sepenuhnya berlangsung berdasarkan logika ekonomi dan demi pencarian sebesar-besarnya keuntungan. Itulah sebabnya mengapa media massa, misalnya televisi, berlomba memasarkan produknya agar diterima oleh sebanyak mungkin konsumen di seluruh dunia. Industri televisi top dunia tidak didirikan atas nama kepentingan nasional dan demi kemaslahatan umat, melainkan pertama-tama untuk kepentingan ekonomi dan demi keuntungan pemodal. Appadurai (2005) memperkenalkan konsep *mediascape* sebagai perangkat untuk memahami fenomena produksi dan sirkulasi media yang melampaui batas-batas geografis semacam itu.

Revolusi teknologi komunikasi dan transportasi telah menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai belahan dunia. Fenomena mencolok yang mengiringinya adalah tumbuhnya

consumer culture sebagai akibat dari ekspansi pasar. Budaya konsumsi telah diidentikkan dengan kemajuan jaman. Anda harus mengonsumsi ini-itu, jika tidak maka Anda bukan bagian dari modernitas. Identitas masyarakat modern dibangun melalui benda-benda massal yang belum tentu memiliki nilai guna bagi si pembeli. Benda-benda semacam itu oleh Baudrillard (2004) disebut sebagai *kitsch*, yakni objek murahan, hanya pernak-pernik sederhana, cenderamata. Baudrillard juga menjelaskan bagaimana sifat rakus dan ketidakpuasan tanpa henti para konsumen. Masyarakat modern ditandai dengan “dialektika kefakiran”, yakni terdapat kebutuhan yang tak terbatas dan tiada henti; suatu logika konstan bahwa orang tidak pernah merasa berkecukupan. Masyarakat konsumsi hanya berketat dengan objek. Mereka tidak dikelilingi orang-orang lain, tetapi oleh objek. Mereka mengisi dan memenuhi hidupnya dengan objek.

Gaya hidup modern yang dipuja-puja tapi sesungguhnya palsu tersebut telah tumbuh di Indonesia, secara perlahan tapi pasti. Mulai dari Jakarta hingga ke daerah-daerah, termasuk Jember, Banyuwangi, dan daerah-daerah Pedalungan lainnya. Sebagian masyarakat Pedalungan, termasuk kalangan elitnya, masih membayangkan kebudayaan modern itu hanya mencakup pemerolehan simbol-simbol lahiriah saja, misalnya kebudayaan supermarket, masakan siap saji, cafe, butik, dan lain-lain, di mana semua hanya memberi kesan artifisial dan tidak terbangun relasi batiniah. Modernitas palsu semacam itu tidak memberi sumbangan apa pun terhadap identitas kultural Pedalungan kecuali identitas semu. Maka tidak mengherankan jika di Jember toko waralaba modern tumbuh menjamur tak terkendali, mengikis toko-toko model konvensional yang telah dibangun masyarakat sejak lama.

Media jelas memengaruhi intensitas globalisasi. Merujuk pada konsep kebudayaan termediasi (*mediated culture*) yang

ditulis Kelly Askew dan Richard R Wilk (2002), kebudayaan lahir dalam kaitannya dengan keberadaan media yang tidak sekadar menempatkannya dalam relasi antara organisasi media dan orang, tetapi menghubungkan orang-orang yang melebihi batas geografis mereka. Hubungan tersebut diletakkan dalam relasi produsen-konsumen, produser-audiens. Konsep *mediated culture* dikaji antropolog William Mazzarella (2004) dalam artikelnya “Culture, Globalization and Mediation”. Menurutnya mediasi merupakan konsep kunci untuk melihat kebudayaan dalam kerangka fenomena globalisasi. Proses globalisasi telah menyebabkan perubahan terhadap konsep kebudayaan yang pada awalnya memiliki batasan teritorial yang konkrit menjadi sesuatu yang kompleks dan abstrak. Hal ini menyebabkan kebudayaan dan identitas sebuah kelompok masyarakat, yang pada awalnya cukup jelas, menjadi sulit untuk diidentifikasi. Mediasi, melalui media massa, harus ditempatkan sebagai aspek kunci yang membentuk nilai-nilai yang signifikan dalam sebuah kebudayaan. Media dan proses mediasi menjadi dua konsep kunci dalam memahami kebudayaan karena memungkinkan sebuah kelompok masyarakat untuk mengambil pesan sekaligus membentuk kembali pesan tersebut dan menyebarkannya untuk kepentingannya sendiri. Media massa menjadi mediator utama antara kebudayaan dan masyarakat, serta memediasi antara kebudayaan kelompok tersebut dan kebudayaan kelompok masyarakat lain. Fungsi mediasi tersebut berjalan ketika media massa merepresentasikan suatu kebudayaan dan kemudian bergerak terbalik merefleksikan kebudayaan tersebut kepada kelompok masyarakat si empunya kebudayaan itu. Media massa juga memberi kesempatan pada masyarakat tersebut untuk membandingkan kebudayaannya sendiri dengan kebudayaan kelompok lain yang dapat mereka saksikan melalui media.

Masyarakat Pendalungan pada masa kini, sebagaimana masyarakat lainnya di tanah air, tidak bisa menghindari dari media. Tidak ada seorang pun saat ini yang dapat melepaskan diri dari intervensi dan pengaruh media: koran, televisi, film, video, radio, Internet, dan sebagainya. Terlebih pada saat ini hand-phone telah menjadi hal yang lumrah bagi hampir setiap orang, mulai dari orang tua hingga anak-anak di Sekolah Dasar. Oleh karena itu, di tengah perubahan lanskap sosial-budaya yang dipengaruhi media semacam itu, kita sebaiknya juga mempertimbangkan konsep kebudayaan yang tidak semata-mata berdasarkan hal-hal konkret (*tangible*), seperti batas-batas geografis, model pakaian dan bentuk bangunan, dan sebagainya. Identitas kebudayaan tidak lagi bisa dikonsepsikan sebagai entitas utuh yang bersifat lokal, dengan standar nilai tertentu yang mapan dan penuh kepastian. Berbagai pandangan, norma, dan nilai sudah saling bersinggungan karena diintrodusir oleh media massa dengan sirkulasi global.

Jika kita amati secara seksama, pilihan masyarakat Pendalungan terhadap jenis media, atau konten suatu media, memengaruhi aneka tindakan dan praktik kebudayaan yang mereka lakukan dalam hidup keseharian. Berbagai pertunjukan kesenian di atas panggung, atau yang ditayangkan televisi (kabel) lokal dapat dianggap sebagai cerminan fenomena sosial karena seluruh proses produksi kesenian tersebut pada dasarnya merupakan proses sosial yang tidak berlangsung di ruang hampa. Sebaliknya, kesenian tersebut pada gilirannya akan memberi pengaruh pada kebudayaan masyarakat Pendalungan lainnya secara lebih luas.

Globalisasi di Tapal Kuda

Tatanan masyarakat global memperlihatkan keterhubungan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Unsur-unsur

budaya suatu masyarakat dapat dengan mudah ditemukan pada masyarakat lainnya. Misalnya, gaya arsitektur rumah Minang dapat ditemukan di Bali, demikian pula sebaliknya. Bahkan model rumah *joglo* khas Jawa dapat ditemukan di Amerika, dan model rumah Mediterania dapat ditemukan di perumahan-perumahan di seluruh pelosok Pulau Jawa.

Dalam banyak aspek, masyarakat Pendalungan Raya telah secara langsung merasakan dampak globalisasi tersebut. Di sana globalisasi, secara perlahan namun pasti, mendorong terjadinya penyeragaman bentuk maupun citarasa produk-produk kultural sehingga keberadaan produk-produk budaya lokal mulai mengalami ancaman serius. Sebagai contoh, bangunan rumah orang Jawa sudah jarang menggunakan landasan tata-arsitektural khas tradisional Jawa lagi. Demikian pula dengan bangunan khas rumah orang Madura. Masyarakat Situbondo dan Bondowoso sudah tidak melirik rumah model *Tabing-tongkok* yang khas dan orisinal. Berbagai alasan bisa dikedepankan berkenaan dengan hal ini, misalnya demi kepraktisan serta pembiayaan yang murah. Rumah-rumah di kompleks perumahan, atau bangunan rumah baru di kampung-kampung, kini sudah meninggalkan identitas arsitektur lokal. Rumah orang Jawa, Madura, Using, Cina, Arab sudah tidak menunjukkan identitas kultural mereka. Wujudnya sudah sama, dengan “kepraktisan” dan “biaya murah” sebagai pertimbangan utama.

Di Tapal Kuda kita tidak bisa lagi menemukan dengan mudah perempuan Jawa sebagaimana yang digambarkan dalam sastra lama: *bangkekane nawon kemit* (pinggangnya ramping), *gulune ngelung gadhung* (lehernya jenjang), *pakulitane ngulit langsep* (lulitnya kuning langsung), *rambute ngembang bakung* (rambutnya berombak), karena perempuan Jawa di daerah ini telah menutup seluruh badannya dengan busana yang tidak memungkinkan orang lain menengarai tubuhnya. Sejak masih

duduk di bangku sekolah dasar mereka telah didorong untuk mengenakan pakaian yang diklaim “menutup aurat perempuan”.

Pada satu sisi globalisasi bisa sangat menguntungkan dan mendatangkan manfaat, namun di sisi lain bisa menjadi ancaman serius bagi eksistensi budaya lokal. Menurut Michael Hsiao (2005), ada empat dampak yang dihasilkan dari perjumpaan globalisasi dengan kebudayaan lokal. *Pertama*, sebagaimana sering ditakutkan banyak orang, budaya lokal akan tergeser oleh budaya global. Banyak contoh yang bisa kita berikan, misalnya pakaian kebaya diganti blues, kerudung diganti jilbab; aneka permainan tradisional anak-anak diganti dengan *game on-line*. *Kedua*, budaya lokal dan budaya global hidup berdampingan tanpa ada penyatuan berarti di antara keduanya. Contohnya, musik Barat dan musik gamelan, masing-masing berkembang di panggungnya sendiri-sendiri, meski sesekali terjadi persinggungan kreatif. *Ketiga*, perpaduan antara budaya lokal dan budaya global menghasilkan suatu produk budaya baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya, penggabungan elemen-elemen musik Barat dan elemen-elemen musik gamelan menjadi musik Campursari. *Keempat*, budaya global ditolak oleh budaya lokal. Contohnya, di Bali tidak diperkenankan mendirikan bangunan pencakar langit (dengan pada ketinggian tertentu). Ketinggian bangunan dibatasi maksimal 15 meter, atau secara tradisional “tidak lebih tinggi daripada pohon kelapa”.

Globalisasi secara simultan menghasilkan dua dampak. Di satu sisi globalisasi melenakan masyarakat sehingga memungut nilai-nilai baru begitu saja tanpa saringan dan meninggalkan nilai-nilai lama yang telah dianut turun-temurun. Di sisi lain globalisasi merangsang timbulnya pergulatan seru antara nilai-nilai budaya lokal dan global. Pergulatan tersebut tidak jarang menghasilkan produk kultural baru, atau yang diperbaharui. Di

Jember, contoh paling otentik mengenai hal ini adalah JFC (*Jember Fashion Carnival*). Dalam kasus JFC, ekspansi budaya global yang tak terelakkan itu justru memantik peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi budaya lokal, regional, maupun nasional. Meskipun pengaruh Islam cukup kuat terhadap masyarakat Pandalungan, namun oleh Sutarto (2006) mereka dianggap sebagai masyarakat yang tidak alergi terhadap selera global, terutama yang terkait dengan gelombang *food, fashion, and fun*, terbukti dengan munculnya JFC.

Strategi Bertahan

Di tengah serbuan globalisasi yang segenar ini, bagaimana mungkin seseorang atau sekelompok orang merasa yakin dapat mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya tanpa strategi yang komprehensif?

Sesungguhnya, tanpa perlu diragukan, identitas budaya lokal dapat digunakan sebagai gaya hidup masyarakat modern. Namun hal ini memerlukan komitmen pemerintah daerah, kaum cendekia, serta para tokoh masyarakat. Meskipun era globalisasi dan abad elektronika telah kita masuki, namun dalam hal tertentu masyarakat kita masih bergantung pada orang-orang yang dianggap berpengaruh. Sehubungan dengan hal ini sudah semestinya bila masing-masing Pemerintah Daerah di Tapal Kuda mendayagunakan modal sosial dan kultural masyarakat Pandalungan. Konsep Pandalungan, sebagai suatu entitas kebudayaan lokal, dapat diacu sebagai visi untuk membangun masyarakat setempat dengan melibatkan berbagai potensi lokal hingga di tingkat kecamatan dan desa. Pandalungan adalah visi sosio-kultural yang diharapkan mampu memperkokoh integrasi dan kohesi masyarakat di tiap daerah di Tapal Kuda.

Memang, lokalitas kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks. Sebagaimana dijelaskan Mazzarella (2004), dalam

suatu tindakan yang dilakukan, terdapat unsur yang berasal dari kebudayaan lain yang sudah terserap menjadi kebudayaan lokal. Minuman yang diminum merupakan air mineral dalam kemasan, komputer yang digunakan merupakan hasil produksi negara lain, pakaian yang dikenakan juga tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan kelompok lain. Di Jember dan Banyuwangi, elemen-elemen musik, tari, dan busana Bali telah menjadi lokal dalam seni Janger. Seni Ludruk, Wayang Kulit, dan Reyog telah menjadi lokal bagi masyarakat Jember. Dalam hal ini Pendalungan telah identik dengan apa yang kita sebut dengan lokalitas kebudayaan tersebut.

Selanjutnya, pertanyaan yang perlu dikedepankan adalah: Dari manakah masyarakat memperoleh suntikan energi kreatif untuk mengembangkan kebudayaan mereka? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan sebuah contoh. Di Pulau Bali ada acara tahunan Pesta Kesenian Bali (PKB) yang dilaksanakan sejak tahun 1978. Acara ini digelar selama satu bulan penuh pada bulan Juni-Juli. Pada acara tersebut ada berbagai kegiatan, misalnya pawai, pementasan, pameran, lomba, dan diskusi. Memang acara hanya berlangsung selama satu bulan, tapi sesungguhnya masyarakat telah berproses sepanjang tahun dalam mempersiapkan diri agar bisa berpartisipasi dalam acara tersebut. Proses persiapan dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Dalam proses panjang tersebut, disadari atau tidak, telah terjadi pembelajaran dan internalisasi atau penanaman intensif nilai-nilai dasar kultural di seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya, identitas kultural akan terus tumbuh dan bahkan semakin menguat, dan selanjutnya makin merekatkan masyarakat. Kegiatan tersebut memiliki daya rekat yang cukup tinggi karena sejumlah kepentingan masyarakat terakomodasi, bukan hanya demi program pemerintah daerah.

Di kawasan Tapal kuda, Pendalungan sebagai sebuah konsep budaya harus diberi ruang untuk berkembang dan memantapkan diri. Oleh karena itu rujukan terhadap pendapat Sutarto (2006) harus dipandang sebagai langkah awal. Misalnya Sutarto beranggapan bahwa ciri-ciri masyarakat Pendalungan adalah sebagai berikut:

- 1) Dominan agraris tradisional, berada di pertengahan jalan antara masyarakat tradisional dan masyarakat industri; tradisi dan mitos mengambil tempat yang dominan dalam kesehariannya.
- 2) Sebagian besar masih terkungkung oleh tradisi lisan tahap pertama (*primary orality*) dengan ciri-ciri suka mengobrol, ngrasani (membicarakan aib orang lain), takut menyimpang dari pikiran dan pendapat yang berlaku umum.
- 3) Terbuka terhadap perubahan dan mudah beradaptasi.
- 4) Ekspresif, transparan, tidak suka memendam perasaan atau berbasa basi.
- 5) Paternalistik: keputusan-keputusan bertindak biasanya mengikuti keputusan yang diambil oleh para tokoh yang dijadikan panutan.
- 6) Ikatan kekeluargaan sangat solid sehingga penyelesaian masalah seringkali dilakukan dengan cara keroyokan.
- 7) Sedikit keras dan temperamental.

Sebagaimana disarankan Arybowo (2010), globalisasi adalah jiwa zaman, sehingga perlu dihadapi dengan usaha rasional dan produktif dengan etos baru. Dengan cara itulah nantinya masyarakat Pendalungan dapat kembali membumi dengan lokalitas kebudayaan mereka sendiri.

JFC (Jember Fashion Carnaval)

Meskipun saya telah menyebutkan JFC (*Jember Fashion Carnaval*) di beberapa tempat di dalam buku ini, namun saya menganggap bahwa saya masih harus membicarakan JFC secara lebih khusus. Bagi saya, secara konseptual, masyarakat Pendalungan lebih dekat pada budaya urban daripada budaya agraris-tradisional, dan hingga saat ini JFC adalah representasi terbaik budaya urban masyarakat Pendalungan.

JFC adalah sebuah karnaval busana yang setiap tahun digelar di Jember. Acara ini digelar rutin setiap bulan Agustus, sejak tahun 2002. Perhelatan JFC melibatkan tidak kurang dari seribu orang, berparade di jalan raya sepanjang 3,6 kilometer, mulai dari Alun-alun kota hingga GOR Kaliwates. Para peserta memamerkan busana hasil rancangan mereka sendiri. Tema yang diusung setiap tahun selalu berbeda, disesuaikan dengan tren atau isu global yang terjadi pada tahun itu. Misalnya pada waktu Aceh dilanda bencana alam tsunami, tema yang diusung JFC adalah tsunami. Juga saat digelar Piala Dunia sepak bola empat tahun lalu, dalam parade ada defile yang menampilkan tema dunia sepak bola. Dalam setiap pergelaran tahunannya tersebut, JFC ditonton lebih dari 100.000 orang.

Kita harus memandang JFC sebagai bagian dari industri budaya kontemporer; dan pada dasa warsa terakhir seluruh dunia sedang bergerak ke arah itu. Industri budaya mencakup segala sesuatu yang menghasilkan produk pesan budaya dan

berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan dan dapat memengaruhi pandangan hidup, pikiran, sikap, perilaku, dan selera masyarakat yang mengkonsumsinya (Arybowo, 2010). Dengan meletakkan JFC sebagai bagian dari industri budaya, kini kita tidak perlu lagi bertengkar soal “apakah JFC itu kesenian?” atau “apakah JFC itu representasi masyarakat Jember (yang religius)?” atau “apakah JFC layak didukung?”

Referensi Historis JFC

Sulit untuk mengatakan bahwa JFC merupakan produk kultural masyarakat Jember yang dalam proses produksinya berlangsung dengan tanpa referen yang bersifat historis. Meskipun tampak mahal, glamor, modern, dan asing, namun sesungguhnya spirit JFC adalah lokal-tradisional. JFC adalah semangat global yang dilokalkan karena menemukan ladang yang memiliki tradisi karnaval. Jika seandainya pementasan *fashion* yang digagas Dynand Faris itu digelar di atas *catwalk* biasa, maka bagi mayoritas masyarakat Pendalungan JFC akan menjadi tontonan asing yang sulit untuk membumi. Di sini, dan bahkan di seluruh pelosok Indonesia, tidak ada tradisi *catwalk*. Tapi karena pertunjukan *fashion* tersebut digelar di jalanan, dengan tajuk ‘karnaval’, maka ia dengan mudah di-lokal-kan. Apakah Anda belum pernah nonton karnaval sebelum JFC muncul? Apakah Anda belum pernah mendengar kata karnaval sebelum JFC muncul? Tentu Anda sudah pernah nonton, atau bahkan terlibat di dalamnya, dan akrab dengan kata karnaval. Ada tradisi karnaval di sini. Dari kota ke kota, desa ke desa, setiap tahun sekali kita bisa menemukan acara karnaval dalam rangka peringatan 17 Agustusan. Kita tidak jarang terjebak kemacetan di sepanjang bulan Agustus karena di mana-mana ada karnaval. Kita juga bisa menemukan dengan cukup mudah acara karnaval khas dalam rangka ritual, yang di Jawa disebut

dengan *kirab*. Bedanya, jika kirab dicitrakan mistis-tradisional, karnaval sangat profan- kontemporer.

Catwalk adalah tradisi Barat, sedangkan karnaval adalah tradisi masyarakat Indonesia. Dengan demikian telah terjadi akulturasi budaya yang intens dalam proses kreatif JFC. Yang dimaksud dengan akulturasi, menurut Koentjaraningrat (1996), adalah suatu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan cara sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Jadi, kita berada pada suatu proses sosial yang disebut akulturasi manakala kebudayaan kita berhadapan dengan kebudayaan lain, kemudian kebudayaan lain tersebut kita terima dan kita serap ke dalam kebudayaann kita dengan nyaman tanpa menyebabkan hilangnya elemen-elemen kebudayaan kita. Atau dengan kata lain, kita memadukan secara kreatif antara kebudayaan kita dengan kebudayaan lain sehingga menghasilkan suatu produk budaya baru.

Fashion memang tradisi asing, tapi apa yang dilakukan JFC bukan semata-mata memindahkan yang asing tersebut ke Jember. JFC bukan Mardi Gras (Amerika) yang dipindah ke Jember. Juga bukan pemindahan lokasi Rio Carnival (Brazil) atau Notting Hill Carnival (Inggris) ke Jember. JFC memosisikan dirinya sebagai kreator dengan basis akulturasi budaya. Oleh karena itu dalam karya-karya JFC, selain terlihat elemen-elemen seni dari berbagai penjuru dunia, dapat dengan mudah kita temukan elemen-elemen Jawa, Madura, Kalimantan, Papua, Sumatra, serta aneka kekayaan desain lokal khas Indonesia lainnya. Dan jangan pernah lupa, meskipun kata 'karnaval' adalah kata serapan, tapi karnaval bukanlah tradisi asing bagi

kita. Ada karnaval 17-an di mana-mana di tanah air, juga kirab-kirab tradisional di berbagai ruang kultural daerah. Pada desain dan tradisi lokal itulah letak akar historis JFC.

Dari Personal ke Komunal

JFC, yang digagas Dynand Fariz, merupakan contoh kreasi yang lahir dari proses hibridisasi budaya. Dynand Fariz, sebagai pribadi, menempati posisi sentral dan menentukan. Namun dalam perkembangannya, JFC tidak bisa lagi dikategorikan sebagai karya personal. Ia telah membesar sedemikian rupa sehingga menjadi kreativitas komunal. Hal itu bisa terjadi karena (1) konsep JFC adalah pertunjukan massal, dan (2) JFC diterima publik sebagai milik mereka bersama.

JFC bukan *fashion show* biasa. Ia merupakan suatu genre seni pertunjukan yang menggabungkan antara peragaan busana dan karnaval. Lebih dari itu, busana yang diperagakan adalah hasil kreativitas para peserta. Artinya, setiap peserta harus menjadi *designer*—merancang sendiri kostum untuk dirinya, kemudian memeragakannya alias berperan sebagai model bagi rancangannya sendiri, termasuk menangani sendiri tata-rias wajah dan tubuhnya (*body painting*). Para peserta dalam memeragakan kreasinya tidak hanya berjalan seperti para model di atas *catwalk*, tetapi memperkaya penampilannya dengan unsur tari dan gerak-gerak teatral. Para peserta JFC dipersiapkan melalui *in house training*, diberi wawasan tentang merancang busana, tata-rias, *fashion run way*, dan sebagainya. Hal-hal semacam itulah yang menjadikan JFC menempati kategori sebagai karya komunal.

Selain berhasil melahirkan kreator-keator muda di bidang *fashion*, memberi suguhan hiburan segar bagi masyarakat, JFC juga berdampak secara ekonomi bagi Jember, paling tidak sebagai motor yang membantu pergerakan pertumbuhan

ekonomi. Menurut catatan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember, pengunjung yang datang setiap tahun sekitar 50.000 orang yang berasal dari luar Jember. Bahkan, tidak sedikit yang datang dari luar negeri. Mereka memiliki kepentingan dengan JFC, antara lain sebagai fotografer atau jurnalis. JFC juga telah mengilhami enam provinsi untuk menggelar kegiatan serupa, yakni Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. Keenam provinsi tersebut bekerja sama dengan JFC untuk menggelar karnaval, dan agar terdapat standardisasi karnaval, baik secara nasional maupun internasional, dibentuklah Asosiasi Karnaval Indonesia (Akari). Dynand Fariz, Presiden JFC, ditunjuk sebagai ketua.

JFC, sebuah Tradisi

Bagaimanakah posisi JFC di tengah-tengah masyarakat Jember yang terus berproses mengembangkan kebudayaannya?

Masyarakat Jember, sebagaimana masyarakat Pendalungan lainnya, terdiri atas orang-orang merdeka yang tidak terpenjara dalam kerangkeng sejarah kebudayaannya sendiri. Mereka tidak memiliki beban kultural yang berat, yang mengharuskan mereka taat pada tradisi adiluhung warisan nenek-moyang. Inilah alasan utama mengapa masyarakat Pendalungan begitu mudahnya menyerap produk budaya yang “sangat asing”, kemudian membumikannya sehingga menjadi tradisi yang mewarnai kehidupan masyarakat.

Hasilnya?

JFC bisa menjadi contoh paling nyata.

Pada tahun-tahun awal kehadiran JFC, secara kultural masyarakat belum siap menerimanya. JFC menyuguhkan pada masyarakat sebuah lompatan budaya yang terkesan mendadak dan tanpa landasan historis sehingga memberi beban kultural yang cukup berat pada masyarakat. Masyarakat Jember, sebagai

tuan rumah perhelatan JFC, membutuhkan waktu sekitar lima hingga delapan tahun untuk melewati masa transisi, dari menolak hingga menerima JFC. Pertanyaannya, setelah melewati masa transisi itu, apakah masyarakat sudah bisa menerima produk-produk budaya lain sekaliber JFC? Tampaknya sebagian masyarakat Indonesia sudah bisa menerima. Salah satu indikatornya, sebagian masyarakat Indonesia ingin dan telah mereproduksi keberhasilan JFC dengan berbagai bentuk dan versi.

Sementara itu, pada saat ini sebagian masyarakat Indonesia lainnya masih berada di *extended transition phase*, yakni membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk secara moral, mental, dan kultural, bisa menerima karya cipta seperti JFC atau sejenisnya. Namun demikian tidak berarti mereka *udik*, *ndesit*, ketinggalan jaman, atau semacam itu. Mungkin saja mereka punya selera lain dan JFC tidak bisa dijadikan indikator.

Pada saat sekarang memang JFC baru berumur 15 tahun, belum dua atau tiga generasi sebagaimana biasa dipersyaratkan pada sesuatu untuk layak dianggap sebagai sebuah tradisi. Saya tidak sepenuhnya menyepakati anggapan semacam itu. Harus kita lihat kasusnya. Saya kira 15 tahun yang telah dilalui dengan keajegan yang terjaga, serta dampak sedahsyat itu, JFC layak untuk disebut sebagai sebuah produk kultural tradisional masyarakat Pendalungan. Bahkan Banyuwangi dan Solo yang selama ini dikenal sebagai daerah kaya-raya dalam hal produk budaya tradisional, tidak mampu melakukannya. Jadi, tradisi juga mencakup berbagai aktivitas yang tidak dilakukan secara turun-temurun, namun memiliki tingkat keajegan yang memadai, serta memiliki dampak signifikan bagi masyarakat yang melaksanakannya.

Inilah saatnya kita mengkaji ulang makna kata "tradisional". Dalam kerangka pengembangan seni-budaya daerah, pemakaian

kata "tradisional" ini saya rasa masih diperlukan. Tetapi sesungguhnya ketika kita sungguh-sungguh menguji dengan data sejarah, konsep para seniman tentang "tradisi" seringkali hanya sebatas kulit dan dalam beberapa hal justru bersifat sangat kontemporer.

Dalam menilai JFC, kita tidak bisa hanya berdasar pada *grand show* yang ditampilkan selama beberapa jam di hamparan *catwalk* jalanan sepanjang 3,6 km itu saja. Ada proses panjang yang telah dilewati sebelum karnaval busana itu digelar. Selama berbulan-bulan para peserta dididik dan digembleng di ruang-ruang kelas, baik secara teoritis maupun praktik, bagaimana menjadi seorang kreator. Maka yang tampil di *catwalk* jalanan itu bukan hanya seorang model, atau seorang peraga, tetapi sekaligus seorang kreator.

Menyikapi JFC

Di wilayah Pendalungan, yang masyarakatnya secara kultural dianggap "tidak memiliki apa-apa", para seniman justru memiliki keuntungan lebih besar dibanding mereka yang berada di wilayah mapan seperti Banyuwangi, Ponorogo, Solo, dan sebagainya. Para seniman Pendalungan tidak perlu repot-repot mencari akar pijakan filosofis yang rumit dalam berkesenian, sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam berkarya. Maka tidak mengherankan jika kemudian lahir produk budaya yang liar, memberontak, tidak *mainstream*, seperti JFC.

Setelah memperhatikan perkembangan JFC, sekarang tentu saja kita boleh bertanya-tanya, atau merasa khawatir, terhadap kelangsungan "keajaiban perkembangan pariwisata budaya Banyuwangi" yang mungkin dibangun berdasarkan landasan yang lemah. Betapa tidak? JFC, dengan segala keterbatasan anggarannya, mampu menarik lebih banyak kehadiran turis

asing ketimbang Banyuwangi dengan limpah-ruah kekayaan seni-budaya dan promosi agresif ratusan milyarnya.

Ketika Jember menjadikan JFC sebagai ikon pariwisata budaya daerah, hal itu merupakan keputusan yang strategis. Lahirnya produk budaya yang mendapat sambutan luas secara nasional maupun internasional seperti JFC ini tidak hanya patut disyukuri, karena telah membawa dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Jember pada khususnya, serta Indonesia pada umumnya, namun harus disikapi secara rasional. Artinya, semua pihak tidak hanya memetik manfaat ekonomis sebesar-besarnya atas penyelenggaraan JFC, namun juga harus turut menjaganya agar tidak sampai menyeret masyarakat pada suatu gaya hidup baru yang hanya menonjolkan sisi hiburan dan bisnisnya. Kehadirannya tidak boleh menjauhkan masyarakat dari kebanggaan terhadap kekayaan budaya sendiri.

Kaum intelektual di lingkungan perguruan tinggi harus membantu mendorong pertumbuhan industri budaya menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan pada akhirnya meningkatkan derajat kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jika tanpa wawasan kultural dan filosofis, industri budaya akan menuntun lahirnya manusia berkacamata kuda, alias manusia berdimensi tunggal. Herbert Marcuse (1964) telah mengkritik masyarakat di negara-negara maju, seperti di Jerman, yang mengalami kegoncangan dan keterasingan dengan dunianya karena telah berubah menjadi manusia berdimensi tunggal. Padahal secara kodrati manusia itu multidimensi.

City Branding: Jember Kota Pandalungan

Pandalungan, Gairah Baru

Dalam waktu relatif pendek, masyarakat Jember telah dibombardir topik hangat mengenai Pandalungan. Pada tanggal 2 Mei 2016, Rumah Budaya Pandhalungan dan Komunitas Pandhalungan diresmikan di Desa Ajung, Jember. Dua hari berikutnya, yakni pada tanggal 4 Mei, RRI Jember mengadakan Sarasehan Budaya Pandhalungan, menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai kalangan.⁹ Dan yang paling heboh, pada tanggal 13-14 Mei, Kantor Pariwisata Jember menggelar Festival Pandhalungan, di mana pada puncaknya Bupati Jember mencanangkan Jember sebagai Kota Pandhalungan. Uniknya, ketiga acara tersebut berdiri sendiri-sendiri, bukan suatu rangkaian yang telah dipersiapkan dan dirancang sebelumnya.

Gairah apakah yang menjangkiti masyarakat Jember, sehingga menghadirkan topik tersebut? Secara substansial, saya melihat hal itu sebagai sebuah desain untuk “menjual daerah”. Sebuah kesadaran mengenai *city branding strategy*.

Sejak beberapa tahun yang lalu, kita menyaksikan tayangan iklan pariwisata di televisi “Malaysia Truly Asia”, dengan intensitas penayangan yang cukup tinggi. Itu adalah upaya yang dilakukan Malaysia untuk menjual potensi wisata negaranya ke

⁹ Saya turut diundang dalam forum ini sebagai salah seorang pembicara. Makalah yang saya presentasikan berjudul “Memahami Masyarakat dan Kultur Pandalungan”.

seluruh dunia. Sungguh sulit dibayangkan, dalam era millenium seperti sekarang ini, Malaysia justru menyetempel atau melabeli dirinya sebagai: asli Asia! Dan hasilnya? Dalam beberapa tahun terakhir kunjungan wisatawan asing ke sana melonjak drastis (Indonesia masuk tiga besar pengunjung ke Malaysia). Jumlah wisatawan asing yang datang ke Malaysia jauh mengungguli Indonesia serta beberapa negara tetangga lainnya. Itulah yang disebut dengan *branding*.

Malaysia, Singapura, dan Thailand adalah tiga negara tetangga kita yang menyadari pentingnya *branding*. Mereka membuat konsep yang mengedepankan keunikan negara masing-masing, kemudian memublikasikannya ke seluruh dunia dengan sangat serius dan terencana melalui berbagai media massa. Di Indonesia saja, pada masa awal promosinya, Malaysia mendirikan dua buah “posko” sosialisasi “Malaysia Truly Asia”, satu di Jakarta dan lainnya di Medan. Berkali-kali Deputi Menteri Pariwisata Malaysia *keluyuran* ke beberapa kota besar di Indonesia, mengundang sejumlah kalangan untuk *dinner* di hotel berbintang lima, sembari mengiklankan alangkah nyaman bila melancong ke negaranya.

Sebagaimana yang dilakukan Malaysia, apa yang dilakukan Pemkab Jember dengan memberi julukan pada kota Jember sebagai “Kota Pandhalungan” pada dasarnya merupakan konsep *city branding*. Hal semacam ini sebelumnya sudah sering dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya pada era Orde Baru. Saya mempunyai beberapa catatan mengenai *branding* di kota-kota lain di Indonesia, yang biasanya tidak disertai implementasi yang sungguh-sungguh nyata dan berkesinambungan.

City branding seringkali disimplifikasikan sebagai persoalan menciptakan logo, *tagline*, dan promosi segencar-gencarnya. Persoalan yang sesungguhnya adalah jauh lebih

dalam lagi, dan oleh karenanya harus dipandang dengan perspektif holistik dan komprehensif. Sebuah strategi boleh diawali dengan kata-kata, tapi selanjutnya harus diwujudkan dengan tindakan nyata yang terencana. Logo dan *tagline* hanyalah gambaran visi bersama, dan tidak akan berdampak cukup berarti tanpa tindakan nyata. Promosi hanya menghasilkan perhatian dan ketertarikan sesaat, namun kecil kemungkinannya untuk dapat mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan yang kita harapkan.

Tujuan akhir sebuah *branding*, jika diletakkan di ranah pariwisata, adalah memikat para wisatawan agar sudi berkunjung. Itu berarti devisa bagi daerah/negara. Selain itu, proses *branding* akan membuka atau menggairahkan beberapa lapangan kerja bagi masyarakat. Perajin, misalnya. Bukankah para turis gemar membeli souvenir untuk kenang-kenangan? Sektor-sektor lain yang dikelola masyarakat, misalnya hotel dan restoran, juga akan ikut menikmatinya. Oleh karena itu semakin panjang *length of stay* para wisatawan semakin besar keuntungan yang akan diperoleh masyarakat.

Sekali lagi, apa yang harus dipahami adalah bahwa *branding* bukan hanya persoalan beriklan. *Branding* adalah masalah yang sangat kompleks. Bukan saja mengenai pengelolaan tempat wisata yang indah dan menarik, sarana jalan dan transportasi yang memadai, penginapan dan makanan yang mengesankan, serta sikap masyarakat yang santun, tapi juga upaya pencitraan secara menyeluruh. Maka, jika Jember ingin mewujudkan *city branding*, hal itu tidak mungkin dipikul Dinas Pariwisata sendirian. Seluruh komponen masyarakat Jember harus terlibat. “Menjual Jember” tidak berarti Pemkab hanya menawarkan eksotisme Jember pada orang luar, tetapi pada saat yang sama juga *selling the brand inside*, terus-menerus “menerpa” benak masyarakat dengan *brand* yang kita tawarkan.

Upaya internalisasi nilai-nilai semacam ini tidak bisa instan. Proyek ini adalah proyek sosio-kultural yang ambisius, sebuah variabel jangka panjang. Nah, di sinilah antara lain urgensi keterlibatan “gerakan publikasi”.

Oleh karena itu akan lebih efektif bila *city branding* didukung dengan *mass campaign strategy*. Singapura berhasil melakukan *mass campaign*, alias mengiklankan diri dengan memberi penekanan pada beberapa negara sekaligus. Negara yang mem-*branding* dirinya sebagai “New Asia” itu kini tidak hanya didatangi orang-orang kaya yang ingin berbelanja, tapi juga mereka yang ingin berobat dan menimba ilmu. Dokter-dokter dan rumah sakit terbaik ada di sana, para ilmuwan dan perguruan tinggi terbaik juga ada di sana. Hal ini tidak dicapai Singapura secara mudah dan instan. Melalui *Great Sale* yang dilakukan perwakilan *Singapore Tourism Board* di berbagai negara, Singapura terus mengiklankan dirinya sebagai sebuah negara dengan *new opportunities and lifestyle*.

Yogyakarta sudah pernah mencoba mem-*branding* dirinya sebagai sebuah kota dengan label “Never Ending Asia”. Tidak main-main, Hermawan Kertajaya, seorang tokoh *marketing* kenamaan, yang ditunjuk sebagai konseptornya. Tapi proyek itu ternyata gagal total, jauh dari capaian minimum yang diharapkan. Alasannya klasik: implementasi yang buruk di lapangan. Dan berikutnya Jakarta getol mempromosikan “Enjoy Jakarta”. Apakah berhasil? Hingga saat ini saya belum tahu pasti karena belum ada kajian yang dipublikasikan mengenai hal itu.

Beberapa Pelajaran

Identitas yang *marketable* sungguh sulit diperoleh. Begitu sulitnya, sehingga banyak daerah di berbagai penjuru tanah air yang melakukan *branding* secara serampangan, dan akhirnya mubazir. Kediri memang memiliki produk tahu spesial, yang

berbeda dari daerah-daerah lain, tapi apakah sebutan “Kota Tahu” cukup mengundang selera turis? Apa sebutan itu membanggakan masyarakatnya? Apa yang dijanjikan Situbondo sebagai “Kota Santri” bagi para pelancong? Surabaya menyebut dirinya “Kota Pahlawan”, tapi justru telah menghancurkan-leburkan banyak bangunan bersejarah. Bukti kepahlawanan apa yang bisa dilihat dan dinikmati para turis? Di sini tampak bahwa *branding* yang dilakukan menegasikan kualitas, hanya nama, hanya bersifat permukaan saja.

Dinas Pariwisata DKI Jakarta, misalnya, untuk mem-*branding* kota Jakarta terlebih dahulu melakukan beberapa tahap aktivitas. Pertama, melakukan *consumer audit*, yakni menyebar kuesioner pada para wisatawan, menanyakan persepsi dan kesan mereka tentang Jakarta. Kedua, melakukan *travel show audit*, atau datang ke pameran-pameran, *travel markets*, untuk mengetahui pandangan mereka tentang Jakarta. Ketiga, melakukan *communication audit*, yakni meneliti apa dan sejauh mana yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama ini untuk mengkomunikasikan Jakarta. Keempat, melakukan audit ke CEO perusahaan-perusahaan penerbangan, biro perjalanan, asosiasi, dan lain-lain. Kelima, melakukan *competitor audit*, menyimak apa saja yang telah dilakukan oleh para kompetitor. Dan pada akhirnya, berdasarkan pada langkah-langkah tersebut dapat diketahui bahwa Jakarta cukup memberikan *enjoyable experience*, sehingga dipilihlah *tag line* “Enjoy Jakarta”.

Di luar negeri, telah sejak lama kota-kota membranding dirinya. Adelaide (sebuah kota di Australia Selatan), misalnya, pada tahun 2013 menghabiskan dana lebih dari A\$ 1 juta (sekitar Rp.10 Milyar) untuk sebuah logo baru. Contoh lain adalah Mississauga, kota terbesar keenam di Kanada. Kota berpenduduk 757.000 jiwa ini berusaha membangun citra diri sebagai magnet baru bagi dunia internasional. Itu tidak mudah

karena harus keluar dari bayang-bayang kota Toronto, yang berjarak sekitar 30 km. Dengan *tagline* "Fokus pada Masa Depan", strategi yang dikembangkannya adalah "*a multi-year brand-building*". Untuk itu Mississauga melakukan banyak hal, termasuk merancang bisnis regional dan global, mencoba menarik perhatian dan minat masyarakat internasional dengan menawarkan lingkungan hidup dan suasana yang berkualitas tinggi, program layanan dan penyambutan yang terencana dengan baik. Kota ini mengubah dirinya menjadi tempat yang sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Pemerintah Kota membentuk tim pelaksana proyek, dengan tugas yang harus dilaksanakan: (1) mempromosikan kota Mississauga sebagai tempat yang dinamis dan nyaman untuk hidup, bekerja, belajar, dan berekreasi; (2) menciptakan narasi yang menarik untuk merangkul masyarakat kota secara keseluruhan; dan (3) mengedukasi khalayak internal – para pegawai negeri, mitra kunci, serta warga untuk menjadi duta bagi nama baik kota mereka. Perencanaan proyek *branding* ini dimatangkan oleh survei masukan dari 500 warga dan 100 pengusaha kecil, wawancara dengan 23 anggota Dewan Kota Mississauga, para mitra, ditambah dengan pelaksanaan empat lokakarya *branding* dengan lebih dari 100 peserta (pegawai Pemerintah Kota, penduduk, pebisnis, dan LSM).

Selain mahal, proyek *city branding* bukan perkara mudah. Menurut North (2014), kegagalan kampanye *city branding* mencapai 86%. Ini tentu saja angka yang cukup mengejutkan. North melihat bahwa pelaksanaan kampanye-kampanye tersebut oleh para pejabat kota dianggap dapat merevitalisasi kota mereka dan menjadikannya tempat yang lebih menonjol di peta. Namun pada akhirnya, para pejabat kota tersebut menemukan bahwa harapan mereka sia-sia belaka: *city branding* hanyalah petasan basah yang sudah terlanjur dibeli dengan harga mahal.

Jadi, mengapa setiap kota seolah-olah harus melakukan *branding*? Menurut North, dari perspektif internasional, merek besar merupakan aset berharga. Ia dapat membantu sebuah kota untuk menarik wisatawan, investor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Ia dapat membantu meningkatkan ekspor. Dan ia dapat meningkatkan kebanggaan seluruh warga kota.

Mencari *Trademark* untuk Jember

Menurut José Torres dari Bloom Consulting (dalam North, 2014), "Selalu ada sesuatu yang khusus pada setiap kota. Oleh karena itu *city branding* bukan persoalan menciptakan sesuatu, melainkan tentang menemukan apa yang sesungguhnya sudah ada." Nah, merujuk pada pendapat Torres tersebut, manakah yang lebih tepat frasa yang dijadikan sebagai *trademark* dalam rangka pengembangan pariwisata Jember: Jember Kota Suwar-suwir, Jember Kota Tembakau, Jember Kota Seribu Bukit, Jember Kota Karnaval, atau Jember Kota Pendalungan?

Sehubungan dengan suwar-suwir dan tembakau, saya teringat pada Pak Sutikno, mantan pimpinan Bank Indonesia Jember yang pernah menyarankan agar stempel 'Kota Suwar-suwir' bagi Jember diganti dengan 'Kota Tembakau'. Alasan beliau, suwar-suwir tidak mencitrakan hal utama, baik sebagai produk akhir, bahan, maupun nilai ekonominya. Sebaliknya, tembakau adalah sebuah komoditas yang secara nyata disangga masyarakat luas di daerah Jember, dan mampu menautkan daerah ini dengan dunia internasional. Negara memperoleh devisa cukup besar dari ekspor tembakau. Tapi buru-buru Prof. Ayu Sutarto, seorang peneliti budaya dan guru besar Universitas Jember, memberi *warning* pada kita tentang konsekuensi tembakau sebagai *trademark*. Dan kita semua tahu, dunia kesehatan internasional sangat memusuhi tembakau. Kampanye soal ini terus bergulir tanpa ada pihak yang bisa membendung.

Ada “hari tanpa tembakau”, dan ruang bagi para perokok makin dipersempit di mana-mana di seluruh dunia.

Memang, kedua pandangan tersebut tidak salah. Bila kita mem-*branding* Jember, kita harus menemukan *tag line*, yakni frasa atau kalimat yang kita pergunakan sebagai slogan, seperti *Jogja never ending Asia*, *Enjoy Jakarta*, atau *Malaysia truly Asia*. Nah, dengan rekayasa apa pun, suwar-suwir dan tembakau cukup sulit untuk dimasukkan ke dalam sebuah *tag line* yang sanggup menyenangkan banyak pihak.

Bagaimana dengan “seribu bukit”? Sebaiknya kita lupakan frasa yang satu ini karena begitu parahnya tindakan perusakan lingkungan yang terjadi di Jember. Memang Jember memiliki lebih dari 1.500 buah bukit (masyarakat Jember menyebutnya *gumuk*). Akan tetapi bukit-bukit tersebut terancam punah karena penambangan batu dan pasir yang terkandung di dalam bukit-bukit tersebut. Tanpa campur tangan dan ketegasan Pemkab, dua atau tiga dasa warsa mendatang mungkin tidak ada bukit lagi di seantero kabupaten ini.

Selanjutnya, bagaimana dengan Jember Kota Karnaval? Ya, memang di Jember ada JFC sejak tahun 2003, dan selalu mendapat respons luar biasa dari masyarakat Jember dan sejumlah kalangan di tanah air dan bahkan luar negeri. Harus diakui bahwa keberadaan JFC sungguh strategis dan sudah terbukti berpotensi besar mengibarkan panji eksistensi pariwisata Jember ke dunia internasional. Karenanya harus diapresiasi dan didukung. Tapi membranding Jember sebagai Kota Karnaval masih belum memiliki dasar-dasar argumentasi yang memadai. Untuk menjadikan Jember sebagai Kota Karnaval yang sesungguhnya, harus ditancapkan sebanyak-banyaknya tiang penyangga, bukan hanya tiang tunggal.

Kedudukan *tag line* ini cukup penting, karena dari situlah kita mulai membangun *mind identity* (segala sesuatu yang

dipikirkan) masyarakat. Misalnya kita telah sepakat untuk menganggap bahwa Jember adalah produk *melting pot* Jawa-Madura-Using, lalu kita bersepakat menganggap masyarakat Jember sebagai masyarakat “Pendalungan” alias “Jawa/Madura Baru”. Maka yang kemudian harus ditanamkan pada benak masyarakat adalah: “Kita bukan Jawa, bukan Madura, bukan Using. Kita adalah Pendalungan!” *Mind identity* ini, jika tersemaikan dengan baik, secara bertahap akan tumbuh dan berkembang menjadi *behaviour identity* (segala sesuatu yang dilakukan), yang kemudian membuahkan *visual identity* (segala sesuatu yang tampak).

Slogan tempo dulu “Jember Terbina” bukanlah *tag line* yang ideal untuk mem-*branding* Jember. Keadaan suatu daerah yang “tertib, bersih, indah dan aman” adalah idaman setiap daerah, dan kondisi ini akan dikejar oleh daerah mana pun. Oleh karena itu tidak ada yang spesifik di dalamnya. Contoh daerah yang lumayan bagus dalam mem-*branding* dirinya adalah Ponorogo, yang menganggap dirinya sebagai “Kota Reyog”. Saya menilainya sebagai sebuah penggalian identitas yang tepat. Di Ponorogo, Reyog ada di dalam pikiran setiap warganya (*mind identity*). Sikap mereka terhadap Reyog positif (*behaviour identity*), sehingga Reyog terus ada dan bisa disaksikan (*visual identity*). Contoh lain adalah Banyuwangi. Daerah ini sangat beruntung memiliki kesenian Gandrung, yang hingga kini terus hidup subur di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga bisa menganggap dirinya sebagai “Kota Gandrung”. Bali dengan tradisi dan ritualnya, di mana pernik-pernik budaya dan kesenian yang eksotis memberi warna, sangat pantas menyebut dirinya “Pulau Dewata”.

Maka, pada akhirnya, bila ada wisatawan yang datang berkunjung ke Jember, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, mereka tidak akan merasa tertipu oleh promosi

yang telah mendorong kehadiran mereka. Pertama, mereka ingin melihat *visual identity* yang berada di lingkaran paling luar, kemudian *behaviour identity* pada lingkaran yang lebih dalam, dan pada akhirnya *mind identity* pada lingkaran terdalam. Apa yang ada di dalam materi promosi ada dalam kenyataan.

Wacana Baru: Jember Kota Pendalungan

Bupati Jember, dr. Faida, MMR., telah mencanangkan Jember sebagai Kota Pendalungan. Hal ini, pertama-tama, harus dibaca sebagai niat baik Pemkab Jember dalam membangun masyarakat. Melegitimasi masyarakat Jember sebagai masyarakat Pendalungan merupakan suatu praktik ideologis-politis yang, menurut dugaan saya, dilakukan dalam rangka membentengi masyarakat Jember dari berbagai pengaruh budaya asing yang tidak terkendali. Selain itu, pengentalan identitas kultural Pendalungan yang dilakukan Bupati tersebut dapat dibaca sebagai bahasa perlawanan, atau sikap kehati-hatian, terhadap arus globalisasi yang tidak terkendali. Identitas Pendalungan diharapkan mampu menjadi perekat bagi masyarakat Jember untuk memperkuat jati diri dalam menghadapi perkembangan jaman.

Benteng kultural yang senagaja dibangun berdasarkan ekosistem dan kearifan lokal semacam ini tampaknya akan lebih mudah diterima masyarakat karena kontekstualitas dan rasionalitasnya cukup tinggi. *Tag line* “Jember Kota Pendalungan” adalah sebuah ajakan untuk bertransformasi: dari kondisi egoisme etnosentris menuju masyarakat yang harmonis, dari masyarakat yang tidak memiliki kejelasan perspektif menuju masyarakat yang membumi. Bu Faida memulainya dengan sebuah slogan.

Slogan baru ini bisa kita diskusikan dari berbagai aspek, misalnya perihal isinya (kultural, politis, historis, kecerdasan konsep makna), bentuknya (pilihan kata, keindahan bunyi), dan implementasinya (kontekstual atau tidak, rasional atau tidak). Namun di atas semua itu, slogan yang baik biasanya dapat berumur panjang asalkan rasional dan ditunjang konsep komunikasi (serta komunikator) yang tepat. Dan slogan yang baik akan menjadi abadi, bila berada di ranah yang kontekstual, lalu diimplementasikan secara luwes dan berkesinambungan. Abadi adalah berguna sekaligus bermakna. Artinya, slogan yang baik sangat mungkin untuk digunakan sebagai *starting point* menuju titik tertentu yang dituju, di mana sebuah makna yang diimpikan dapat diperoleh. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan Pemkab di bidang sosio-kultural harus didasarkan pada etika sosial, nilai-nilai tradisi, dan norma-norma agama yang dianut masyarakat Jember, menghindari kepentingan atau pragmatisme politik yang bersifat jangka pendek.

Sejak tempo dulu, orang Jawa sudah mengenal istilah *desa mawa cara, negara mawa tata*. Berarti konsep penanganan suatu wilayah yang dituangkan dalam sebuah slogan sudah lama ada. Namun demikian belum ada satu pun sumber sejarah yang dapat menggambarkan secara tepat pada kita, prestasi seperti apakah yang telah dicapai orang Jawa waktu itu, dan bagaimana prestasi itu dapat diraih. Yang dapat kita ketahui adalah bahwa sejauh ini Indonesia belum pernah benar-benar berhasil dalam “membangun desa dan kota”. Setidaknya secara substansial. Kalau secara struktural keberhasilan itu relatif mudah ditemukan, dan memang dalam hal ini Orba adalah jagonya.

Pertanyaannya, apakah kegagalan tersebut terletak pada tataran konsep, ataukah pada tahap implementasi? Kalau konsepnya yang salah, bisa dipastikan implementasinya akan mengalami kegagalan pula. Seperti halnya seorang dokter yang

mendiagnose pasien. Bila diagnosenya salah, obat yang diberikan pada si pasien tentu akan salah juga. Tapi kalau dengan diagnose dan obat yang salah tersebut ternyata pasiennya dapat sembuh, itulah yang namanya *ndilalah*, alias serba kebetulan. Tentunya kita tidak ingin membangun tanah air dengan jurus semacam itu. Oleh karenanya, belajar dari berbagai keberhasilan dan kegagalan proyek sejenis sebelumnya, pertama-tama harus jelas konsep atau *special design* di belakang penancangan Jember sebagai Kota Pandalungan. Persoalan konsep ini harus menjadi pemikiran serius. Pemkab perlu membuka diri terhadap gagasan inovatif-kreatif dari pihak mana pun datangnya. Berbagai komponen masyarakat perlu didengar suaranya. Dan bila perlu, ke depan konsep “Kota Pandalungan” dikembangkan lagi hingga menjadi “Bumi Pandalungan”. Artinya, identitas kultural Pandalungan tidak hanya disandang oleh masyarakat di wilayah perkotaan, tetapi meliputi seluruh warga Kabupaten Jember.

Apakah slogan Jember Kota Pandalungan bisa menjadi slogan abadi dalam benak setiap warga Jember, ataukah akan lenyap berbarengan dengan spanduknya yang diturunkan, hanya waktu yang akan membuktikannya.

Pendalungan dan Jagat Pariwisata

Pariwisata adalah salah satu fenomena dunia modern yang mencengangkan. Dari tahun ke tahun jumlah total wisatawan internasional menunjukkan pertumbuhan yang begitu fantastis, dari 25 juta orang pada tahun 1950 menjadi 278 juta orang pada tahun 1980, kemudian 528 juta orang pada tahun 1995, dan 1,1 milyar orang pada tahun 2014. Sektor pariwisata menyediakan 1 dari 11 lapangan kerja yang dapat diserap masyarakat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada saat ini semakin banyak negara di seluruh dunia memilih menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan (*leading sector*).

Sejalan dengan realitas pariwisata dunia, pariwisata Indonesia mengalami tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada kondisi mutakhir, pariwisata berada pada peringkat ketiga penyumbang terbesar bagi kinerja perekonomian nasional. Tahun 2014 industri pariwisata menyumbang 9% terhadap capaian PDB Indonesia dengan kontribusi sebesar Rp140 triliun. Sektor ini juga berhasil menyediakan lapangan pekerjaan bagi 11 juta jiwa. Dengan kunjungan 9 juta wisatawan mancanegara di tahun 2014, industri pariwisata pada tahun 2019 ditargetkan mampu memberi sumbangan sebesar 15% terhadap PDB, atau sebesar Rp 280 triliun, dan menyerap 13 juta tenaga kerja melalui 20 juta kunjungan wisman. Portofolio pariwisata Indonesia adalah dengan komposisi: wisata budaya (60%), wisata alam (35%) dan wisata buatan (5%) (Ratman, 2016).

Berasarkan data di atas, kiranya tidak berlebihan jika sektor pariwisata pada saat ini menjadi prioritas pemerintah dan sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk menambah anggaran *marketing* pariwisata sebesar 4 hingga 5 kali lipat dari sebelumnya. Pada tahun 2015 anggaran pariwisata di APBN sebesar Rp 2,4 triliun, pada tahun 2016 melonjak drastis menjadi Rp 5,4 triliun. Anggaran untuk *marketing* yang semula sebesar Rp 300 miliar di tahun 2015, melonjak jadi Rp 1 triliun di tahun 2016. Pada tahun 2017 anggaran untuk pemasaran tersebut akan dinaikkan lagi menjadi Rp 2 triliun. Dana sebesar itu tentunya cukup untuk membiayai pembuatan dan pendistribusian iklan pariwisata Indonesia di seluruh dunia.

Sejauh ini Indonesia hanya berani menargetkan kunjungan 20 juta wisman pada tahun 2019, padahal pada tahun 2014 saja Malaysia sudah mampu mendatangkan 27,4 juta wisman dan Thailand 24,8 juta wisman. Menurut *World Economic Forum (WEF)*, posisi dunia pariwisata Indonesia pada *Travel & Tourism Competitiveness Index 2015* adalah pada peringkat 50 dunia, meningkat cukup tajam dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 70. Destinasi unggulan pariwisata Indonesia saat ini ditempati oleh Bali yang menyumbang 40% wisman, Jakarta 30%, dan Kepulauan Riau 20%.

Dalam beberapa dasa warsa terakhir, di Indonesia mulai banyak daerah yang mencapai sukses dalam upaya menjadikan pariwisata sebagai *brand image*. Tingkat keberhasilan beberapa daerah dalam mengembangkan pariwisata biasanya terkait langsung dengan besarnya keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan pariwisata sebagai *leading sector*, dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Artinya, dalam jangka menengah dan

jangka panjang pariwisata memang sengaja diprioritaskan dan dijagokan, tidak sekedar ditangani sambil lalu.

Ke depan, pengembangan dunia pariwisata akan menjadi pilihan yang tak terelakkan bagi semua bangsa di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia juga telah mulai bersungguh-sungguh mengembangkan pariwisata, baik wisata alam maupun budaya, meskipun upaya ini terhitung terlambat jika dibanding beberapa negara tetangga, misalnya Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pariwisata Indonesia hanya menempati peringkat ke 74 dari 139 negara. Indonesia masih kalah jauh dengan Singapura yang mencapai peringkat 10 dan Malaysia di peringkat 35. Meskipun secara internal kunjungan wisatawan ke Indonesia mencapai rekor tertinggi pada tahun 2013, yakni 8,8 juta jiwa, namun perolehan itu masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Malaysia, misalnya, mampu mendatangkan 24,7 juta wisatawan. Dalam hal pendapatan dari pariwisata pun Indonesia kalah jauh. Pendapatan tertinggi Indonesia, yang diterima pada 2013, mencapai US\$ 10 miliar, sementara Thailand sudah mampu memperoleh tiga kali lipatnya pada tahun 2011, yakni US\$ 30,9 miliar.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah telah mendorong destinasi-destinasi wisata unggulan baru yang patut dipromosikan secara internasional, salah satunya adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BTS) di Jawa Timur. Pemerintah telah membentuk Badan Otoritas Bromo Tengger Semeru menyusul masuknya obyek wisata bertaraf internasional ini dalam 10 destinasi wisata secara nasional. Badan Otoritas ini mulai aktif pada bulan Mei 2016. Pembentukan Badan Otoritas BTS ini terutama dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi kunjungan wisata di daerah ini. Ada tiga rencana prioritas yang menjadi sasaran Badan Otoritas BTS ini yakni soal aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Persoalan aksesibilitas ini menyangkut

infrastruktur seperti sarana dan prasarana. Kawasan Taman Nasional BTS ini meliputi empat wilayah kabupaten yakni Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Artinya, akses dari empat daerah ini menuju kawasan Bromo harus benar-benar disiapkan. Faktor amenitas menjadi salah satu faktor penting, meliputi sarana pendukung, misalnya bagaimana keberadaan bandar udara serta pelabuhan. Atraksi wisata berupa keindahan alam maupun keunikan budayanya. Kunjungan wisata ke daerah ini ditarget 1 juta orang pada 2019 mendatang.

Untuk memaksimalkan Bromo sebagai kawasan wisata utama, perlu pengembangan destinasi penunjang di masing-masing daerah pendukung. Kawasan Pendalungan memiliki peluang besar untuk hal itu.

Pendalungan sebagai Zona Pariwisata

Menjadikan kawasan Pendalungan sebagai zona pariwisata, mungkinkah? Bagi seorang kepala daerah yang visioner seperti bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, hal itu tidaklah jauh panggang dari api. Dalam waktu relatif singkat dia telah berhasil menjadikan Banyuwangi sebagai zona pariwisata nasional yang diperhitungkan. Sayang sekali tidak banyak kepala daerah yang visioner seperti dia. Meskipun banyak daerah telah menyadari manfaat besar yang dapat diperoleh dari sektor pariwisata, namun sangat sedikit yang bersungguh-sungguh dalam menangani dan mengembangkan pariwisata.

Pemkab Banyuwangi tampaknya sangat menyadari daya jual lingkungan alam serta kebudayaan masyarakatnya, sehingga sektor pariwisata mendapat perhatian yang cukup besar. Memang telah terbukti bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara cepat, mampu menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan dan standar hidup masyarakat, serta

merangsang pertumbuhan sektor-sektor produktif lainnya. Dengan kata lain, pada masa kini pariwisata merupakan sektor potensial bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan mempunyai efek berantai yang cukup panjang. Banyak bidang usaha di sektor pariwisata terkait langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Pendit (1990), sektor pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menyediakan lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan kontribusi secara langsung bagi kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, dan pengangkutan. Pariwisata juga mendorong pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sasana budaya, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya, yang kesemua itu dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat setempat maupun kepada wisatawan.

Di Banyuwangi, terlihat bahwa pengembangan pariwisata budaya memiliki konsekuensi di mana masyarakat yang menjadi objek pariwisata harus menilai keberadaan diri sendiri dan membandingkannya dengan orang lain. Pemerintah Kabupaten, melalui Dinas Pariwisata, tampaknya cukup berhasil dalam membina masyarakat. Mereka juga harus pandai-pandai merespons program pembangunan nasional di satu sisi, dan pembentukan serta pemertahanan identitas kultural di sisi lain. Keduanya tidak boleh bertabrakan, melainkan harus saling melengkapi dan menguatkan.

Sektor pariwisata merupakan industri *supply and demand*, lahir dari interaksi terus-menerus antara permintaan, penawaran, dan kebijakan strategis. Oleh karena itu perlu diperhatikan berbagai sarana dan prasarana yang dapat secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pariwisata. Misalnya

perencanaan pariwisata terkait keagamaan di Lumajang. Meskipun mayoritas masyarakat Lumajang bergama Islam, dan hanya sedikit saja yang beragama Hindu, namun Lumajang memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata agama Hindu. Di Lumajang terdapat Pura Mandara Giri Semeru Agung, tempat beribadah bagi umat Hindu. Masyarakat yang beragama Hindu, baik dari Bali maupun dari daerah-daerah lain, akan semakin banyak yang berkunjung ke Lumajang. Di Jember, sejumlah pelaku pariwisata telah menciptakan mata rantai pariwisata yang dinamis dan sadar terhadap potensi yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Mereka membentuk organisasi DWJ (Destinasi Wisata Jember), mendayagunakan aset-aset pariwisata yang ada dengan menitikberatkan pada hubungan dan saling mencukupi di antara mereka, sehingga tercipta lingkungan yang diharapkan mampu memancing penanaman investasi bagi pengembangan pariwisata maupun pengembangan produk-produk pendukung.

Pariwisata dan Identitas Budaya

Secara global, pariwisata telah berpola sebagai sebuah industri yang digerakkan oleh pasar. Artinya, pasarlah yang menentukan apakah sebuah destinasi wisata yang dijual layak dibeli atau tidak. Oleh karena itu menjual produk pariwisata tidak bisa dilakukan dengan cara biasa, sebagaimana layaknya produk pertanian atau produk-produk dagangan konvensional lainnya. Menurut Spillane (1994), pariwisata adalah komoditas dalam ruang lingkup pasar dan politik ekonomi global. Oleh karenanya, pariwisata di Indonesia perlu ditangani dengan lebih bersungguh-sungguh. Bagaimana merumuskan pembangunan sektor pariwisata di Indonesia, sehingga strategi pembangunan pariwisata nasional bisa terealisasi? Tiga unsur pokok yang secara terpadu diperlukan bagi kesuksesan rekayasa industri

pariwisata: wisatawan, tuan rumah atau penyedia sarana wisata, dan promotor atau perantara bisnis pariwisata.

Apakah pembangunan pariwisata secara massif mampu memengaruhi identitas etnis dan representasinya?

Kajian antropologis McKean (1977) dan Crystal (1977) tentang pengembangan dunia pariwisata di masa awal di Indonesia menunjukkan hal menarik, khususnya mengenai efek pariwisata pada budaya dan identitas lokal. McKean menangkap adanya rasa pesimisme di masa-masa awal pengembangan dunia pariwisata Indonesia, yang menganggap bahwa pariwisata secara massif akan menghancurkan budaya tradisional. McKean tidak sepakat dengan pernyataan bahwa pertunjukkan budaya dan cinderamata yang diproduksi untuk pasar pariwisata telah kehilangan esensinya. Dia bahkan menyatakan bahwa realitas pariwisata di Bali jauh dari kesan merendahkan budaya Bali dan justru mengarahkannya pada revitalisasi. Dia memperlihatkan bahwa ternyata orang Bali memisahkan antara produk budaya yang asli dan untuk pariwisata. McKean juga memperlihatkan bahwa pariwisata telah menyumbangkan pendapatan tinggi bagi masyarakat Bali, dan pendapatan tersebut antara lain mereka gunakan untuk membiayai pelatihan musik, tari, dan pembuatan kerajinan tangan. Minat wisatawan terhadap kebudayaan Bali telah menumbuhkan rasa kebanggaan pada para seniman serta mendorong masyarakat untuk memperkuat identitas budayanya.

Sementara itu Crystal menguraikan berbagai efek positif pembangunan pariwisata Tana Toraja di Sulawesi tengah yang menyumbang masyarakat untuk memelihara dan merevitalisasi ritual dan tradisi mereka. Masyarakat Toraja didorong untuk menunjukkan identitas dan sifat-sifat ke-Toraja-an mereka. Crystal mengungkapkan bagaimana di awal tahun 1970-an pemerintah Indonesia mulai menjajaki kemungkinan menarik minat para wisatawan ke Toraja dan menjadikannya sebagai

Bali yang lain; upacara *Aluk To Dolo*, atau upacara penguburan, dianggap sebagai atraksi utama yang potensial. Berbagai fasilitas pendukung pariwisata, misalnya transportasi, hotel dan *homestay*, dibangun. Dalam waktu singkat kunjungan wisata ke Toraja meningkat pesat secara mengesankan. Selama tahun 1980-an, pariwisata Toraja telah menjadi agenda internasional.

Picard (1996) memperlihatkan bagaimana masyarakat Bali secara dinamis mengubah identitas budaya mereka dalam konteks pembangunan dunia pariwisata. Memang ada pihak-pihak tertentu yang menilai bahwa pariwisata merendahkan dan merusak budaya, namun Picard berpendapat bahwa orang Bali dapat membangun batasan antara budaya yang sakral dan yang diperuntukkan bagi pariwisata. Menurut Picard, yang esensial bukanlah pertanyaan “apakah kebudayaan Bali dapat bertahan terhadap masuknya pariwisata”, melainkan bagaimana budaya Bali telah dibentuk dan diubah dari dalam oleh pariwisata. Bagi Picard, ‘budaya turistik’ bukanlah kekuatan luar yang hadir untuk mengubah budaya Bali, namun sebuah proses perubahan masyarakat Bali dari dalam di mana masyarakat Bali telah secara aktif terlibat dalam mengubah budaya mereka sendiri dan tumbuhnya kesadaran etnis dalam merespons peluang dunia pariwisata.

Paradigma Baru: Pariwisata Berbasis Komunitas

Strategi pengembangan pariwisata adalah segala daya upaya yang dikerahkan oleh berbagai pihak terkait untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi suatu objek wisata sehingga menjadi lebih baik. Dengan cara demikian, destinasi wisata tersebut akan dikunjungi lebih banyak wisatawan serta mampu memberi manfaat maksimal khususnya bagi masyarakat di sekitarnya, serta memberi pemasukan bagi pemerintah. Ada

empat pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang dikemukakan Getz (1987).

1. *Boostring Approach*. Suatu pendekatan yang melihat pariwisata sebagai suatu atribut positif untuk suatu tempat; masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan daya dukung wilayah tidak cukup dipertimbangkan.
2. *The Economic-industry Approach*. Suatu pendekatan yang mendahulukan tujuan ekonomi dibanding tujuan-tujuan sosial maupun lingkungan, yaitu menjadikan pengalaman dan tingkat kepuasan pengunjung sebagai sasaran utama.
3. *The Physical-spatial Approach*. Suatu pendekatan yang didasarkan pada tradisi “penggunaan lahan” secara geografis. Strategi pengembangan sektor pariwisata berdasarkan perencanaan yang berbeda-beda melalui prinsip-prinsip keruangan digunakan di sini, misalnya pengelompokan pengunjung di suatu kawasan, serta pemisahan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Pendekatan ini kurang mempertimbangkan dampak sosial dan kultural pengembangan wisata.
4. *The Community Approach*. Suatu pendekatan yang lebih menekankan pada pentingnya keterlibatan masyarakat setempat di dalam proses pengembangan. Pendekatan ini menganggap penting suatu pedoman pengembangan yang dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*).

Saat ini kecenderungan dunia global dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan menerapkan suatu strategi yang membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi. Hal ini juga terjadi dalam dunia pariwisata. *Community Based Tourism* (CBT), atau kepariwisataan berbasis

masyarakat, telah dibakukan sebagai strategi pembangunan di bidang pariwisata. Secara konseptual prinsip dasar CBT adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama—melalui pemberdayaan—dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penyelenggaraan industri pariwisata. Konsep CBT ini diterapkan sebagai strategi untuk memobilisasi masyarakat setempat agar berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan pariwisata, dengan tujuan memberdayakan sosial-ekonomi masyarakat tersebut.

Murphy (1985) adalah yang pertama kali mempopulerkan konsep CBT. Menurutnya, produk pariwisata secara lokal diartikulasikan dan dikonsumsi, dan produk wisata serta konsumennya harus *visible* bagi penduduk lokal. Pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, sebab masyarakat lokal yang harus menanggung dampak kumulatif perkembangan wisata.

Pariwisata berbasis komunitas adalah pariwisata yang bersifat kerakyatan. Konsep strategisnya menekankan pada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti kesenian, adat istiadat, masakan, bangunan, dan lain-lain. Setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata. Pendekatan ini cukup berbeda dengan pendekatan pembangunan pariwisata pada umumnya. Di sini daya dukung utama pengembangan pariwisata diperoleh dari masyarakat setempat, dengan tujuan utama meningkatkan standar kehidupan mereka. Oleh karena itu fokus pembangunan pariwisata tidak hanya pembangunan sarana dan prasarana fisik belaka. Kata kuncinya adalah pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pembangunan objek dan daya tarik wisata. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menuntut

koordinasi dan kerja sama serta peran yang berimbang antara berbagai unsur *stakeholder*, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam pendekatan CBT, yang tidak bisa ditawar adalah pelibatan masyarakat lokal sejak dalam proses perencanaan program-program pariwisata hingga pelaksanaan dan pengawasan.

Dilihat dari jangkauan dan dampaknya, konsep CBT cocok untuk diterapkan dalam penyelenggaraan wisata alam, wisata kuliner, budaya, dan lingkungan sehingga membantu proses pelestarian sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun budaya. Ada kecenderungan pihak wisatawan asing dewasa ini untuk berwisata dalam dimensi tradisonal, seperti mengunjungi desa-desa yang memiliki keunikan. Kecenderungan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah di Tapal Kuda yang masih memiliki banyak desa tradisional.

Salah satu contoh penerapan CBT yang berhasil adalah pengelolaan wisata alam Teluk Cinta di Jember. Suto Wijoyo, dibantu oleh keluarga, kerabat, dan sejumlah warga Desa Payangan, memprakarsai pengembangan Teluk Cinta secara mandiri, dan memperoleh keberhasilan yang signifikan hanya dalam beberapa tahun saja. Bandingkan dengan wisata Watu Ulo yang terletak di sebelah Teluk Cinta, yang telah berpuluh-puluh tahun dikelola oleh Pemkab Jember. Bukan kemajuan yang diperoleh, melainkan semakin lama semakin terpuruk.

Di Lumajang ada Tempoeran *Tubing Adventure*, olahraga air yang dikelola Komunitas Tempoeran sejak tahun 2014. Pada usianya yang ke-3, popularitas objek wisata ini berkembang cukup baik di kalangan anak-anak muda di Jawa Timur. Wisata petualangan ini menyusuri aliran sungai yang melintasi 4 desa dengan jarak tempuh kurang lebih 4 kilometer dengan waktu sekitar 1,5 jam hingga 2 jam. Masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas pariwisata yang dikelola

masyarakat secara mandiri ini, sementara Pemkab Lumajang juga mendapat pemasukan melalui retribusi.

Pariwisata Kota

Pada beberapa dasawarsa terakhir, ada kecenderungan di seluruh dunia bahwa wisatawan tidak hanya ingin bersantai sambil menikmati *sea, sand, and sun*. Pola konsumsi wisatawan secara pasti mulai mengarah pada jenis wisata dengan selera yang meningkat, yaitu menikmati produk atau kreasi budaya (*culture*) dan peninggalan sejarah (*heritage*). Kota yang dikembangkan dengan basis kebudayaan terbukti menjadi destinasi wisata utama di mana-mana di seluruh dunia.

Tren wisata kota tersebut mengisyaratkan bahwa fungsi kota telah mengalami pergeseran dari industri barang menjadi industri jasa, hiburan, dan informasi. Pabrik-pabrik digeser lokasinya ke pinggiran kota, dan selanjutnya kota menjadi pusat konsumsi, menjadi destinasi wisata baru. Yogyakarta dan Bandung adalah contoh terbaik untuk kasus ini.

Pendekatan pembangunan perkotaan berbasis pariwisata tidak begitu populer di wilayah Tapal Kuda. Penyebabnya, oleh beberapa pihak sektor pariwisata masih dianggap identik, atau paling tidak berhimpitan, dengan kemaksiatan dan hal-hal negatif lainnya seperti perjudian dan pelacuran. Sesungguhnya ini tidak perlu terjadi jika Pemerintah Daerah bisa melakukan pendekatan kepada berbagai pihak yang menolak. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan bahwa pembangunan perkotaan berbasis pariwisata adalah bagaimana mentransformasikan berbagai kegiatan rutin maupun temporer masyarakat perkotaan dalam bentuk kepariwisataan, secara terencana dan terjadwal sepanjang tahun. Selain itu, seluruh titik awal pengembangan pariwisata daerah sebaiknya dimulai dari kota, kemudian membentuk jejaring menuju titik-titik destinasi lainnya.

Jember, sebagai sebuah kota kecil dan relatif tertinggal, membutuhkan berbagai sentuhan khusus untuk dapat dikatakan sebagai kota yang telah siap menjalankan program pariwisata kota. Ketika acara JFC digelar, misalnya, salah satu kendala yang muncul adalah tidak tertampungnya wisatawan di hotel-hotel di Jember, sehingga meluber hingga Bondowosa dan Banyuwangi. Untuk mengatasi persoalan ini, mestinya Pemkab bisa menggalakkan aset akomodasi yang telah dimiliki oleh masyarakat, misalnya *homestay*. Dinas Pariwisata sebaiknya mempopulerkan sekaligus mengontrol keberadaan *homestay* melalui prosedur pengenalan dan sertifikasi sehingga merasa nyaman ketika mempromosikan kesiapan kota Jember kepada calon wisatawan. Selain itu, seluruh produk wisata harus menggambarkan identitas lokal. Mengenai hal ini tampaknya telah ada upaya berbagai daerah di Tapal Kuda untuk mencari keunggulan kompetitif masing-masing daerah.

Pembenahan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi

Pariwisata internasional menuntut standardisasi kualitas produk dan pelayanan wisata. Artinya, apa yang harus dicapai oleh setiap lembaga penyelenggara pariwisata adalah kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar industri pariwisata internasional. Untuk menjawab tuntutan tersebut setiap daerah yang menjadi destinasi wisata tidak bisa mengelak dari kewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, karena pada titik inilah salah satu kunci untuk memenangkan persaingan global yang semakin kompetitif. Oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan sertifikasi dan standar kompetensi tenaga kepariwisataan.

Ketika Indonesia memasuki era otonomi daerah, secara otomatis jajaran birokrasi di daerah memiliki peran yang lebih strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan

pariwisata. Namun sejauh ini harus diakui bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia pada lingkup birokrasi pariwisata menjadi variabel utama penghambat pembangunan pariwisata daerah. Salah satu titik lemah pembangunan pariwisata daerah terletak pada sektor perencanaan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan aparatur birokrasi yang tidak memadai. Masih agak lumayan jika seorang kepala daerah mengangkat seseorang yang dianggapnya memiliki kapasitas untuk menjadi kepala dinas pariwisata, mungkin seseorang tersebut akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan bekal kemampuan manajerialnya. Namun yang sering terjadi adalah kepala daerah memilih kepala dinas karena pertimbangan-pertimbangan lain di luar bidang keahlian. Misalnya karena seseorang telah berjasa sebagai “pejuang” yang membelanya di waktu pilkada. Di sini kompetensi tidak menjadi pertimbangan utama. Sebagai akibatnya, daerah akan selalu menghadapi kesulitan untuk menghasilkan produk-produk pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar internasional. Menjual produk pariwisata jelas berbeda dengan menjual produk-produk industri lainnya. Menjalin kerjasama lintas sektoral untuk mengurus bidang pariwisata jelas perlu strategi yang tidak sama dengan mengurus bidang kehumasan atau pertanian.

Aparatur birokrasi di ranah pariwisata tidak saja dituntut untuk menguasai substansi industri kepariwisataan, tetapi juga mampu mewadahi berbagai kepentingan para *stakeholder*. Pada titik ini, yang harus dijunjung tinggi adalah prinsip-prinsip *good governance*, yakni penerapan mekanisme perencanaan dan pengelolaan segala sumber daya ekonomi dan sosial dengan melibatkan unsur birokrasi, masyarakat, serta pihak swasta secara kolektif. Selanjutnya pihak birokrasi menjadi teladan utama dalam mengontrol dan mematuhi segala kebijakan dan kewenangan yang telah dirumuskan bersama.

Masa Depan Pariwisata Pendalungan

Situasi dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat di kawasan Pendalungan saat ini memperlihatkan semakin berkurangnya lahan pertanian dan lapangan pekerjaan lainnya. Lingkungan pun semakin rusak akibat kegiatan manufaktur dan aneka kegiatan ekonomi lainnya yang mengeksploitasi sumberdaya alam secara serampangan. Maka dari itu, sektor pariwisata perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber ekonomi andalan. Bidang pariwisata selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga tidak merusak lingkungan, bahkan sebaliknya dapat merangsang pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dimengerti karena pengembangan suatu destinasi wisata tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup sebagai salah satu elemen penunjang destinasi wisata tersebut. Para wisatawan tentunya tidak akan terkesan ketika mendatangi sebuah objek wisata yang bagus namun kondisi lingkungan sekitarnya buruk.

Patut disayangkan, sejauh ini perhatian pemerintah masih berkisar pada angka-angka, misalnya seberapa besar jumlah wisman yang berkunjung, berapa devisa yang diperoleh, serta berapa banyak lapangan kerja yang diciptakan. Memang semua itu penting, namun yang tak kalah penting dan masih belum memperoleh porsi perhatian yang memadai adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai dan kualitas. Padahal laju angka-angka tersebut tidak akan dapat dicapai tanpa disertai nilai-nilai dan kualitas.

Pada masa yang akan datang, kebutuhan untuk berwisata akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dunia, serta meningkatnya taraf hidup. Akan semakin banyak penduduk dunia yang membutuhkan *refreshing* akibat semakin tingginya kesibukan dan beban kerja. Selain itu, pengembangan pariwisata mutlak perlu dilakukan dalam rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan di sektor pariwisata. Itulah sebabnya mengapa pengelolaan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Dalam kerangka itu pariwisata perlu mengembangkan paket-paket wisata baru seperti agrowisata atau ekowisata. Jenis wisata semacam ini selain tidak membutuhkan modal raksasa, juga dapat berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat sekitar. Bila mereka diikutsertakan secara langsung maka keuntungan pun dapat mereka rasakan secara langsung.

Pengembangan pariwisata harus berada dalam suatu proses perencanaan yang sistematis, terarah, dan terukur. Kendala-kendala yang masih dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Tapal Kuda, antara lain adalah: *Pertama*, masalah keamanan bagi para wisatawan akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan konsumen. Persoalan ini berkaitan dengan mentalitas masyarakat yang belum menyadari bahwa wisatawan adalah aset yang harus dijaga. *Kedua*, rendahnya kualitas pelayanan para penyelenggara pariwisata serta adanya persaingan yang tidak sehat di antara para pelaku pariwisata. *Ketiga*, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata. Banyak rencana pengembangan yang gagal dalam pelaksanaannya karena kurang mendapat dukungan masyarakat setempat. *Keempat*, kurangnya modal dan rendahnya sumberdaya manusia, terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam hal pengelolaan pariwisata. Sumberdaya manusia merupakan komponen penentu, terutama pada jajaran garda depan, yakni mereka yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada para wisatawan. *Kelima*, infrastruktur yang belum memadai, misalnya fasilitas transportasi dan akomodasi. *Keenam*, perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang bersifat *top-down*, sentralistis, dan kurang memberdayakan potensi masyarakat setempat.

Jember Sepanjang Masa

Jember, Si Perawan Molek

Pada masa lalu, Jember menjadi tempat tujuan migrasi orang-orang Jawa dan Madura karena memiliki sejumlah faktor yang memancarkan daya tarik istimewa. Keputusan mereka untuk meninggalkan kampung halaman dan pindah secara permanen ke Jember tentunya tidak bisa disebut sebagai keputusan kecil dan mudah.

Lee (1978) dalam sebuah tulisannya, “Teory of Migration”, mengungkapkan bahwa volume migrasi di suatu wilayah akan berkembang sesuai dengan keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor positif, negatif, ada pula faktor yang bersifat netral. Faktor positif adalah faktor yang menguntungkan, misalnya seseorang memutuskan untuk bertempat tinggal di suatu daerah karena di sana terdapat sekolah, kesempatan kerja, atau iklim yang baik. Faktor negatif adalah faktor kekurangan di daerah asal yang menyebabkan seseorang ingin pindah dari tempat itu. Perbedaan nilai kumulatif di antara kedua tempat tersebut cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk. Secara lebih spesifik Lee menguraikan apa yang dia sebut sebagai faktor-faktor pendorong dan penarik (*push and pull factors*):

1. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal (faktor pendorong atau *push factor*), antara lain berupa faktor

ekonomi, ialah karena seseorang ingin mengubah taraf hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Faktor ekonomi ini merupakan faktor pendorong terbesar terjadinya mobilitas penduduk untuk bermigrasi meninggalkan tempat tinggal mereka.

2. Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan (faktor penarik atau *pull factor*), antara lain faktor tersedianya lapangan pekerjaan, atau kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Jember pada mulanya secara administratif berada di bawah Besuki. Pada tahun 1743, karena daerah Besuki merupakan wilayah Blambangan, dan Blambangan adalah daerah bawahan Mataram, VOC mengambil alih daerah ini dengan berpedoman pada kontrak antara Gubernur Jendral Van Imhoff dengan Susuhunan Pakubuwana II. Selanjutnya pada tahun 1799 VOC dibubarkan, dan sejak saat itu pemerintahan di Jawa, termasuk wilayah Besuki, berpindah tangan dari VOC kepada Pemerintah Belanda (Winarni, 2012).

Pada abad ke-19, Jember masih berupa sebuah daerah kecil, sepi, terisolir, dan hanya berstatus sebagai salah satu distrik dari *regentschap* Bondowoso, Karesidenan Besuki. Pada tahun 1890 kepadatan penduduk Besuki hanya sekitar 65 orang per km², sebaliknya daerah terpadat penduduknya di Jawa, yaitu daerah Bagelen, mencapai 390 orang per km². Faktor utama penyebab rendahnya jumlah penduduk di wilayah ini adalah kematian akibat peperangan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dan secara terus-menerus. Begitu banyak penduduk yang menjadi korban selama periode peperangan. Pembunuhan besar-besaran terjadi di berbagai tempat, termasuk di daerah Besuki pada tahun 1709. Penyebab lain adalah ketidakstabilan politik sehingga memaksa penduduk untuk melarikan diri ke tempat-tempat lain. Sebagai contoh, sejumlah penduduk Besuki telah

melarikan diri ke pulau Nusa Barong dan Bali untuk menghindari penangkapan dan pembuangan (Winarni, 2012).

Namun dalam waktu yang relatif singkat, Jember yang semula sepi menggeliat dan berubah menjadi kota paling besar di karesidenan Besuki, bahkan akhirnya menjadi lebih ramai dibanding Panarukan, Bondowoso, dan Banyuwangi. Penyebab utamanya adalah munculnya sejumlah perkebunan partikelir. Diberlakukannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 menjadikan Jawa Timur tumbuh sebagai kawasan perkebunan besar. Undang-Undang ini memberi kesempatan yang lebih besar kepada pihak swasta untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi. Orang Belanda yang pertama kali merintis usaha perkebunan swasta di Jember adalah George Birnie dkk., pada tahun 1859, bergerak di bidang perkebunan tembakau, disusul kemudian dengan aneka tanaman seperti kopi, kakao, dan karet. Tidak lama kemudian muncullah sejumlah perkebunan lainnya di wilayah tersebut sehingga membawa berbagai perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Pada tahun 1883 terjadi perubahan status kota Jember, dari distrik menjadi *regentschap*. Artinya, Jember menjadi afdeling tersendiri dan terpisah dari Bondowoso (Arifin, 2006).

Sehubungan dengan kondisi tanahnya yang subur, oleh pemerintah kolonial Belanda Jember sejak awal dirancang sebagai daerah basis produksi yang menghasilkan berbagai komoditas yang bernilai jual tinggi. Hadirnya perkebunan-perkebunan swasta di Jember secara otomatis membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan hal itu menyebabkan terjadinya gelombang migrasi besar-besaran dari daerah Madura dan Jawa. Sebagian dari mereka sengaja didatangkan, sebagian lainnya datang sendiri, dalam rangka mempercepat proses produksi. Sarana transportasi darat menuju ke Jember, termasuk jalur kereta api, dibangun sehingga mobilitas sosial orang

Madura, Jawa, Cina, Arab, dan juga orang-orang Belanda ke daerah ini menjadi tinggi. Jumlah penduduk Jember meningkat dengan cepat. Pada tahun 1845 penduduk Jember hanya berjumlah 9.237 orang, tahun 1867 meningkat menjadi 75.780 orang, dan pada tahun 1880 meningkat lagi menjadi 129.798 orang. Gelombang migrasi besar-besaran orang-orang Jawa dan Madura ke Jember itu karena jumlah perkebunan swasta di Jember terus bertambah dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Seiring dengan perkembangan Jember, orang-orang Arab dan Cina yang dikenal sebagai kaum pedagang juga berdatangan. Perkembangan Jember tersebut ditandai dengan semakin banyaknya jumlah desa. Pada tahun 1845 Jember hanya terdiri atas 36 desa, namun pada tahun 1874 berkembang menjadi 46 desa dan pada tahun 1883 menjadi 117 desa. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah desa terus bertambah karena banyaknya pemecahan desa (Arifin, 2006).

Pada masa sebelum terjadinya gelombang migrasi ke Jember, diperkirakan sejumlah orang Jawa sudah datang lebih dulu sejak abad ke-18, terutama di wilayah Puger dan sekitarnya. Sedangkan mereka yang bermigrasi ke Jember dan sekitarnya pada abad ke-19 berasal dari berbagai daerah lain di Jawa Timur, seperti dari Malang, Bojonegoro, Ponorogo, Kediri, Trenggalek dan dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Adapun orang-orang Using yang berada di wilayah itu merupakan penduduk asli Banyuwangi yang tersebar di sebagian besar wilayah tersebut. Sebenarnya orang-orang Using ini ada yang sejak lama menempati sebagian wilayah Bondowoso, tetapi kemudian terdesak oleh orang-orang Madura. Disamping tiga kelompok penduduk utama tersebut, ada beberapa kelompok lain yang jumlahnya lebih kecil, yakni orang-orang Eropa, Cina, Arab, Makassar, Sunda, dan Bali. Orang-orang Makassar yang hidup di daerah Besuki tersebut diduga keturunan Kraeng Galesong

dan para pengikutnya yang melarikan diri dari Makassar pada tahun 1667 (Winarni, 2012).

Jika kita ingin memperdalam persoalan migrasi ke Jember, serta bagaimana mereka menata hidup di tempat baru ini, maka teori konfigurasi budaya merupakan landasan yang cukup penting karena bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai perubahan dan adaptasi suatu etnis (Strathern, 1987; Appadurai, 2005). Dalam hubungannya dengan proses migrasi, teori ini melihat bahwa ada tiga proses sosial yang dapat terjadi. *Pertama*, adanya pengelompokan baru dengan orang-orang yang berbeda. Pengelompokan seperti ini merupakan proses penting dalam hubungannya dengan proses adaptasi pendatang, yang berarti terjadi pembentukan hubungan-hubungan sosial baru. *Kedua*, terjadi redefinisi sejarah kehidupan seseorang atau sekelompok orang karena ada fase kehidupan baru yang terbentuk. Fase ini dapat memiliki arti yang sangat berbeda bagi seseorang atau sekelompok orang karena latar sosial yang berbeda dengan latar di mana mereka berada sebelumnya. *Ketiga*, terjadi proses pemberian makna baru bagi diri seseorang atau sekelompok orang, yang menyebabkan mereka perlu mendefinisikan kembali identitas kultural diri serta asal-usulnya.

Jember, Hari Ini

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan *Staatsblad* Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 dan sebagai dasar hukum mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk *regenschap* Jember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri.

Luas total wilayah Kabupaten Jember pada saat ini adalah 3.092,34 km². Penggunaan lahan untuk kepentingan pertanian

mencapai luas 46,41%, permukiman 9,93%, hutan 21,17% dan lain-lain seluas 22,49%. Secara administratif wilayah ini terdiri atas 31 kecamatan, terbagi menjadi 225 desa dan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 km² atau 15,9% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 km² atau 0,76%.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2015, jumlah total penduduk Kabupaten Jember adalah 2.592.332 jiwa, terdiri atas laki-laki 1.274.963 jiwa dan perempuan 1.317.359 jiwa (Pekab Jember, 2015). Persebaran penduduk di Kabupaten Jember tidak cukup merata. Kecamatan berpenduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumpalsari, 125.981 jiwa (5,41%), sedangkan Kecamatan Jelbuk berpenduduk paling sedikit, yakni 31.967 jiwa (1,37%). Kepadatan penduduk rata-rata pada tahun 2010 mencapai 707 jiwa/km². Yang terpadat adalah Kecamatan Kaliwates, mencapai 4.479,55 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Tempurejo memiliki tingkat kepadatan terendah, yakni 134,71 jiwa/km² (BPS Jember, 2015).

Tipe perekonomian Kabupaten Jember adalah tipe agraris. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani sehingga *leading sector* perekonomian Jember adalah bidang pertanian. Pada tahun 2015 perolehan dari pertanian mencapai 41,73%, dan berhasil memosisikan Kabupaten Jember sebagai salah satu lumbung beras bagi Provinsi Jawa Timur.

Hingga pada saat ini di Kabupaten Jember masih terdapat sejumlah area perkebunan, dan sebagian besar merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Daerah ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Selain itu, Jember juga dikenal sebagai “daerah 1.000 gumuk” karena memiliki lebih dari 1.500 gumuk (bukit) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jember, meskipun dari

tahun ke tahun jumlahnya terus menyusut secara signifikan karena penambangan batu dan pasir di bukit-bukit tersebut.

Masyarakat Jember terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang, melalui dialektika sosio-kultural antaretnis, kekuatan alam, serta berbagai hal yang mengalir dari luar. Dari hal ini tampaklah sosok Jember sebagai suatu unit lingkungan masyarakat yang unik dan khas, serta cukup berbeda dibanding wilayah geografis lainnya di Indonesia.

Pada masa kini, migrasi penduduk ke Jember masih terjadi dan terus berangsur, namun faktor utama yang mendorong kedatangan masyarakat dari daerah lain menuju Jember adalah faktor pendidikan dan ekonomi. Mahasiswa dari berbagai daerah di tanah air datang ke Jember karena menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Jember, khususnya Universitas Jember. Jika dulu mayoritas hanya orang Jawa dan Madura yang datang ke Jember untuk bekerja di perkebunan milik Belanda, atau membuka lahan pertanian baru, sekarang yang datang berlatar belakang etnik dan budaya yang lebih beragam dengan tujuan yang juga beragam. Misalnya setiap tahun terdapat sejumlah pegawai baru pemerintah atau karyawan perusahaan yang ditempattugaskan di Jember. Para pendatang tersebut, baik yang berlatar belakang kepentingan pendidikan atau ekonomi, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan aneka ragam etnis, agama, bahasa, dan tradisi. Hal itu menjadikan Jember semakin berwarna, semakin heterogen. Namun demikian, komposisi masyarakat tetap didominasi etnis Jawa dan Madura, sehingga secara umum kultur kedua etnis inilah yang menjadi warna utama Jember.

Migrasi Orang Madura

Orang Madura hidup di lingkungan terbatas yang disebut *tanean lanjang*. Susunan rumah diurut berdasarkan hirarki

dalam keluarga. Barat-timur adalah arah yang menunjukkan urutan tua muda. Sistem yang demikian mengakibatkan ikatan kekeluargaan menjadi erat. Sedangkan hubungan antar-kelompok menjadi renggang karena letak permukiman yang menyebar dan terpisah. Di ujung paling barat *tanean lanjang* terletak sebuah surau. Susunan dari barat ke timur adalah: rumah orang tua, anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit dari keturunan perempuan. Kelompok keluarga yang demikian yang disebut *koren* atau rumpun bambu. Istilah ini cukup sesuai karena satu *koren* berarti satu keluarga inti.

Pada umumnya model *tanean lanjang* adalah sebagai berikut: Rumah berada di sisi utara, surau di ujung barat, kandang di sisi selatan dan dapur menempel pada salah satu sisi rumah masing-masing. Halaman tengah inilah yang disebut dengan istilah *tanean*. Karena *tanean* biasanya cukup panjang maka halaman ini disebut *tanean lanjang*. *Tanean* menurut generasi penghuninya memiliki sebutan bermacam-macam seperti *pamengkang*, *koren*, *tanean lanjang*, masing masing terdiri atas tiga, empat dan lima generasi (Tulistyantoro, 2005).

Islam dan kyai adalah elemen penting dalam kehidupan orang Madura (Kuntowijoyo, 2002). Untuk tujuan menjaga kehormatan, orang Madura rela mengorbankan nyawa, seperti diperlihatkan oleh pepatah Madura *tembang pote mata ang'o'an potea tolang* (daripada hidup menanggung malu lebih baik mati berkalang tanah).

Gejala perubahan sosial di Madura mulai terasa ketika kejayaan kerajaan-kerajaan tradisional Madura (Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan) berakhir karena mereka menyerah pada penguasa kolonial Belanda pada paruh kedua abad ke-19. Penelitian Kuntowijoyo (2002), tentang pengaruh ekologi pada formasi sosial di Madura, memperlihatkan bahwa migrasi ke pulau Jawa merupakan bagian penting dari sejarah orang

Madura. Dibukanya perkebunan di Jawa Timur menarik kehadiran orang-orang Madura untuk menjadi buruh kasar di perkebunan. Pada tahun 1930, lebih dari separuh keseluruhan etnis Madura tinggal di Jawa, kebanyakan menetap di pojok bagian Timur.

Kondisi alam di Pulau Madura tidak memungkinkan bagi masyarakat di sana untuk bisa bercocok-tanam secara layak sehingga menghasilkan produk pangan yang dapat menopang ekonomi masyarakat. Sedikit sekali lahan yang dapat ditanami padi; sebagian besar lahan berupa tegalan yang hanya bisa ditanami ketela pohon, jagung, atau dijadikan tempat penggembalaan ternak. Ekosistem Madura adalah ekosistem tegalan (Kuntowijoyo, 2002). Kondisi alam di Madura tersebut menurut Kuntowijoyo berperan dalam pembentukan perilaku sosial masyarakat Madura. Persoalan sikap fanatik terhadap agama tidak lepas dari kondisi alam yang ada di Madura, yang menurut Kuntowijoyo disebabkan karena letak desa-desa yang tersebar dan tidak terpusat (*scattered village*), di mana perumahan penduduk terpencar dalam kelompok-kelompok kecil lima atau enam keluarga, yang dikelilingi oleh tegal. Dari situlah kemudian orang Madura harus berkumpul berdasarkan kepentingan keagamaan. Sedangkan yang berperan besar dalam hal itu adalah para kyai yang menyatukan kesadaran kolektif masyarakat Madura. Dalam konteks sosial seperti inilah agama dan kyai menjadi *organizing principle*. Agama memberikan *collective sentiment* melalui berbagai aktivitas keagamaan.

Menurut Lee (1984), faktor-faktor yang memengaruhi orang Madura mengambil keputusan untuk bermigrasi dapat diringkas menjadi empat pokok, yaitu: (1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) Penghalang antara, dan (4) Faktor-faktor pribadi. Menurut Kuntowijoyo (2002), faktor iklim dan geologis pulau Madura

menjadi pendorong migrasi orang Madura. Kondisi geografis dan ekologis Pulau Madura kurang mendukung untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Kondisi tanah Pulau Madura yang bersifat basa oleh lapisan kapur mendorong penduduknya melakukan migrasi karena kurang berpotensi untuk mengembangkan pertanian. Dalam catatan Jonge (1989), sudah sejak pertengahan abad ke-19 terdapat 833.000 orang Madura yang bertempat tinggal di Jawa Timur, dua kali lipat lebih banyak dari pada jumlah orang yang bertempat tinggal di pulau asal. Sementara itu Kuntowijoyo (2002) mencatat bahwa pada tahun 1806 telah terdapat desa-desa orang Madura di sejumlah tempat di Jawa Timur, yakni 25 desa di Pasuruan, 3 desa di Probolinggo, 22 desa di Puger, dan 1 desa di Panarukan.

Migrasi Orang Jawa

Di sepanjang masa telah terjadi migrasi orang-orang Jawa dalam jumlah besar, baik untuk selama-lamanya atau untuk waktu yang singkat, ke berbagai penjuru mata angin. Sebelum abad ke-20, migrasi orang-orang Jawa tersebut dilakukan karena berbagai alasan, yakni karena persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Jumlah penduduk di beberapa tempat di Pulau Jawa bertambah dengan pesat sehingga lahan pertanian pun makin menyempit. Di samping itu, keputusan pemerintah kolonial Belanda memberlakukan sistem *Cultuur Stelsel* atau Tanam Paksa (1830-1870), yang mengakibatkan merosotnya ekonomi rakyat, mendorong kepergian orang Jawa di beberapa daerah untuk merantau ke tempat-tempat lain.

Meskipun orang Jawa memiliki pandangan hidup *mangan ora mangan kumpul* (makan atau tidak makan yang penting berkumpul) namun mereka bukan etnis yang tidak bisa meninggalkan tanah kelahiran. Orang Jawa juga memiliki tradisi merantau. Mereka pergi merantau dan tersebar ke segala penjuru

Nusantara, bahkan hingga ke Madagaskar, Afrika. Mereka merantau dengan membawa sanak-keluarga, bahkan terkadang seluruh kampung/desa berangkat bersama-sama, atau biasa disebut *bedhol desa*. Perpindahan penduduk khas Jawa ini, sesuai dengan namanya, merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan secara massal oleh satu atau beberapa desa, lengkap dengan aparaturnya, menuju ke daerah lain yang masih jarang penduduknya, baik di wilayah Pulau Jawa maupun di pulau lain. Pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak penduduk Pulau Jawa yang melakukan transmigrasi *bedhol desa* ke pulau-pulau lain yang jarang penduduknya.

Jadi, masyarakat yang datang ke Jember adalah orang-orang yang memiliki etos kerja keras, berani melepas kebiasaan lama “daripada hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri”, atau “mangan ora mangan kumpul.”

Epilog: Pendalungan di Ruang Proses

Kebudayaan Pendalungan Raya di wilayah Tapal Kuda dibangun berdasarkan pluralisme kebudayaan yang dilandasi sikap kesetaraan. Berbagai etnis yang ada di wilayah ini hidup secara harmonis dan mampu mengembangkan sikap toleran. Masing-masing etnik tidak berusaha gigih mempertahankan identitas partikularistik tradisionalnya, mereka saling membuka diri terhadap elemen-elemen budaya yang dimiliki oleh anggota masyarakat lainnya.

Meskipun dalam banyak hal perwujudan antara kebudayaan Pendalungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain di sekitarnya terdapat banyak kesamaan, hal itu tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Tapal Kuda untuk tetap bangga dengan identitas Pendalungan karena memang yang patut diperkuat dan ditonjolkan bukan perbedaan melainkan keunggulan.

Kebudayaan Pendalungan ke depan, saya sangat yakin berdasarkan data dan fakta yang bisa kita peroleh, akan menuju ke arah penguatan kebudayaan multikultural, di mana hanya pada situasi multikultural-lah dapat dicapai kondisi ideal bagi suatu masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok etnis yang mendambakan hidup berdampingan secara harmonis, bebas bereksplorasi dan mengekspresikan gagasan-gagasan terbaiknya, melestarikan adat-istiadat, agama, kepercayaan, bahasa, serta memperoleh perlindungan dan pelayanan setara

atas hak-hak kewarganegaraannya. Dengan demikian konsep multikulturalisme sesungguhnya tidak hanya bersangkut-paut dengan keberagaman budaya, tetapi yang lebih mendasar lagi adalah kehendak setiap pribadi untuk mengakui, menghormati, dan menghargai kemajemukan dalam masyarakat sehingga fakta sosio-kultural menjadi berkah, bukan alat untuk menjadikan masyarakat terpecah-belah.

Tidak hadirnya kekuatan dominan di wilayah ini bukan merupakan suatu kelemahan. Sebaliknya, keberimbangan sosial justru akan memberi peluang lebih besar bagi terbentuknya medan pertukaran simbolik yang produktif, dan dengan demikian lebih mudah mendorong terciptanya identitas hibrida, yakni identitas baru yang terbentuk dari hasil pertemuan elemen-elemen terbaik pada masing-masing pihak. Identitas kultural semacam itulah yang mungkin akan menjadi milik masyarakat Pentalungan secara keseluruhan, pada suatu ketika. Jika dikelola dengan bijaksana, pluralitas etnis dan budaya Pentalungan ini akan menjadi kekuatan dan kekayaan setiap daerah di Tapal Kuda.

Upaya membangun kesadaran kebudayaan masyarakat Pentalungan tentu saja harus merujuk pada historisitas masyarakat Pentalungan sendiri yang multietnis, atau dengan kata lain membangun masyarakat kekinian yang berakar pada sejarahnya sendiri. Oleh karena itu pluralisme harus menjadi syarat mutlak bagi pelaksanaan otonomi daerah. Perlu disadari bahwa otonomi daerah di tangan masyarakat yang belum memiliki kesadaran pluralistik bisa berubah menjadi arena kesewenang-wenangan, pembodohan massal, atau justru akan memicu terjadinya kekerasan yang tidak produktif.

Pada masyarakat Pentalungan, persentuhan kultural dan hubungan dialogis harus terus-menerus ditumbuhkan dan dibina semenjak dini untuk meminimalisir disintegrasi. Persentuhan

kultural berarti mengenali etnis lain dengan lebih baik. Pelajaran multikulturalisme atau *field study* di sekolah-sekolah yang selama ini terbatas pada tataran permukaan saja, yakni sekedar mengenali suatu obyek wisata atau bangunan, hanya membahas pakaian daerah dan makanan khas, harus diperdalam kualitasnya sehingga mencapai tataran manusia dan segenap nilai-nilai budaya yang dimilikinya.

Perlu dipahami bahwa pada masyarakat plural biasa terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok subkebudayaan yang dalam batas-batas tertentu berbeda satu dengan yang lain. Keadaan seperti ini mengakibatkan rawan terjadinya konflik sosial di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Langkah-langkah untuk mereduksi kemungkinan terjadinya konflik adalah (a) kesediaan masyarakat secara keseluruhan untuk mengembangkan nilai-nilai yang bersifat dasar, dan (b) menghindari terjadinya dominasi politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Dengan kata lain, kebudayaan Pendalungan adalah milik bersama masyarakat Pendalungan.

Dalam pusaran globalisasi yang begitu kuat dan tak mungkin dihindari, masalah paling krusial yang di hadapi oleh setiap kelompok masyarakat adalah persoalan identitas kultural. Karena globalisasi bersifat tak terhindarkan, maka masyarakat harus memiliki strategi untuk menyesuaikan diri sekaligus mempertahankan identitas kultural masing-masing. Diperlukan suatu strategi yang mampu mengurai hambatan-hambatan sosial dalam masyarakat multikultural.

Jika dulu setiap orang yang datang ke wilayah Tapal Kuda hanya perlu bekal yang cukup untuk menjawab tantangan alam, kini mereka harus membekali diri untuk dapat menjawab tantangan sosial dan kultural. Hal itu tidak mudah karena dunia global beserta seluruh kekuatan supernya telah mengepung siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Oleh karena itu, dalam jangka

panjang, pendidikan formal diharapkan dapat membantu mewujudkan hal tersebut. Selain itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat bisa mewujudkannya melalui forum-forum informal. Seni pertunjukan, misalnya, dapat menjadi media alternatif pemecahan kebuntuan yang berfungsi mentransformasikan nilai-nilai multikultural.

Stigma minor terhadap masyarakat Pendalungan sebagai masyarakat yang tidak memiliki akar budaya, tidak memiliki tata-krama berbahasa, dan sebagainya, telah dijawab secara positif oleh masyarakat Tapal Kuda, yakni dengan cara menunjukkan berbagai keunggulan yang hanya bisa dihasilkan oleh masyarakat yang “tidak memiliki akar budaya” dan “tidak memiliki tata-krama berbahasa”.

Kini masyarakat Pendalungan telah, dan tetap harus, memperkuat pemahaman mereka mengenai relativitas budaya, bahwa tidak ada suatu kebudayaan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kebudayaan lainnya. Dengan demikian masyarakat Pendalungan berkewajiban memberi kesempatan yang sama kepada semua adat-istiadat, kesenian, agama yang terdapat dalam masyarakat. Tentu saja ini tidak mudah karena upaya memahami suatu kebudayaan harus disertai dengan pemahaman terhadap kompleksitas simbolisme yang teranyam dalam unsur-unsur kebudayaan tersebut. Dalam konsep relativitas budaya, tidak satu pun budaya atau tradisi yang dapat dianggap aneh, rendah, kuno, atau menjijikkan hanya karena budaya atau tradisi itu berbeda dari apa yang kita miliki. Sebaliknya, kita harus berusaha memahami suatu kebudayaan berdasarkan konsep / nilai / simbol yang telah melekat pada kebudayaan itu (lihat Robbins dan Dowty, 2016).

Hingga hari ini kebudayaan masyarakat Pendalungan Jember maupun Pendalungan Raya tetap berada dalam ruang proses: terus bertumbuh sesuai dengan hasrat, orientasi, dan

penghayatan masyarakat pendukungnya, mengalir mengikuti arus pertarungan jaman yang tidak akan pernah berakhir di muara mana pun.

Membangun Seni-Budaya Daerah

Pemerintah Orde Baru, dalam rangka *nation building*, pernah menerapkan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, sebagai upaya untuk menguatkan nilai-nilai nasionalisme dengan cara menyeragamkan model seluruh pemerintahan desa di Indonesia yang beraneka rupa. Jelas sekali undang-undang tersebut mengabaikan keberagaman yang ada, yang seharusnya dipelihara dan dilindungi sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah diganti dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang yang baru ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan dan merencanakan program pembangunan yang relevan dengan aspirasi masyarakat dan karakteristik geografis serta budaya setempat, tanpa ada diskriminasi, etnosentrisme, serta sentimen etnisitas yang berlebihan.

Isu pengembangan seni-budaya daerah tidak bisa berhenti pada bagaimana pemimpin daerah berpikir dan bersikap, tetapi juga isu mengenai bagaimana membangkitkan keterlibatan yang konsisten seluruh aparat daerah dari atas ke bawah sampai ke masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, harus dibangun suatu pemahaman bersama, bahwa implementasi program pengembangan seni-budaya daerah bukan sekedar masalah pelayanan teknis. Ada tantangan yang lebih berat daripada hal itu, yakni bagaimana mendorong perubahan sikap dan kesadaran masyarakat berkaitan dengan masalah seni-budaya. Karena alasan ini, maka untuk menambah daya dorong pengembangan

seni-budaya daerah dibutuhkan keterlibatan secara aktif para pemimpin setempat dan seluruh tokoh masyarakat. Sebagai konsekuensinya, bupati harus mengembangkan kebijakan untuk memperkuat keterlibatan pemimpin wilayah setempat dan organisasi kemasyarakatan, antara lain dengan meminta mereka melaksanakan berbagai diskusi dan pelatihan pengelolaan seni-budaya secara berkesinambungan.

Keputusan politik yang telah diambil untuk memulai program pengembangan seni-budaya dapat saja dengan mudah tidak membuahkan hasil. Pada masa Orde Baru, pemerintah seringkali menyampaikan tujuan-tujuan mereka yang ambisius, didasari prinsip-prinsip yang amat tinggi sembari mengklaim memiliki kemampuan besar untuk mewujudkannya. Namun apa yang menjadi harapan bertentangan dengan anggaran yang terbatas dan berbagai kekurangan dalam hal administrasi, ditambah tidak solidnya koordinasi secara vertikal.

Hingga sekarang, kemacetan pengembangan seni-budaya daerah terjadi di mana-mana karena para pimpinan daerah tidak mampu menemukan mitra berpikir yang sebanding. Dewan kesenian yang semula digadang-gadang mampu menjadi mitra dalam menggagas berbagai kebijakan strategis seni-budaya daerah, ternyata rentan terjebak pada kegiatan praktis dan teknis. Akhirnya dewan kesenian hanya menjadi semacam sanggar yang oleh pemerintah daerah sering dianggap selalu *ngrecokin* dalam hal pendanaan. Padahal dewan kesenian secara *de jure* merupakan *think-tank* pemerintah daerah khususnya dalam hal pengembangan seni-budaya, yang secara substansial membantu, atau setidaknya memberi pertimbangan, proses pembuatan kebijakan. Di lapangan, seharusnya dewan kesenian berikhtiar mengembangkan serangkaian proyek simpatik yang mampu menstimulasi dan menggerakkan sanggar-sanggar dan berbagai

kelompok kesenian dari *provider* yang pasif menjadi aktif serta berorientasi pada karya.

Program pemerintah untuk memberi bantuan pada kelompok-kelompok seni memang menyenangkan dan cukup berarti, setidaknya untuk jangka pendek. Namun sesungguhnya yang lebih penting dari itu adalah membantu kelompok-kelompok seni tersebut agar lebih berdaya dan berkemampuan melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, jika terdapat sekelompok masyarakat yang sedang berjuang mengembangkan seni-budaya daerah, maka Anda sebagai seorang kepala daerah harus “berada di sana”. Apa pun bantuan praktis yang Anda berikan, Anda harus dapat menghimpun semua sumber daya yang ada, serta memberi keyakinan pada mereka bahwa Anda berada di sana untuk memberi dukungan dan penghormatan atas upaya kreatif mereka.

Pertanyaan mengenai “mengapa kesenian dapat tumbuh dengan begitu mengesankan di Banyuwangi dan Ponorogo” dapat dijelaskan dengan jawaban sederhana, bahwa selain masyarakat memiliki minat berkesenian yang cukup besar, pemerintah daerah mendorongnya dengan pendekatan budaya birokrasi daripada pendekatan kebutuhan pembangunan seni-budaya. Artinya, pemerintah daerah tidak bisa hanya duduk menunggu datangnya inisiatif dari masyarakat. Pengembangan seni-budaya daerah dalam jangka panjang membutuhkan program yang lebih jelas dan aplikatif, yang diintegrasikan ke dalam kegiatan kecamatan dan desa sehingga mempunyai akar yang lebih kuat di dalam masyarakat.

Apa yang terjadi di Banyuwangi dan Ponorogo tersebut, jika diamati secara seksama, adalah model khas Pemerintah Orde Baru. Model pendekatan pembangunan, termasuk pengembangan seni-budaya, yang dilakukan pemerintah pusat pada masa Orde Baru cukup khas. Mereka merumuskan dengan

jelas tujuan-tujuan kebijakan nasional dalam bidang tertentu, dengan cara praktis dan sederhana, yang kemudian diumumkan kepada para pimpinan pemerintah daerah; selanjutnya semua elemen masyarakat, bahkan sampai tingkat yang paling bawah, dikoordinasikan dan digerakkan untuk segera menerima dan menjalankan kebijakan tersebut.

Pemerintah daerah memang harus menggerakkan para seniman seni tradisional untuk lebih giat berkarya, namun pemerintah daerah juga wajib mempromosikan kesejahteraan para seniman. Dan, saya kira, jika ingin lebih berpihak pada seni tradisional, pemerintah daerah lebih perlu memprioritaskan pembangunan sebuah panggung terbuka yang representatif daripada sebuah gedung kesenian. Banyuwangi dan Ponorogo telah melakukannya sejak lama.

Rekomendasi

Setelah menyelesaikan dan meneliti ulang isi buku ini, saya menemukan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti agar pemahaman kita terhadap masyarakat dan budaya Pendalungan semakin lengkap. Entah kapan dan oleh siapa.

1. Perlu dilakukan riset mendalam yang menguraikan peran elit pengambil kebijakan dalam proses produksi identitas kebudayaan Pendalungan, beserta hal-hal atau siapa saja yang memengaruhinya. Jadi, bukan hanya tentang si pengambil keputusan dan apa yang dia putuskan. Hal ini penting karena suatu keputusan diambil berdasarkan pada hal-hal tertentu atau pengaruh pihak-pihak tertentu.
2. Apa yang terjadi di banyak tempat selama ini adalah bahwa Pemerintah Daerah selalu tampak kurang berdaya dalam mengawal proses transformasi dan (re)konstruksi kebudayaan daerah karena selalu mengalami kesulitan untuk menemukan mitra yang memadai dalam hal

pemikiran. Pemerintah Daerah hanya menemukan makelar-makelar yang hanya pandai menghabiskan anggaran daerah untuk membikin acara pementasan seni-budaya, bukan bagaimana berpikir secara strategis mengembangkan kebudayaan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus lebih bersungguh-sungguh dalam memikirkan dunia seni-budaya di daerah masing-masing, dengan cara meniadakan berbagai proyek basa-basi dan pencitraan.

3. Pemerintah daerah harus segera merancang dan melaksanakan sebuah strategi yang logis secara teknis maupun administratif, yakni bekerja “melampaui tugas formal pembangunan budaya” sehingga akhirnya aktivitas berkesenian menjadi tradisi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara realistik yang bisa ditempuh adalah mengintegrasikan gagasan-gagasan pengembangan seni-budaya dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Cara inilah yang saya anggap paling memungkinkan untuk dapat melahirkan masyarakat Pendalungan yang berkebudayaan di masa depan.
4. Perlu ada kerangka teoritis dan filosofis untuk melihat secara komprehensif proses (re)produksi identitas kultural, yang selanjutnya dapat digunakan untuk memahami praktik-praktik yang memengaruhi proses (re)produksi identitas kultural masyarakat Pendalungan. Hal ini bukan soal sederhana karena proses produksi identitas kultural merupakan suatu operasi budaya yang kompleks, ambivalen, penuh kontestasi, serta tidak mudah untuk diprediksi.
5. Kita perlu melihat secara lebih seksama praktik-praktik sosial masyarakat Pendalungan, termasuk praktik bermedia mereka, secara holistik. Namun—perlu digarisbawahi, praktik produksi tersebut harus dilihat tidak semata sebagai bagian dari pertarungan pasar global sebagaimana kerap

mendominasi kajian politik-ekonomi. Akan tetapi, praktik produksi dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses sejarah sosial, pembentukan kebudayaan, dan kehidupan sehari-hari (Ortner, 2009). Media massa tidak bisa kita pandang sebagai cermin bening yang dapat memantulkan realitas sosial secara apa adanya, melainkan sarat dengan berbagai kepentingan, baik ekonomi, politik, maupun ideologi. Melalui studi yang memiliki cakupan cukup luas, kita perlu melihat praktik bermedia masyarakat Pandalungan, dalam hubungannya dengan berbagai praktik sosial lainnya, dalam kehidupan sehari-hari mereka dan kemudian meletakkannya dalam struktur sosial yang lebih besar. Dengan cara ini, saya yakin, kita akan bisa memahami masyarakat Pandalungan secara lebih holistik.

FOTO-FOTO

Berikut ini beberapa foto yang saya kumpulkan dan saya pilih untuk menunjukkan aktivitas masyarakat Pendalungan Jember dalam berkesenian. Juga terdapat sejumlah foto yang menggambarkan keadaan alam/pariwisata serta kehidupan sehari-hari masyarakat Jember. Tentu saja kekayaan kesenian atau kebudayaan masyarakat tidak dapat secara utuh terwakili oleh foto-foto ini karena terbatasnya ruang.



Grup Seni Hadrah, dari Pondok Pesantren Al Falah, Silo, Jember. Kesenian ini jumlahnya cukup banyak di Jember, tersebar secara merata, terutama berkembang di lingkungan pondok pesantren. (Foto Dok. Pribadi)



Seni Barongsai dan Leang Leong, kesenian khas masyarakat Tionghoa. Namun demikian para pemainnya terdiri atas berbagai etnis. (Foto Dok. Pribadi)



Seni Janger Setyo Kridho Budoyo, Srono, Banyuwangi. Pementasan di Jember, Januari 2017. Kesenian ini adalah produk khas masyarakat Pendalungan Banyuwangi. (Foto Dok. Pribadi)



Seni Janger, sering mementaskan lakon Minak Jinggo. Kesenian ini di Banyuwangi jumlahnya mencapai lebih dari 100 grup, sedangkan di Jember sekitar 5 grup. (Foto Dok. Pribadi)



Seni Jaranan, digemari masyarakat Jember terutama di bagian selatan. Dari tahun ke tahun jumlah kelompok kesenian ini cenderung meningkat. Dalam pementasannya sangat diwarnai oleh musik campursari. (Foto Dok. Pribadi)



Seni Jaranan, para penonton muda sering mengalami *intrance* (kesurupan) secara massal. Para pawang segera *nggambuhi* (menyadarkan) mereka yang *intrance* tersebut. (Foto Dok. Pribadi)



Seni Ludruk, melibatkan banyak pemain laki-laki yang berperan sebagai tokoh perempuan. Tersebar di seluruh wilayah Jember. Selain bahasa Jawa, bahasa Madura juga digunakan, tergantung cerita yang diangkat. (Foto Dok. Pribadi)



Meskipun pada saat ini seni Ludruk masih mendapat tempat cukup baik di kalangan masyarakat Jember, namun kondisinya cukup memprihatinkan. Jika tidak mendapat perhatian serius, kesenian ini terancam punah. (Foto Dok. Pribadi)



Musik Patrol, salah satu produk kesenian khas masyarakat Pendalungan. Kesenian ini terus berkembang; kini selain dilengkapi kendang (Banyuwangen), juga banyak yang menggunakan elektone. (Foto Dok. Pribadi)



Musik Patrol, berkeliling kampung/kota di malam hari pada bulan Ramadhan. Di Jember terdapat tidak kurang dari 40 kelompok Musik Patrol. (Foto Dok. Pribadi)



Opera Pandhalungan, hasil kreasi para seniman Jember. Bupati Jember, dr. Faida, MMR., berperan sebagai Dewi Rengganis. Lakon *Dewi Rengganis* diangkat dari cerita rakyat setempat. Naskah: Ilham Zoebazary; Sutradara: Supartu. (Foto Dok. Pribadi)



Tari Lahbako, menggambarkan para perempuan Jember yang sedang memetik dan mengolah tembakau. Tari ini dirancang sebagai tari khas Jember, namun hingga kini kurang mendapat respons positif masyarakat. (Foto Dok. Pribadi)



Seni Reyog Ponorogo, cukup digemari dan berkembang dengan baik di Jember bagian selatan. Kesenian ini memiliki basis massa yang cukup fanatik, khususnya di kalangan masyarakat keturunan etnis Jawa. (Foto Dok. Pribadi)



Seni Reyog Ponorogo, tidak pernah kekurangan dukungan, khususnya dari generasi muda. Di beberapa sekolah (SD, SMP, dan SMA) kesenian ini dijadikan kegiatan ekstra kurikuler dan dikenalkan pada para pelajar (Foto Dok. Pribadi)



Wayang Kulit, salah satu kesenian yang paling berhasil dalam melakukan regenerasi. Tidak terlalu sulit merekrut bakat-bakat muda. Beberapa dalang menekuni profesinya sebagai dalang dan dapat hidup layak dari berkesenian. (Foto Dok. Pribadi)



Dua dalang belia Jember yang baru tumbuh, penuh talenta, dan berprestasi di tingkat regional/nasional. Aditya Rizki Dwi Darmawan dan Mohammad Nur Wicaksono. (Foto Dok. Pribadi)



Para penari muda Sanggar Tari Kartika Budaya. Sanggar ini banyak melahirkan tari kreasi baru, baik yang berbasis tradisi maupun kontemporer. (Foto Dok. Pribadi)



Seni Gandrung, produk khas masyarakat Using, Banyuwangi, juga mendapat tempat di hati masyarakat Jember. (Foto Dok. Pribadi)



Grup Kentrung Djos, telah puluhan tahun mewarnai jagat seni pertunjukan di Jember. Kesenian ini dapat dijadikan sebagai salah satu contoh kesenian khas Pandalungan. (Foto Dok. Pribadi)



Grup Kentrung Djos, berkolaborasi dengan grup Campursari Gonjing Miring, dalam sebuah pertunjukan yang mengangkat lakon *Sri Tanjung*. (Foto Dok. Pribadi)



Kothekan Lesung, kesenian langka yang masih terus dipertahankan oleh Komunitas Pandhalungan Jember. Bisa dikatakan bahwa kesenian ini telah sejak lama punah. (Foto Dok. Pribadi)



Kothekan Lesung, dimainkan oleh ibu-ibu di pedesaan Jember. Tidak mudah menemukan kesenian ini, kecuali pada acara tertentu yang sengaja dipersiapkan. (Foto Dok. Pribadi)



Mamacah/Macapat. Seni membaca cerita, dilagukan. Di Jember disebut Mamacah, berbahasa Madura, sedangkan di Banyuwangi disebut Macapat, berbahasa Jawa. (Foto Dok. Pribadi)



Can-macanan Kaddhuk, cukup populer di Jember. Di Bondowoso disebut Singo Wulung. (Foto Dok. Pribadi)



Ta'-buta'an, mirip Ondel-ondel Betawi. Kesenian ini masih terapat di Kecamatan Arjasa. Biasanya dipentaskan dalam rangka ritual bersih desa. (Foto Dok. Pribadi)



Para remaja berjoget rampak diiringi alunan musik disko yang menggelegar melalui *sound-system* di atas mobil *pick-up*. Inilah tren baru yang disebut kesenian *Minisound*. (Foto Dok. Pribadi)



Seni pembuatan keris, senjata tradisional khas Nusantara, ini masih ada di Jember. Penggemarnya terdiri atas berbagai kalangan masyarakat. (Foto Dok. Pribadi)



Supo Rahardjo, penggagas Festival Egrang tahunan di kampung wisata Tanoker, Ledokombo. Kegiatan ini telah tumbuh menjadi agenda wisata baru yang cukup mengesankan. (Foto Dok. Pribadi)



Tanjung Papuma yang terkenal jelita, salah satu destinasi wisata alam andalan di Jember. (Foto Dok. Pribadi)



Para nelayan di Tanjung Papuma, pulang dari mencari ikan dengan perahu tradisional. (Foto Dok. Pribadi)

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Rekonstruksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adisasmita, Ki Sumidi. 1979. *Pustaka Centhini: Ikhtisar Seluruh Isinya*. Yogyakarta: Penerbit U.P. Indonesia.
- Alwi, Hasan. 2001. “Kebijakan Bahasa Daerah.” Dalam Dendy Sugono dan Abdul Rozak Zaidan (ed.). *Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Appadurai, Arjun. 2005. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis, London: University of Minnesota Press).
- Arifin, Edy Burhan. 2006. “Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya Pandhalungan”. Makalah dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII di Jakarta.
- Arybowo, Sutamat. 2010. “Kajian Budaya dalam Perspektif Filosofi”. Dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 12 No. 2.
- Askew, Kelly dan Richard R Wilk (eds.). 2002. *The Anthropology of Media A Reader*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori & Praktik*. Penerjemah Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Barth, Fredrik (ed.). 1969. *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Illinois: Waveland Press. Inc.
- Baudrillard, Jean P. 2004. *Masyarakat Konsumsi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Boas, Franz. 1989. *A Franz Boas reader: the shaping of American anthropology, 1883–1911*. University of Chicago Press.
- Bourdieu, Pierre. 1984. *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- BPS Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/330> (diunduh pada 27 Februari 2017)
- Eliade, Mircea. 2002. *Myth and Religion*. New York: Routledge.
- Foster, George M dan Barbara G. Anderson, 1978. *Medical Anthropology*. New York: Alfred A. Knopf.
- Geertz, Clifford. 1973. “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”. Dalam *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. Hlmn. 3–30. New York: Basic Books.
- Geertz, Clifford. 1976. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.
- Giddens , Anthony. 1995. *Politics, Sociology and Social Theory: Encounters with Classical and Contemporary Social Thought*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Hadi, Y. Setiyo. 2016. *Asal Usul Pandhalungan*. Jember: Salam Nusantara.
- Hall, Stuart. 1980. "Cultural Studies: two paradigms". *Media, Culture and Society*. Sage. 2 January (1): 57–72.
- Hall, Stuart. 1991. “Old and New Identities, Old and New Ethnicities” dalam Anthony D. King (ed.). *Culture, Globalization and The World System: Contemporary Conditions for The Representation of Identity*. Hampshire &

- London: Macmillan, bekerja sama dengan Department of Art and Art History, State University of New York di Binghamton.
- Harris, Marvin. 1988. *Culture, People, Nature: An Introduction to General Anthropology (5th ed.)*. New York: Harper & Row.
- Hatley, Ron. 1984. "Mapping cultural regions of Java", editor Ron Hatley dalam *Other Javas away from the Kraton*. Clayton, Australia: Monash University.
- Hefner, Robert W. (Ed.). *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Hsiao, Hsin-Huan Michael. 2005. "NGOs, the State, and Democracy under Democratization." Dalam Weller, Robert P. (ed.). *Civil Life, Globalization and Political Change in Asia: Organizing between Family and State*. London and New York: Roudledge.
- Jonge, Huub de. 1989. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Ilham, Mochamad. 2015. "Kelir Mancawarna: Strategi Kelisanan Seni Pertunjukan Janger Banyuwangi". Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Kartodirdjo, Sartono. 2003. *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kecik, Hario. 2011. *Pemikiran Militer 4: Bangsa Indonesia Abad 21 Timbulnya Filosofi Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Kivisto, Peter. 2014. *Religion and Immigration: Migrant Faiths in North America and Western Europe*. Cambridge: Polity Press.
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Lee, Everett S. 2000. *Teori Migrasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Levitt, Theodore. 1983. *Marketing Imagination*. London: The Free Press.
- Lombard, Denys. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya 1*. Jakarta: Gramedia Puataka Utama.
- Lowenfeld dan Brittain. 1983. "Creative and Mental Growth". *Studies in Art Education* Vol. 24, No. 2, hlmn. 140-142.
- Marcuse, Herbert. 1964. *One Dimensional Man*. Boston: Beacon Press.
- McKean, Philip. 1977. "Towards a Theoretical Analysis of Tourism: Economic Dualism and Cultural Involution in Bali". Dalam Valene L. Smith (Editor). *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- McLuhan, Marshall. 1964. *Understanding Media: Extension of Man*. USA: A Signet Book.
- Naroll, Raoul. 1964. "On ethnic unit classification". *Current Anthropology* 5 : 283-291, 306-312.

- North, Samantha. 2014. "Why do most city branding campaigns fail?" Diunduh dari <http://www.citymetric.com/business/why-do-most-city-branding-campaigns-fail> (1 Juni 2016).
- Ortner, Sherry B. 2009. "Studying Sideways: Ethnographic Access in Hollywood." Dalam Vicki Mayer, Miranda J. Banks, dan John Thornton Caldwell. *Production Studies: Cultural Studies of Media Industries*. New York: Routledge.
- Padmodiwirio, Suhario. 2001. *Memoar Hario Kecil II*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pelto, Pertti J. 1970. *Anthropological Research the Structure of Inquiry*. New York: Harper & Row Publishers.
- Pemkab Jember. 2015. *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Jember*. Jember: Pemkab Jember.
- Pendit, Nyoman S. 1990. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Picard, Michel. 1996. *Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapore: Archipelago Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1939. *Baoesastra Djawa*. Groningen: J.B. Wolters.
- Prasisko, Yongky Gigih. 2016. "Pedalungan: Orang-orang perantauan di 'Ujung Timur Jawa'". Makalah dalam seminar Membincang Kembali Terminologi Budaya Pandalungan, Jember, 10 Desember.
- Purwandaya, Budhi. 2011. "Poverty, Growth and Water: The Case of East Java, Indonesia". Makalah dalam *The Asian Conference on the Social Sciences*. Diakses melalui http://iafor.org/acss_proceedings.html.

- Raharjo, Christanto P. 2006. "Pendalungan: Sebuah 'Periuk Besar' Masyarakat Multikultural". Makalah disampaikan dalam kegiatan Jelajah Budaya, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 13 Agustus.
- Rahman, Adenasry Avereus. 2015. "Pengaruh Bahasa Madura dan Bahasa Jawa terhadap Bahasa Masyarakat Kabupaten Jember." Makalah Konferensi Nasional Bahasa dan Sastra III.
- Ratman, Dadang Rizki. 2016. "Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019". Paparan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata "Akselerasi Pembangunan Kepariwisata dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016". Jakarta, 27 Januari.
- Robson, Stuart dan Singgih Wibisono. 2002. *Javanese English Dictionary*. Hongkong: Periplus Edition.
- Safari, Achmad Opan. 2010. "Ruwatan Murwakala Cirebon". Makalah tidak diterbitkan.
- Salikin, Hairus. 2016. "Masa Depan Bahasa Madura di Kabupaten Jember: Sebuah Ancaman di Depan Mata". Dalam Novi Anoegrajekti (ed.). *Jejak Langkah Perubahan: Dari Using sampai Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sasongko, Yakob Arfin Tyas dan Ekawati S. Wahyuni. "Diaspora Madura: Analisis Modal Sosial dalam Usaha Sektor Informal oleh Migran Madura di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat."
- Saukko, Paula. 2003. *Doing Research in Cultural Studies*. London: Sage Publications.

- Setiawan, Ikwan dan Andang Subaharianto. 2016. “Bukan sekedar mencampur budaya: Hibriditas sebagai politik kultural masyarakat Using dan titik-baliknya di masa kini”. Makalah dalam Temu Ilmiah Nasional *Jejak dan Langkah Bahasa, Sastra, dan Budaya: Dari Using untuk Indonesia*.
- Spillane, James J. 1994. *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius & Lembaga Studi Realino.
- Spradley, James P. 1980. "Ethnography and Culture". Dalam James P. Spradley. *Participant Observation*. New York: Holt, Rhinehart, and Winston, Inc.
- Strathern, Marilyn. 1987. "Dealing with inequality: analyzing gender relations in Melanesia and beyond." Cambridge: Cambridge University Press.
- Stern, Robert M. 2000. *Globalization and International Trade Policies*. Singapura: World Scientific.
- Sukimi, Mohamad Fauzi B. 2004. “Carok Sebagai Elemen Identiti Manusia Madura (Carok and the Formation of Madurese Identity).” *Akademika*.
- Suparlan, Parsudi. 2009. “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”. Makalah pada Simposium Internasional *Jurnal Antropologi Indonesia* ke-3 di Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
- Sutarto, Ayu. 2006. “Sekilas tentang Masyarakat Pandalungan”. Makalah disampaikan pada acara pembekalan Jelajah Budaya, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 7-10 Agustus.

- Soetomo, Istiati. 1985. *Pokok-Pokok Pikiran tentang Multilingualisme dalam Sastra*. Semarang: Fakultas Sastra, Universitas Diponegoro.
- Tulistyantoro, Lintu. 2005. “Makna Ruang pada Tanean Lanjang di Madura”. Dalam *Dimensi Interior*, Vol. 3, No. 2, Desember.
- Tylor, Edward Burnett. 1871. *Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Volume 1*. London: John Murray, Albermarle Street.
- Universitas Negeri Yogyakarta dan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas Dikpora DIY. *Kamus Bahasa Jawa (online)*.
http://202.152.135.5/web_kamusbahasajawa/index.php?view=tentang (diakses 28-1-2017).
- Wahjono, Sentot Imam. 2011. “Aktualisasi Budaya Pendalungan untuk Kesenambungan Perusahaan Keluarga dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional.” Makalah Konferensi Nasional Meningkatkan Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Era Globalisasi.
- Wasino. 2011. “Multikulturalisme dalam Perspektif Sejarah Sosial”. Makalah dalam Seminar Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
- Wibisono, Bambang dan Akhmad Sofyan. 2001. “Latar Belakang Psikologis Pemilihan Bahasa pada Masyarakat Multilingual (Studi Kasus Pemakaian Bahasa oleh Masyarakat Etnik Madura di Jember)” dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Humaniora*, Vol.II/No.1 Januari, Fakultas Sastra Universitas Jember, hlmn. 1-13.

- Winarni, Retno. 2012. “Bertahan di Tengah Menguatnya Kekuasaan Kolonial dan Modernisasi Bupati-Bupati Karesidenan Besuki Jawa Timur 1820-an-1830-an”. Disertasi Program Doktor Sejarah Studi Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Wiyata, A. Latief. 2002. “Mencermati Kondisi Sosial Budaya Pengungsi Sampit di Kabupaten Jember”. Makalah “Seminar Kajian Konflik di Kalimantan”. Diselenggarakan oleh LASEMA-CNRS, France, Social Sciences For The Study of Conflict In Indonesia, Proyek Kerjasama CNRS-LIPI, Jakarta 19 Maret 2002.
- Shahab, Yasmine (ed.). 1997. *Betawi dalam Perspektif Kontemporer: Perkembangan, Potensi, dan Tantangannya*. Jakarta: LKB.
- Yuswadi, Harry. 2008. “Budaya Pendhalungan Bentuk Multikulturalitas dan Budaya Antar Etnik”. Dalam Ayu Sutarto dan Setya Yuwana Sudikan (Ed). *Pemetaan Kebudayaan Di Propinsi Jawa Timur Sebuah Upaya Pencarian Nilai-nilai Positif*. Jember: Biro Mental Spiritual Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Kompyawisda.
- Yuswadi, Harry. 2005. *Melawan Demi Kesejahteraan, Perlawanan Petani Jeruk terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jember: Kompyawisda.
- Zoebazary, M. Ilham. 2013. *Pikiran-Pikiran (dari) Kampung*. Jember: Visart Global Media.

Indeks

- Abdullah, 23, 58, 86, 88, 174, 225
- Alex Jokomulyo, 110
- alih kode, 130, 132
- Alwi, 136, 225
- Ambulu, 18, 118, 132
- Anderson, 32, 106, 226
- Appadurai, 25, 141, 191, 225
- Arab, 19, 57, 61, 91, 110, 111, 114, 117, 129, 131, 132, 145, 190
- Arek, 34, 35, 38, 44, 46
- Arifin, 189, 190, 225
- Arya Wiraraja, 66
- Arybowo, 149, 151, 225
- Askew, 142, 225
- bahasa Jemberan, 90, 133, 134, 135
- Bali, 20, 24, 39, 49, 60, 111, 128, 135, 136, 145, 146, 148, 154, 167, 172, 176, 177, 178, 189, 190, 228, 229, 231
- Banyuwangi, 20, 23, 35, 36, 44, 45, 49, 67, 95, 105, 110, 113, 117, 121, 122, 124, 131, 142, 148, 155, 156, 167, 174, 175, 183, 189, 190, 205, 206, 221, 227
- Barker, 23, 140, 225
- Barth, 24, 225
- Baudrillard, 142, 225
- Bentham, 27
- Besuki, 188, 189, 190, 233
- bilingual/multilingual, 131
- Blambangan, 20, 34, 39, 49, 188
- Blum, 92
- Boas, 105, 226
- Bondowoso, 32, 35, 44, 45, 67, 72, 110, 117, 119, 127, 131, 188, 189, 190
- Bourdieu, 25, 226
- budaya Arek, 20, 48
- budaya Panji, 20
- budaya urban, 81, 150
- campur kode, 130, 132
- Campursari, 47, 112, 118, 146
- Cina, 19, 57, 60, 61, 86, 110, 111, 114, 129, 139, 145, 190
- city branding*, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 229
- Community Based Tourism*, 179
- Crystal, 177
- cultural bomb*, 17
- Demak, 39
- Denys Lombard, 101
- Dewan Kesenian, xvi
- dhalung*, 96, 97, 98
- Dynand Faris, 151

eksonim, 95
Eliade, 52, 53, 226
endonim, 95
era perkebunan, 42
Faida, 17, 26, 76, 168
Fariz, 153, 154
Festival Pandhalungan, 76,
159
Foster, 106, 226
Foucault, 26, 27
Furnivall, 56
Geertz, 23, 56, 64, 141, 226
Getz, 179
Giddens, 29, 53, 226
globalisasi, 28, 139, 140, 141,
142, 145, 146, 147, 149, 168,
201
Gus Dur, 37
Hadrah, 45, 117, 119, 121
Hall, 22, 25, 81, 90, 226
Harris, 106, 227
Hatley, 34, 36, 227
Hefner, 51, 227
hibridisasi budaya, 65, 83, 96,
153
Hindia Balanda, 38
Hsiao, 146, 227
identitas budaya, x, 18, 23, 24,
30, 77, 80, 87, 114, 147, 178
Ilham, iii, iv, vii, 123, 124, 131,
227, 233, 239
Jawa, ix, xvi, 17, 19, 20, 23,
24, 29, 33, 34, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 56,
60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 72,
73, 74, 76, 85, 86, 89, 90, 91,
92, 93, 95, 96, 97, 98, 101,
103, 104, 106, 109, 110, 111,
114, 117, 118, 119, 121, 127,
129, 130, 131, 132, 134, 135,
136, 139, 145, 151, 152, 154,
167, 169, 173, 181, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194,
196, 226, 228, 229, 230, 232,
233
Jemberan, 132
JFC (*Jember Fashion
Carnaval*), xiv, 83, 146, 150
Jonge, 196, 227
Kartodirdjo, 139, 227
kaum Abangan, 45
Kediri, x, 20, 34, 73, 81, 89,
162, 190, 239
Kentrung Djos, 83, 110, 125,
126, 127, 128, 240
Kivisto, 57, 228
Koentjaraningrat, 21, 34, 114,
152, 228
Komunitas Pandhalungan, 17,
159
Komunitas Sastra Pendalungan,
18
Kota Pendalungan, xvi, 76, 77,
159, 165, 168, 170
Kuntowijoyo, 194, 195, 228
Lee, 106, 187, 195, 228

Lekkerkerker, 49
 Lengger, 119
 Levitt, 140, 228
 Lombard, 69, 228
 Lowenfeld dan Brittain, 125, 228
 Lumajang, 19, 35, 44, 45, 67, 113, 117, 119, 120, 131, 174, 176, 181
 Macanputih, 39
 Macapat, 119, 121, 221
 Madiun, 20, 34, 93
 Madura, 19, 23, 29, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 46, 49, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 103, 104, 109, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 145, 152, 167, 187, 189, 190, 193, 194, 195, 227, 228, 230, 231, 232, 239
 Mahmud, 136
 Majapahit, 20, 39, 66, 113
 majemuk, xi, 51, 52, 54, 55, 56, 58
 Malang, 20, 35, 48, 67, 73, 121, 174, 239
 Malaysia, 51, 159, 160, 166, 172, 173, 227, 239
 Mancanegari, 34
 Mangkurat I, 69
 Margana, 39, 49
 Maryani, 127
 Mataram, 20, 34, 38, 39, 40, 47, 69, 188
 Mataraman, 20, 33, 34, 38, 41, 44, 46, 47, 98, 101
 Mazzarella, 143, 147
 McKean, 177, 228
 McLuhan, 28, 228
melting pot, 53, 57, 75, 167
 Mendalungan, x, 39
 Mitra Jawilan, 61
mode of domination, 28
 multietnik, 51
 multikultural, 51, 53, 55, 60, 61, 69, 75, 111, 199, 201, 202
 multikulturalisme, 26, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 76, 91, 92, 93, 129, 200, 201
 Multikulturalisme, 51, 55, 57, 59, 232
 Murphy, 180
 Musik Patrol, 117, 122
 Nahdlatul Ulama, 45
 Naroll, 32, 228
 Ndalungnesia, 18
 North, 164, 165, 228, 229
Oosthoek, 38
 Opera Pentalungan, 18
 Orde Baru, 23, 29, 37, 160, 197, 203, 204, 205
 Ortner, 208, 229
 Padmodiwirio, 101, 102, 229

Pakubuwono V, 100
 Panaragan, 33, 34, 35, 46, 47
 Pandalungan, ix, x, 19, 76, 111,
 159, 229, 231
 Pandhalungan, ii, iv, x, 17, 18,
 19, 76, 113, 159, 160, 225,
 226
 Pandhalungan Night Show, 17,
 18
 Panopticon, 27
 Pasuruan, 35, 39, 43, 44, 45,
 69, 105, 117, 174, 196
 Pelto, 106, 229
 pemerintah Kolonial Belanda,
 40
 Pentalungan Raya, 35, 42, 74,
 125, 199
 Pendhalungan, x, 17, 19, 91,
 233
 Pendit, 175, 229
 Picard, 229
 Pickard, 178
 Pike, 106
platform, 26, 54, 60, 85
 pluralisme, 51, 53, 55, 56, 57,
 85, 93, 129, 199, 200
 Poerwadarminta, 97, 98, 229
 Prawiroatmodjo, 96
 Probolinggo, xvi, 19, 35, 44,
 45, 67, 69, 103, 113, 117,
 120, 131, 174, 196
 Pujiono, 102
 Purwandaya, 38, 46, 229
 Puslit Budaya Etnik dan
 Komunitas, ix
Radar Jember, 17
 Raden Wijaya, 66
 Raharjo, 19, 36, 69, 90, 91, 92,
 96, 104, 117, 119, 132, 135,
 230
 Rahman, 132, 133, 135, 230
 rasisme, 92
regenschap, 191
 Retsikas, 103, 105
 Robbins dan Dowty, 202
 Robson, 97, 230
 Robson dan Wibisono, 97
 Rumah Budaya Pandhalungan,
 iv, vii, 17, 159
 Safari, 101, 230
 Salikin, 135, 136, 137, 230
 Samin, 34, 35
 Sanggar Seni Kartika Budaya,
 18
 Saukko, 22, 230
 Semipro, 113
Serat Centhini, 98, 99, 100,
 101
 Shahab, 64, 233
 Singapura, 51, 160, 162, 173,
 231
 Singasari, 20, 66
 Soetomo, 137, 232
 Spillane, 176, 231
 Spradley, 21, 231
 Stern, 140, 231

Strathern, 191, 231
Sudikan, 34, 233
Sudjana, 39
Sultan Agung, 39, 69
Suparlan, 55, 56, 231
Supartu, 127
Surabaya, 20, 34, 35, 38, 48,
58, 67, 82, 103, 163, 240
Sutarto, ix, 34, 35, 45, 68, 72,
96, 109, 110, 112, 147, 149,
165, 231, 233
Sutikno, 165
Suyatno, 127
Tanahsabrang Wetan, 34
Tanean Lanjang, 49, 232
Tapal Kuda, i, iii, iv, ix, xi, xvi,
24, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 44, 45, 46, 59, 60, 61,
67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 89,
92, 95, 96, 98, 105, 106, 109,
111, 112, 113, 116, 117, 121,
123, 129, 130, 144, 145, 147,
181, 182, 183, 186, 199, 200,
201, 202
Tari Lahbako, 121, 122
Taylor, 21, 131
Tengger, 34, 35, 95, 173
Thailand, 160, 172, 173
Thamrin, 65
Tionghoa, 61, 91, 117, 132
Trunojoyo, 69
Tulistyantoro, 194, 232
Tylor, 232
Universitas Jember, ix, 17, 19,
118, 165, 193, 232, 239
Universitas Muhammadiyah,
ix
Using, 20, 23, 34, 35, 36, 41,
44, 46, 49, 61, 91, 95, 111,
114, 117, 129, 132, 145, 167,
190, 230, 231
Wahjono, 68, 70, 232
Wasino, 54, 232
Wayang Golek, 102
Wayang Topeng, 119
Wibisono dan Sofyan, 134,
135
Winarni, 38, 39, 111, 119, 188,
189, 191, 233
wisata alam, 171, 173, 181
wisata buatan, 171
wisata budaya, 171
Wiyata, 233
Yasadipura II, 100
Yatiman, 127
Yuswadi, 65, 96, 104, 233
Zoebazary, iii, iv, vii, 27, 139,
233, 239

Tentang Penulis

M. Ilham Zoebazary lahir di desa Kandangan, Kediri, Oktober 1962. Bersekolah di desanya hingga SMP, kemudian melanjutkan ke SMAN I Malang. Pada tahun 1982 menempuh kuliah di Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Jember, lalu melanjutkan studi magister di bidang Kajian Media dan Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga. Gelar doktor diraihinya pada tahun 2015 di Universitas Gadjah Mada pada bidang ilmu sastra (Kajian Tradisi Lisan). Hingga kini memilih menetap di Jember dan menjadi dosen di Alma Maternya di Jurusan Sastra Inggris dan PSTF (Program Studi Televisi & Film) FIB, Univ. Jember.

Sejak di SMA telah aktif menulis naskah drama dan menyutradarainya. Selanjutnya dia lebih intens pada penulisan skenario. Sejumlah skenario sinetron yang ditulisnya antara lain serial *GKD* (1996-1997), *Maling Aguna* (2004), *Sate Madura* (2005) dan *Dewi Rengganis* (2006). Dua serial lainnya, *Sang Duda* dan *Luka di Atas Luka*, telah diproduksi sebuah PH Malaysia pada tahun 1998/9.

Di sela-sela kesibukan mengajar masih sempat menulis cerpen, puisi, novel, dan skenario film. Skenario film pendek yang ditulis dan disutradarainya antara lain *Rumah Putih di Kaki Langit* (2001), terpilih sebagai Film Terbaik FFII 2001, sekaligus memenangkan Sutradara Terbaik dan Aktris Terbaik; *Gaco* (2002), masuk 10 besar FFII SCTV 2002; *Sepenggal Kepala di Sepenggal Waktu* (2003), dan *Nyanyian Sebilah Pedang* (2005), menjadi salah satu film pilihan FFII Global TV 2005. Beberapa buah bukunya yang telah diterbitkan antara lain *Gandrung* dan *Orang-orang Bawah Tanah* (VGM, 2009), berisi

kumpulan naskah drama, *Kamus Istilah Televisi & Film* (Gramedia, 2010), sebuah novel *Titik Balik Kesunyian* (VGM, 2012), dan kumpulan esai *Pikiran-pikiran (dari) Kampung* (VGM, 2013).

Selama lebih dari 10 tahun, bersama kawan-kawannya yang tergabung dalam Grup Kentrung Djos, dia menjadi pengisi rutin sejumlah acara siaran pedesaan di TVRI Surabaya. Sejak tahun 2016 aktif di bidang pengembangan seni budaya di Rumah Budaya Pandhalungan Jember.